

Laporan Kinerja Triwulan III TAHUN 2021



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
2021




KEMENTERIAN
KOORDINATOR
BIDANG
KEMARITIMAN
DAN INVESTASI

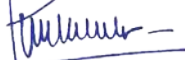
Kata Pengantar

Sebagai Kementerian yang mengkoordinasikan pembangunan dibidang kemaritiman dan investasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) telah menyusun Laporan Kinerja Triwulanan untuk dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Penyusunan laporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2021 bertujuan untuk menilai progress pencapaian target kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) yang telah ditetapkan di awal tahun 2021. Laporan ini juga merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan program/kegiatan berlangsung (*intermediate evaluation*) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kemenko Marves untuk dapat memenuhi target sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Akhirnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi komprehensif mengenai progres pencapaian target dalam mewujudkan kondisi ideal yang diinginkan melalui indikator kinerja yang terukur. Informasi yang tertuang dalam laporan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan, sehingga upaya pelaksanaan kegiatan menjadi lebih optimal. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Kritik, masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan ke depan.

Jakarta, Oktober 2021
Sekretaris Kementerian Koordinator



Agung Kuswandono

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Triwulan III Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Triwulan III (periode Juli s.d September) tahun 2021. Laporan ini menjelaskan pelaksanaan Renstra Kemenko Marves tahun 2020-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kemenko Marves dalam pembangunan bidang kemaritiman dan investasi. Laporan Kinerja ini juga merupakan alat kendali sekaligus pemacu peningkatan kinerja seluruh unit kerja dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders guna perbaikan kinerja. Capaian kinerja Kemenko Marves sampai dengan Triwulan III sebesar 21,14%, beberapa target kinerja dari IKU direncanakan akan dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021), dan akan disajikan pada laporan kinerja tahunan.

Adapun penjelasan singkat mengenai pencapaian kinerja Kemenko Marves sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 yang dikelompokkan dalam 4 perspective adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective* terdiri dari 3 (tiga) SS yaitu:

- a. Teguhnya Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat;
- b. Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional;
- c. Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur.

Pada Triwulan III untuk 3 SS pada *Stakeholder Perspective* capaian sebesar 29,23%, capaian ini didapat dari SS 3: Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur dengan IKU yaitu Indeks Daya Saing Global (IDSG) sebesar 87,69%, dari target tahun 2021 sebesar 65 dengan realisasi 57. Capaian yang disajikan merupakan hasil dari *Survei World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021* yang dilakukan oleh *Institute Management Development (IMD)* menempatkan daya saing Indonesia pada peringkat 37 dari total 64 negara yang didata. Hasil penilaian atas IKU ini akan dirilis oleh *World Economic Forum* pada akhir tahun 2021. Sedangkan 2 IKU lainnya capaian kinerja ditargetkan dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021).

2. *Customer Perspective* terdiri dari 5 (lima) SS yaitu:

- a. Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional;

- b. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis;
- c. Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia;
- d. Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam;
- e. Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara

Untuk 5 SS di atas sampai dengan Triwulan III capaian atas perspektif ini sebesar 8,78%, target kinerja yang dapat disajikan pada perspektif yaitu IKU 11 (Indeks Kapabilitas Inovasi). Capaian atas IKU ini telah dirilis *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Cornell University dan INSEAD pada bulan September 2021. Target tahun 2021 atas IKU ini adalah 38,6, dengan realisasi tercapai 27,1 sehingga capaian nya sebesar 70,21%. Sedangkan capaian kinerja lainnya ditargetkan dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021).

3. *Internal Business Process* terdiri dari 2 (dua) SS yaitu:
 - a. Tersedianya Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien;
 - b. Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien.

Sampai dengan triwulan III, capaian atas *Internal Business Process* persfektive dengan 2 SS ini belum dapat disajikan, karena target atas IKU nya akan dicapai pada akhir tahun 2021.

4. *Learning and Growth* dengan 4 (empat) SS, dengan rincian:
 - a. Terwujudnya ASN Kemenko Marves yang Profesional;
 - b. Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik
 - c. Sistem Informasi Manajemen Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang Terintegrasi, belum ada target dan capaian kinerja;
 - d. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang Terintegrasi;
 - e. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel.

Pada Triwulan III target atau capaian kinerja yang diperoleh atas *Learning and Growth Perspective* adalah 72,81%, dari 4 SS sampai TW III telah dapat teralisasi 3 IKU, 1 IKU ditargetkan dicapai pada akhir tahun 2021 berdasarkan hasil penilaian dari BKN. Adapun realisasi yaitu sebagai berikut:

- IKU Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves yaitu dari target 80 realisasi 75,18 (93,98%). Namun demikian Kemenko Marves berhak mengajukan penyesuaian tunjangan kinerja menjadi sebesar 80%.

- IKU Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dari target 3,3 pada akhir tahun 2021 telah terealisasi 3,21 (berdasarkan penilaian sementara tim *asesor* KemenPANRB yang dilaksanakan pada bulan September), capaian atas IKU tersebut adalah 97,27%. KemenPANRB baru akan merilis hasil penilaian secara resmi pada akhir tahun 2021.
- IKU Opini BPK tercapai 100%, hal ini dibuktikan dengan realisasi WTP dari target yang dicanangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan LHP Nomor: 26b/LHP/XV/05/2021 tanggal 31 Mei 2021).

Stakeholder Perspective

SS 1	Teguhnya Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat	SS 2	Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional	SS 3	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur
	Capaian : n/a		Capaian : n/a		Capaian : 87,69%

CUSTOMER Perspective

SS 4	Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional	SS 5	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis	SS 6	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia
	Capaian : n/a		Capaian : n/a		Capaian : n/a

SS 7	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam	SS 8	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara
	Capaian : n/a		Capaian : 70,21%

Internal Business Process Perspective

SS 9

Tersedianya Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien

Capaian : n/a

SS 10

Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien

Capaian : n/a

Learning and growth PERSPECTIVE

SS11

Terwujudnya ASN Kemenko Marves yang Profesional

Capaian : n/a

SS12

Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang baik

Capaian : 93,98%

SS13

Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang terintegrasi

Capaian : 97,27%

SS14

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Capaian : 100%

Nilai capaian kinerja total dan untuk masing-masing perspektif pada setiap triwulan tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Total per Triwulan Tahun 2021

Perspektif	Bobot (%)	Triwulan			
		I	II	III	IV
Stakeholder	15	-	-	29,23	-
Customer	25	-	-	8,78	-
Internal Business Process	40	-	-	0	-
Learning and Growth	20	-	23,50	72,81	-
		-	4,7	21,14	-

Dari total pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 264.977.466.000, secara garis besar terdiri dari 4 jenis belanja, namun Kemenko Marves hanya melaksanakan 3 jenis belanja, yaitu: belanja pegawai dengan pagu Rp. 55.028.210.000,- dengan realisasi Rp. 47.148.636.523,- (85,68%); belanja barang dengan pagu anggaran Rp. 205.609.387.000,- dengan realisasi Rp. 116.421.709.035,- (56,62%) dan belanja modal Rp. 4.339.869.000,- dengan realisasi Rp. 3.263.128.800,- (75,19%). Sampai dengan triwulan III realisasi anggaran belanja pada Kemenko Marves mencapai 62,96% (Rp. 166.833.474.358,-). Secara detail pagu anggaran dan realisasi belanja terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Realisasi Belanja s.d Triwulan III Tahun 2021

Belanja	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Pegawai	55.028.210.000	47.148.636.523	85,68	7.879.573.477
Barang	205.609.387.000	116.421.709.035	56,62	89.187.677.965
Modal	4.339.869.000	3.263.128.800	75,19	1.076.740.200
Total	264.977.466.000	166.833.474.358	62,96	98.143.991.642

Sumber: SAS, Sept 2021



Grafik 1. Realisasi Belanja s.d TW III 2021

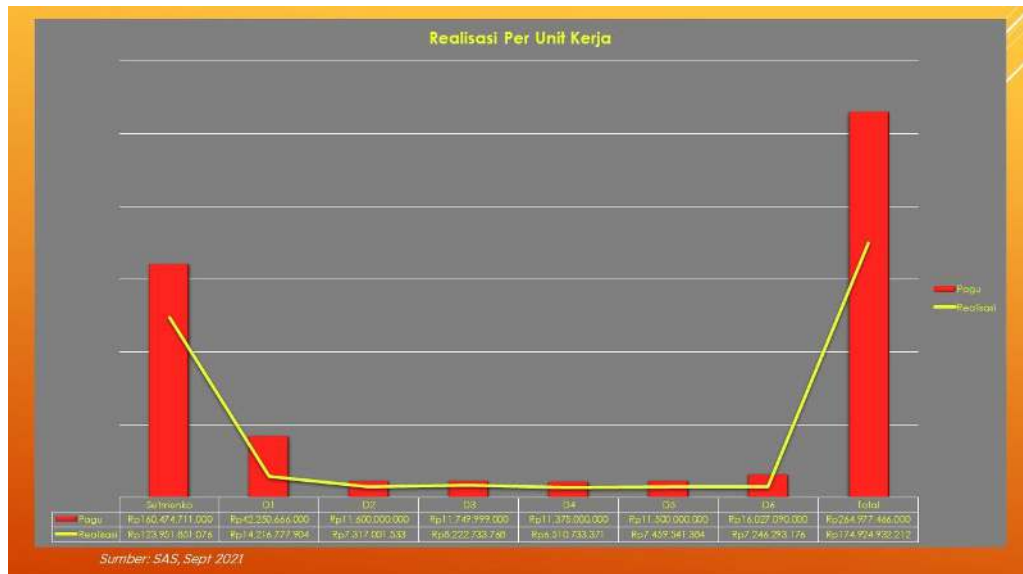
Dari tabel dan diagram tersebut terlihat bahwa realisasi belanja tertinggi dari belanja pegawai mencapai 85,68% atau Rp. 47.148.636.523,- sedangkan belanja terendah adalah belanja barang dengan realisasi 56,62% atau Rp. 89.187.677.965,-

Dalam mendukung terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan dan ditargetkan, setiap unit kerja memiliki target kinerja triwulan dan tahunan pada 2021. Pada triwulan III TA. 2021, realisasi belanja anggaran unit kerja eselon I yaitu Sekretariat Kemenko dari pagu Rp. 160.474.711.000,- realisasi Rp. 123.951.851.076,- (77,24%), sedangkan realisasi terkecil adalah Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (D1) dari pagu sebesar Rp. 42.250.666.000,- baru teralisasi Rp. 14.216.777.904,- (33,65%), realisasi anggaran tiap unit kerja pada Kemenko Marves disajikan pagu anggaran dan realisasi pada grafik berikut ini:

Realisasi Per Unit Kerja Juli s.d September (Triwulan III)

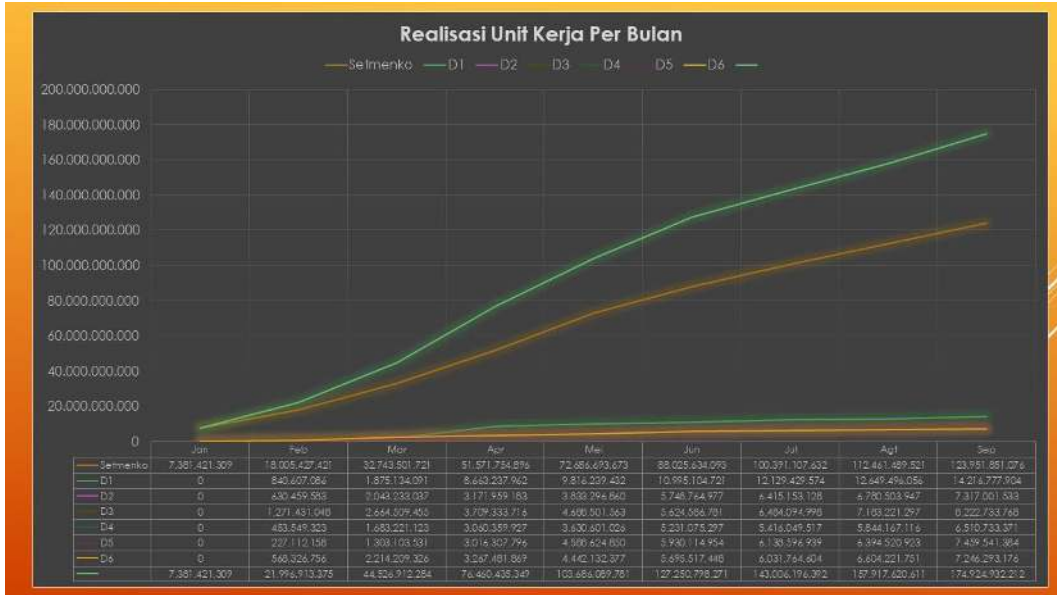
Unit kerja	Juli			Agustus			September		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Sekretariat Kementerian Koordinator	163.751.428.000	100.391.107.632	61,31%	160.474.711.000	112.461.489.521	70,08%	160.474.711.000	123.951.851.076	77,24%
Deputi Bidang Koordinasi Kelautan Maritim dan Energi	44.950.666.000	12.129.429.574	26,99%	42.230.666.000	12.649.696.036	29,94%	42.250.666.000	14.216.777.904	33,65%
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	14.300.000.000	6.413.133.128	44,86%	11.600.000.000	6.780.503.947	58,45%	11.600.000.000	7.317.001.533	63,08%
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	14.449.999.000	6.484.094.998	44,87%	11.740.999.000	7.183.221.297	61,13%	11.740.999.000	8.222.733.768	69,98%
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	14.075.000.000	5.416.049.517	38,48%	11.375.000.000	5.844.167.116	51,38%	11.375.000.000	6.510.733.371	57,24%
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	14.200.000.000	6.138.596.939	43,23%	11.500.000.000	6.394.520.923	55,60%	11.500.000.000	7.459.541.384	64,87%
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	18.725.000.000	6.031.764.604	32,21%	16.027.090.000	6.604.221.751	41,21%	16.027.090.000	7.246.293.176	45,21%
Total	284.452.093.000	145.006.196.392	50,27%	264.977.466.000	157.917.620.611	59,60%	264.977.466.000	174.924.932.212	66,02%

Sumber: SAS, Sept 2021

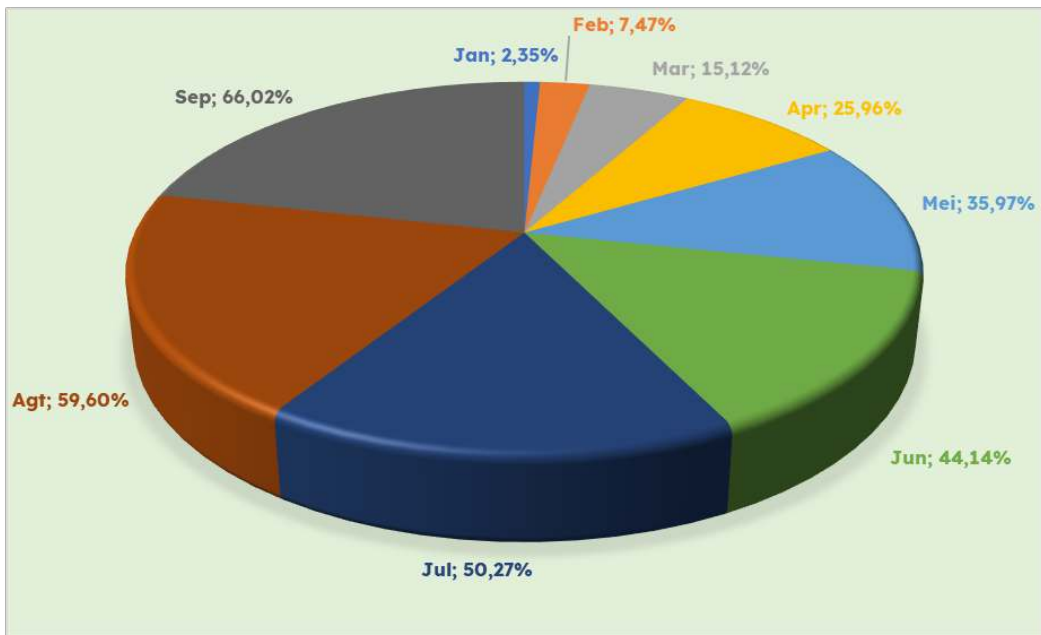


Grafik 2 Realisasi Anggaran per Unit Kerja Kemenko Marves TA. 2021

Realisasi anggaran perbulan sampai dengan triwulan III tahun 2021 tidak merata namun realisasi setiap bulannya mengalami peningkatan, kendati masih dihadapi dengan kondisi Pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi realisasi belanja setiap bulannya. Lonjakan terjadi pada bulan September, setiap unit kerja Eselon I mengalami peningkatan realisasi belanja dibanding bulan sebelumnya seperti terlihat pada grafik berikut:



Grafik 3 Realisasi Anggaran per Bulan Kemenko Marves TA. 2021



Grafik 4 Realisasi Anggaran per Bulan Kemenko Marves TA. 2021

Sumber: SAS, Sept 2021

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	xi
Pendahuluan	1
1.1. Tugas dan Fungsi	1
1.2. Organisasi Kemenko Marves	2
1.3. Peran Strategis	4
1.4. Sumber Daya Kemenko Marves	6
Perencanaan Kinerja	11
2.1. Rencana Strategis	11
2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2021	15
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	17
2.4. Penghitungan Capaian Kinerja	20
Akuntabilitas Kinerja	23
3.1. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021	23
3.2. Realisasi Anggaran	27
3.3. Analisa Kinerja	32
3.4. Capaian Kinerja Lainnya	115
3.5. Prestasi sampai dengan TW III 2021	120
3.6. Inovasi	122
3.7. Analisa Kondisi Sumber Daya Pegawai	141
3.8. Analisa Sumber Daya Anggaran	143
Penutup	146
4.1. Kesimpulan	146
4.2. Langkah Perbaikan Kedepan	148
Lampiran	149
Tim Penyusun	153

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Kinerja Total per Triwulan Tahun 2021	vii
Tabel 2.	Realisasi Belanja s.d Triwulan III Tahun 2021	viii
Tabel 3.	Statistik Data Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	7
Tabel 4.	Statistik Data Tkk Administrasi Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Tabel 5.	Pagu Anggaran Unit Kerja Eselon I setelah Refocusing Tahap 4	9
Tabel 6.	Sasaran Strategis Kemenko Marves 2021	14
Tabel 7.	Program dan Kegiatan Tahun 2021	16
Tabel 8.	Pagu Anggaran Unit Kerja Eselon I	16
Tabel 9.	Perjanjian Kinerja Kemenko Marves Tahun 2021	17
Tabel 10.	Program/Kegiatan Kemenko Marves Tahun 2021	19
Tabel 11.	Capaian Kinerja Kemenko Marves s.d Triwulan III Tahun 2021	26
Tabel 12.	Nilai Capaian Kinerja per Perspective Tahun 2021	27
Tabel 13.	Pagu Anggaran Unit Kerja Eselon I setelah Refocusing Tahap 4	28
Tabel 14.	Realisasi Belanja s.d Triwulan III Tahun 2021	29
Tabel 15.	Konversi nilai Tingkat Kedaulatan Maritim	33
Tabel 16.	Konversi nilai Indeks Kepemimpinan Maritim.....	33
Tabel 17.	Capaian Kinerja SS.1 TW III	34
Tabel 18.	Perbandingan Capaian dan Target Indikator 1	34
Tabel 19.	Capaian Kinerja SS.2 TW III	36
Tabel 20.	Perbandingan Capaian dan Target Indikator 2	36
Tabel 21.	Capaian Kinerja SS.3 TW III	41
Tabel 22.	Perbandingan Realisasi dan Target Indikator 3.....	44
Tabel 23.	Konversi Nilai Tingkat Kedaulatan Maritim.....	46
Tabel 24.	Capaian Kinerja SS.4 TW III	46
Tabel 25.	Perbandingan Capaian dan Target Indikator 4.....	46
Tabel 26.	Capaian Kinerja SS.5 TW III	48
Tabel 27.	Perbandingan Capaian dan Target Indikator 5.....	52
Tabel 28.	Perbandingan Capaian dan Target Indikator 6.....	61
Tabel 29.	Capaian Kinerja SS.6 TW III	64
Tabel 30.	Nilai Variabel Masing-masing Bobot.....	66
Tabel 31.	Perbandingan Capaian dan Target Indikator 7.....	66
Tabel 32.	Perbandingan Capaian dan Target Indikator 8.....	69
Tabel 33.	Capaian Kinerja SS.7 TW III	74
Tabel 34.	PDB Triwulanan menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2021 (miliar Rp.)	76
Tabel 35.	Distribusi Persentase PDB Triwulanan menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2021 (miliar Rp.)	77
Tabel 36.	Formula Perhitungan PDB Sektor Sumberdaya Alam.....	77
Tabel 37.	Perbandingan Capaian dan Target Indikator 9.....	77
Tabel 38.	Capaian dan Target IKU Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional	78
Tabel 39.	Distribusi PDB Berdasarkan Lapangan Usaha	82
Tabel 40.	Laju Pertumbuhan (q-to-q) PDB Triwulanan menurut Lapangan Usaha, 2021 (persen)	82
Tabel 41.	Perbandingan Capaian dan Target Indikator 10.....	88
Tabel 42.	Capaian Kinerja SS.8 TW III	90

Tabel 43.	Perbandingan Capaian dan Target Indikator 11	94
Tabel 44.	Capaian Kinerja SS.9 TW III	96
Tabel 45.	Perbandingan Capaian dan Target Indikator 12.....	96
Tabel 46.	Capaian Kinerja SS.10 TW III	99
Tabel 47.	Perbandingan Capaian dan Target Indikator 13.....	99
Tabel 48.	Capaian Kinerja SS.11 TW III.....	100
Tabel 49.	Perbandingan Capaian dan Target Indikator 14.....	103
Tabel 50.	Capaian Kinerja SS.12 TW III	105
Tabel 51.	Perbandingan Capaian dan Target Indikator 15.....	107
Tabel 52.	Nilai Indeks Sementara SPBE Tahun 2021	109
Tabel 53.	Capaian Kinerja SS.13 TW III	110
Tabel 54.	Perbandingan Capaian dan Target Indikator 16.....	110
Tabel 55.	Capaian Kinerja SS.14 TW III	111
Tabel 56.	Perbandingan Capaian dan Target Indikator 17.....	114
Tabel 57.	Pagu Anggaran setelah <i>Refocusing</i> Tahap 4	143
Tabel 58.	Unit Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Kemenko Marves	3
Gambar 2.	Peta Strategis Kemenko Marves.....	13
Gambar 3.	Komposisi bobot IKU terhadap Tingkat Kendali dan Validitas IKU	20
Gambar 4.	Bobot Bukti Hasil Kinerja.....	21
Gambar 5.	Dua Belas Pilar Daya Saing.....	37
Gambar 7.	Indeks Daya Saing Global Indonesia tahun 2019.....	39
Gambar 8.	Surat Izin Prakarsa.....	47
Gambar 9.	Lokasi <i>Pilot Project</i> Implementasi IKLI.....	67
Gambar 10.	Capaian IKLH, IKA, IKU, dan IKTL Tahun 2015 – 2020.....	69
Gambar 11.	Laju Pertumbuhan PDB Triwulan II/2021 (q-to-q) Menurut Kategori (persen)	75
Gambar 12.	Alur Pengajuan IP ASN	101
Gambar 13.	Rincian Dimensi Penilaian IP ASN.....	102
Gambar 14.	Penilaian IP ASN.....	102
Gambar 15.	Diagram Realisasi Anggaran Pertriwulan tahun 2021.....	144

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Realisasi Belanja s.d TW III 2021	viii
Grafik 2.	Realisasi Anggaran per Unit Kerja Kemenko Marves TA. 2021	ix
Grafik 3	Realisasi Anggaran per Bulan Kemenko Marves TA. 2021	x
Grafik 4	Realisasi Anggaran per Bulan Kemenko Marves TA. 2021	x
Grafik 5.	Jumlah Sekretariat Kementerian Koordinator Marves.....	3
Grafik 6	Diagram Realisasi Anggaran	28
Grafik 7	Diagram Persentase Pencairan Belanja s.d TW III Tahun 2021	29
Grafik 8	Realisasi Belanja Per Unit Eselon I s.d TW III Tahun 2021	30
Grafik 9	Realisasi Anggaran per Bulan Kemenko Marves TA. 2021	31

Grafik 10. Survey Penilaian IDSG Indonesia Tahun 2021	40
Grafik 11. Laju Pertumbuhan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2019-2021 (persen) 75	
Grafik 12. Distribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dalam PDB Triwulanan, 2019-2021 (persen).....	76
Grafik 13. Laju Pertumbuhan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 2019-2021 (persen) 81	
Grafik 14. Distribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Dalam PDB	81
Grafik 15. Laju Pertumbuhan Pertambangan dan Penggalan, 2019-2021 (persen)	86
Grafik 6 Realisasi Anggaran per Bulan Kemenko Marves TA. 2021	97

DAFTAR SINGKATAN DAN PENGERTIAN

IKU	: Indikator Kinerja Utama
Kemenko Marves	: Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi
Menko	: Menteri Koordinator Bidang
PDB	: Produk Domestik Bruto
RB	: Reformasi Birokrasi
Renstra	: Rencana Strategis
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja
Setmenko Kematriman	: Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kematriman
Sesmenko Kematriman	: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kematriman
SPIP	: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SS	: Sasaran Strategis
TA	: Tahun Anggaran
TKM	: Tingkat Keselamatan Maritim
TKW	: Tingkat Kepastian (ke)Wilayahan
TKKM	: Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim

Pendahuluan 01

Laporan Kinerja Kemenko Marves Triwulan III Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Triwulan III (periode Juli s.d September) tahun 2021. Laporan ini menjelaskan pelaksanaan Renstra Kemenko Marves tahun 2020-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kemenko Marves dalam pembangunan bidang kemaritiman dan investasi yang merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Tahun 2020-2024 yang menitikberatkan pada upaya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju, dan kuat, menuju poros maritim dunia melalui pembangunan di bidang kemaritiman dan investasi.

1.1. Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, tugas dari Kemenko Marves yaitu menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Tugas tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden. Dalam melaksanakan tugas, Kemenko Marves menyelenggarakan fungsi:

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi

01

Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dibidang kemaritiman dan investasi

02

Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kemaritiman dan investasi

03

Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet

04

Penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian /Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud

05

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

06

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Marves

07

Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi

08

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden

09

Berdasarkan peraturan dimaksud, kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves yaitu:

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Kementerian Perhubungan;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Lementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
8. Instansi lain yang dianggap perlu.



1.2. Organisasi Kemenko Marves

Kemenko Marves dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi, organisasi Kemenko Marves sampai dengan unit eselon I selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi. Sesuai Permenko Nomor 10/2020 Kemenko Marves terdiri dari terdiri atas Sekretariat Kementerian Koordinator, 6 (enam) Deputi, 4 (empat) Staf Ahli, dan Inspektorat, sebagai berikut:



Grafik 5. Jumlah Sekretariat Kementerian Koordinator Marves

Susunan organisasi Kemenko Marves berdasarkan Perpres Nomor 92 Tahun 2019 terlihat seperti gambar di bawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Kemenko Marves

Tugas dan fungsi Unit Kerja Lingkup Kemenko Marves, sebagai berikut :



1.3. Peran Strategis

Peran strategis Kemenko Marves dalam melaksanakan pembangunan dibidang kemaritiman dan investasi yaitu dengan adanya 3 (tiga) mandat langsung dari Presiden Jokowi kepada Menko Marves pada pengumuman Kabinet Indonesia Maju, yaitu: 1) Melakukan terobosan-terobosan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia; 2) Menangani hambatan-hambatan investasi; dan 3) Merealisasikan komitmen – komitmen investasi besar.

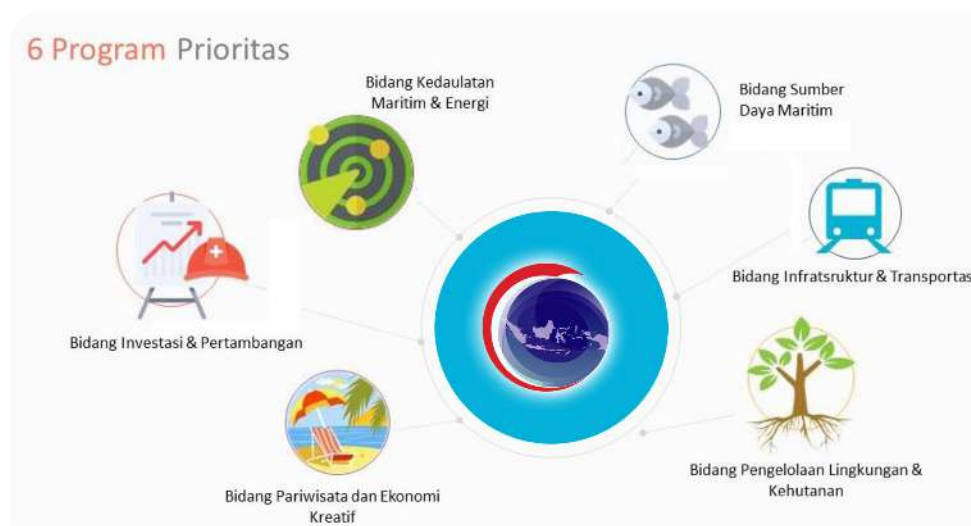
Selanjutnya arahan Presiden Jokowi dipertegas terkait tugas Menko yang harus dilaksanakan di Bidang Marves yaitu:



Permasalahan yang harus diselesaikan oleh Kemenko Marves dalam pembangunan bidang kemaritiman dan investasi yaitu:

- Biaya logistik masih menjadi permasalahan yang cukup pelik, dipicu oleh konektivitas maritim yang belum baik;
- Permasalahan industri Pertambangan muncul seperti permasalahan sosial, politis, perundangan hingga Pertambangan Tanpa Izin (PETI);
- Permasalahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2021 ini sebagaimana juga dihadapi oleh sektor-sektor lainnya adalah masih mewabahnya pandemi *corona virus* (Covid-19) di seluruh dunia;
- Disparitas pembangunan yang direpresentasikan dari peta investasi;
- Ketersediaan data kinerja logistik khususnya yang terkait dengan distribusi antar pulau menjadi sangat penting karena dapat mengetahui permasalahan logistik (*bottleneck logistics*) dalam pengiriman barang antar pulau dan membandingkan indikator daya saing perdagangan antar pulau, khususnya biaya dan waktu antar rute-rute tertentu.

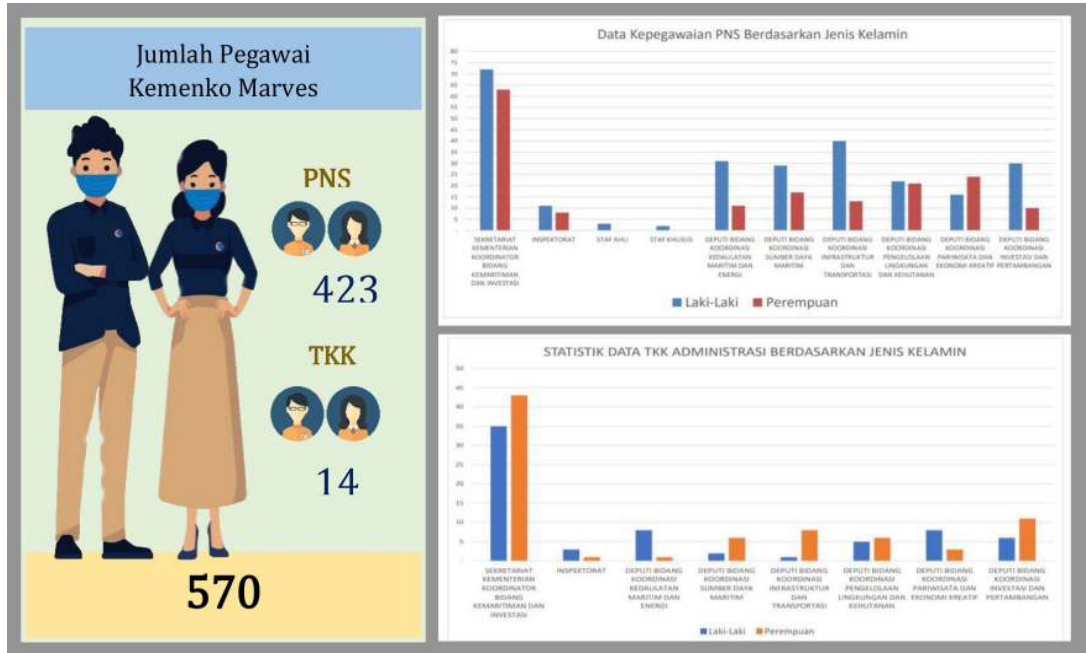
Sejalan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi fokus pada 6 program prioritas bidang yaitu:



1.4. Sumber Daya Kemenko Marves

1.4.1. Sumber Daya Manusia

Sejak ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi, Kemenko Marves sampai dengan saat ini memiliki 570 pegawai, dengan rincian PNS 473 pegawai dan TKK 147 pegawai. Jumlah pegawai berstatus PNS berjenis kelamin laki-laki 256 orang, dan perempuan 167 orang. Sedangkan pegawai yang berstatus TKK berjenis kelamin laki-laki 68 orang dan perempuan 79 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:



Tabel 3. Statistik Data Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Jumlah
	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	256	167	423
I.	SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	72	63	135
II.	INSPEKTORAT	11	8	19
III.	STAF AHLI	3	-	3
IV.	STAF KHUSUS	2	-	2
V.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI	31	11	42
VI.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM	29	17	46
VII.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI	40	13	53
VIII.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN	22	21	43
IX.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	16	24	40
X.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN	30	10	40

Tabel 4. Statistik Data Tkk Administrasi Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	Jumlah
	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	68	79	147
I.	SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	35	43	78
II.	INSPEKTORAT	3	1	4
III.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM DAN ENERGI	8	1	9
IV.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM	2	6	8
V.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI	1	8	9
VI.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN	5	6	11
VII.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	8	3	11
VIII.	DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN	6	11	17

Sumber: Biro Umum, 2021

1.4.2. Sarana Prasarana

Guna mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas, Kemenko Marves didukung dengan adanya sumberdaya berupa prasarana dan sarana yang memadai. Selain memiliki gedung perkantoran yang beralamat di Gedung Kemenko Marves, Jl M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, juga didukung beberapa prasarana dan sarana perkantoran, adapun data yang kami sajikan diantaranya sebagai berikut:

Prasarana & Sarana

Penunjang tugas Kemenko Marves

 Mobil Operasional 77 unit	 Sepeda Motor Operasional 19 unit	 Lemari (arsip/filing cabinet/pakaian/brankas) 295 unit	 CCTV 26 unit	 Projektor 38 unit	 Kamera (SLR/Mirrorless/Bawah Air) 67 unit
 PC/Laptop/Notebook/ Tablet 915 unit	 Printer & Scanner 382 unit	 Meja (Kerja/Tamu/Sudut/Rapat) 375 unit	 Kursi (Kerja/Tamu/Sofa/Rapat) 1.572 unit	 Telepon/HP 72 unit	 Faksimili 7 unit
 Handy Talky 60 unit	 Drone 6 unit	 Alat Pemadam Api/Kebakaran 90 unit	 Peralatan Lainnya 27 unit	 UPS (uninterruptible power supply) 8 unit	 TV 106 unit

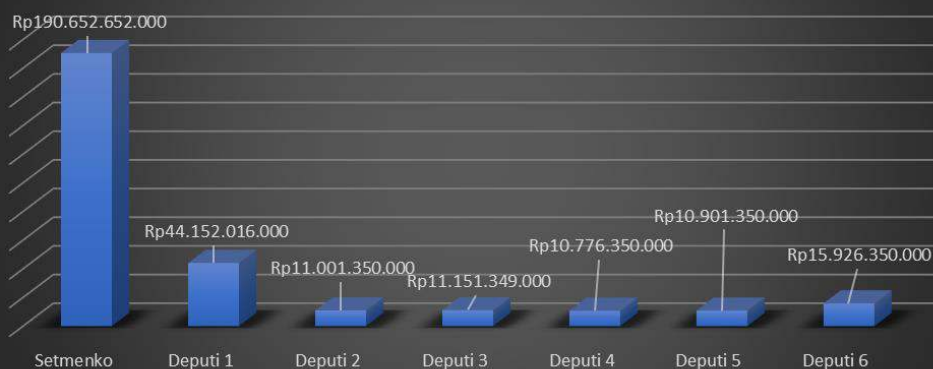
Sumber: Biro Umum, 2021

Untuk rincian secara lengkap prasarana dan sarana penunjang tugas Kemenko Marves bisa diakses melalui link: <https://bit.ly/DataDukungMarves2021>.

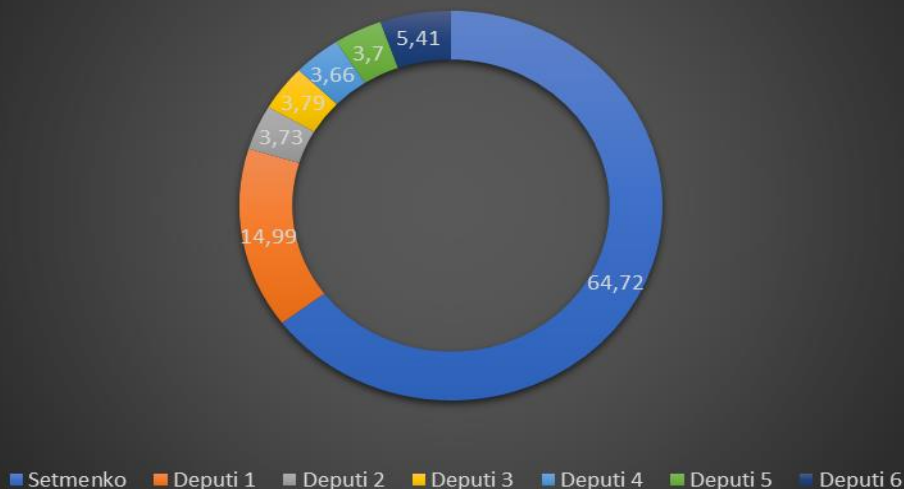
1.4.3. Sumber Daya Keuangan

Anggaran Kemenko Marves TA. 2021 telah disahkan pada tanggal 23 November 2020, dimana Kemenko Marves memperoleh alokasi Pagu Anggaran Definitif sebesar Rp. 314.596.417.000 (Tiga Ratus Empat Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah),-, namun dengan adanya kebijakan refocusing dari DJA Kementerian Keuangan, Kemenko Marves melakukan revisi dengan jumlah DIPA sebesar Rp. 294.561.417.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah). Adapun rincian anggaran per unit kerja Kemenko Marves sebagai berikut :

Pagu Anggaran Per Unit Kerja Tahun 2021



Persentase Pagu Anggaran Per Unit Kerja



Sumber: OMSPAN, 2021

Tahun 2021 masih dihadapi dengan kondisi pandemic Covid 19, sehingga anggaran belanja seluruh K/L mengalami perubahan/refocusing. Sebagian dialokasikan tetap untuk penanganan Covid-19. Demikian pula dengan Kemenko Marves, atas arahan Presiden telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran. Sampai dengan TW III Kemenko Marves telah melakukan refocusing sebanyak 4 kali.

Jumlah Pagu Anggaran Kemenko Marves setelah dilakukan 4 kali refocusing, dari pagu Rp. 294.561.417.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) menjadi Rp 264.977.466.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), adanya pengurangan sebesar Rp 49.618.951.000,- (Empat Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah). Adapun anggaran per unit kerja eselon I setelah dilakukan refocusing sampai dengan Triwulan III sebagai berikut:

Tabel 5. Pagu Anggaran Unit Kerja Eselon I setelah Refocusing Tahap 4

No	Unit Kerja	Pagu (Rp.)
1	Sekretariat Kementerian Koordinator	160.474.711.000
2	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	42.250.666.000
3	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	11.600.000.000
4	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	11.749.999.000
5	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	11.375.000.000
6	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11.500.000.000
7	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	16.027.090.000
Total Anggaran		264.977.466.000

1.5. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini secara umum berisi tentang capaian kinerja Kemenko Marves pada periode Triwulan III 2021. Sebagai tolak ukur analisis keberhasilan kinerja yaitu membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan rencana kinerja (*performance plan*). Dari hasil analisis capaian kinerja tersebut, diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:



Perencanaan Kinerja

02

2.1. Rencana Strategis

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Maka, Visi Kemenko Marves sebagai organisasi yang membantu Presiden guna mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden di bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu:

“Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Visi ini merupakan implementasi Visi Presiden yang dituangkan dalam Naskah RPJM Nasional 2020-2024. Visi ini dapat dimaknai bahwa untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu adalah Indonesia akan menjadi pusat orientasi, dan/atau menjadi rujukan, dunia dalam bidang kemaritiman. Ini juga menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk kembali meraih kejayaan di laut.

Untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia, Indonesia telah memiliki modal yang kuat. Karakter bangsa



bahari yang diwariskan oleh nenek moyang kita menjadi modal dasar disamping posisi geostrategi Indonesia, kekayaan alam yang ada, dan bonus demografi yang dimiliki saat ini. Potensi bencana dan potensi ancaman yang ada, justru menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia.

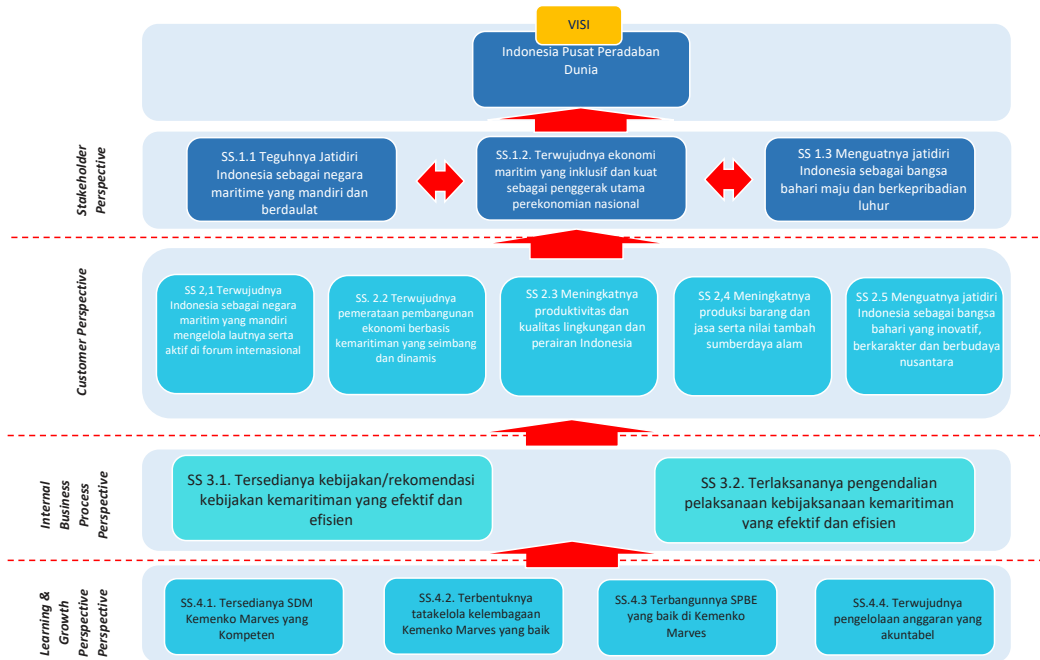
Visi tanpa misi hanyalah sebuah cita-cita. Misi diperlukan untuk mengoperasionalkan visi yang telah dicanangkan. Sehubungan dengan visi tersebut di atas, untuk mewujudkan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJM 2020-2024, Kemenko Marves berkontribusi langsung pada Misi ke-1, 2, 3, 4 dan 5 dari 9 Misi Presiden yang harus dilaksanakan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

- Misi 01** Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- Misi 02** Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
- Misi 03** Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- Misi 04** Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- Misi 05** Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan kemaritiman Indonesia dalam jangka menengah tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Sasaran Strategis untuk pencapaian visi dan misi Kemenko Marves menggunakan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC) dan digambarkan dalam peta strategis sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3 di bawah ini:



Gambar 2 Peta Strategis Kemenko Marves

Peta strategis Kemenko Marves membagi sasaran kementerian ke dalam 4 (empat) perspective, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal bussines process perspective* dan *learning and growth perspective*. Peta strategi tersebut memfokuskan pada pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada para pemangku kepentingan melalui 5 (lima) sasaran strategis utama pembangunan kemaritiman Indonesia pada *Perspective Customer* (SS.4 s/d SS.8)

Sasaran strategis pembangunan Kemaritiman dan Investasi merupakan kondisi yang diinginkan dan akan dicapai oleh Kemenko Marves sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) Kemenko Marves tahun 2020-2024 seperti tabel 1 di bawah ini:

Tabel 6. Sasaran Strategis Kemenko Marves 2021

Perspective	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Unit Penanggungjawab
 Stakeholder	SS.1	Teguhnya Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat	Efektifitas Kepemimpinan Maritim	Seluruh Deputi
	SS.2	Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional	PDB Maritim	Seluruh Deputi
	SS.3	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur	Indeks Daya Saing Global (IDSG)	Seluruh Deputi
 Customer	SS.4	Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional	Indeks Kedaulatan Maritim	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
	SS.5	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis	Indeks Kinerja Logistik	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
			Indeks Disparitas Ekonomi	1. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi 2. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
	SS.6	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia	Indeks Kesehatan Laut	Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Maritim
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	SS.7	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam	PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa	Seluruh Deputi
Tingkat Komponen dalam Negeri			Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	
SS.8	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara	Indeks Kapabilitas Inovasi	1. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim 2. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	SS.9	Tersedianya Kebijakan/Rekomendasi	% Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan	Seluruh Deputi

Perspective	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Unit Penanggungjawab
Internal Business Process		Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	
	SS.10	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	% Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti Seluruh Deputi
 Learning and Growth	SS.11	Terwujudnya ASN Kemenko Marves yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Kemenko
	SS.12	Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves Sekretariat Kemenko
	SS.13	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang Terintegrasi	Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sekretariat Kemenko
	SS.14	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Opini BPK Sekretariat Kemenko

2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2021

Kemenko Marves pada tahun 2021 memiliki 2 program yaitu: 1) Program Dukungan Manajemen dengan 1 kegiatan; 2) Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dengan 7 kegiatan. Penyusunan anggaran Tahun 2021, berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan performance based budgeting dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Berdasarkan hasil pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan c.q. DJA, Kemenko Marves mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 314.596.417.000,-, (Tiga Ratus Empat Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) namun pada bulan Februari 2021 mengalami revisi anggaran, sehingga jumlah pagu anggaran yang diterima oleh Kemenko Marves sebesar Rp. 294.561.417.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) hal ini karena adanya refocusing anggaran dari DJA Kementerian Keuangan. Jumlah tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 kegiatan yang terangkum dalam 2 program. Adapun nama program dan kegiatan sebagai berikut:



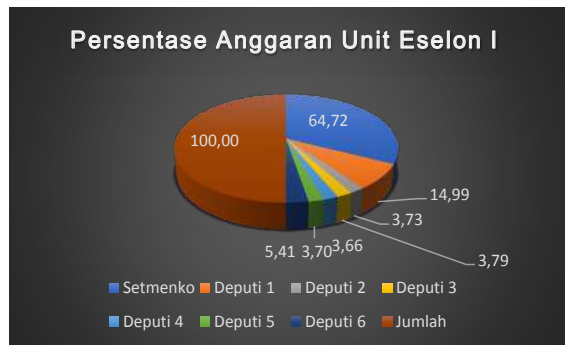
Tabel 7. Program dan Kegiatan Tahun 2021

No.	Kode Kegiatan	Kode Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Unit Kerja
		Program Dukungan Managemen	190.652.652.000,-	Setmenko
1	5601	Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	190.652.652.000,-	Setmenko
		Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan		
2	4830	Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	44.152.016.000,-	Deputi 1
3	4831	Koordinasi Sumber Daya Maritim	11.001.350.000,-	Deputi 2
4	4832	Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	11.151.349.000,-	Deputi 3
5	5996	Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	10.776.350.000,-	Deputi 4
6	6002	Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10.901.350.000,-	Deputi 5
7	6008	Koordinasi Investasi dan Pertambangan	190.652.652.000,-	Deputi 6
TOTAL			Rp. 294.561.417.000,-	

Anggaran sebesar Rp. 294.561.417.000,- tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya 14 sasaran strategis Kemenko Marves tahun 2021 sehingga alokasi anggaran per unit kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Pagu Anggaran Unit Kerja Eselon I

Unit Kerja	Pagu Anggaran	%
Setmenko	190.652.652.000,-	64,72
Deputi 1	44.152.016.000,-	14,99
Deputi 2	11.001.350.000,-	3,73
Deputi 3	11.151.349.000,-	3,79
Deputi 4	10.776.350.000,-	3,66
Deputi 5	10.901.350.000,-	3,70
Deputi 6	15.926.350.000,-	5,41
Jumlah	Rp. 294.561.417.000,-	100



Berdasarkan rincian alokasi anggaran di atas, alokasi terbesar adalah untuk Program Dukungan Manajemen yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Kemenko Marves yaitu sebesar Rp. 190.652.652.000,- (64,72%). Sedangkan alokasi pagu anggaran terkecil yaitu Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Deputi 4) sebesar Rp. 10.776.350.000,- (3,66%).

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

A. Indikator Kinerja Utama

Perjanjian kinerja tingkat Kemenko Marves tahun 2021 telah disusun dan ditandatangani oleh Menteri Koordinator. Kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan (*cascading*) menjadi kinerja seluruh unit dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja pada level Kemenko Marves berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup sasaran, indikator kinerja, dan target sebagai berikut:

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Kemenko Marves Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
SS.1	Teguhnya Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat	1	Efektifitas Kepemimpinan Maritim	Nilai	>=3	>=3	>=3	>=3	>=3
SS.2	Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional	2	PDB Maritim	%	6,31	6,63	6,99	7,41	7,80
SS3	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur	3	Indeks Daya Saing Global (IDSG)	Nilai	64,6	65	65,4	65,8	66
SS.4	Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional	4	Indeks Kedaulatan Maritim	Nilai	3	3	3	4	4
SS.5	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis	5	Indeks Kinerja Logistik	Nilai	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
		6	Indeks Disparitas Ekonomi	Nilai	~0	~0	~0	~0	~0
SS.6	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia	7	Indeks Kesehatan Laut	Nilai	65	65	66	66	67
		8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	66,95	67,33	67,7	68,08	68,53
SS.7	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai	9	PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa	Nilai	15,86	16,31	16,79	17,19	17,73

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
	Tambah Sumber Daya Alam	10	Tingkat Komponen dalam Negeri	Nilai	44	45	46	48	50
SS.8	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara	11	Indeks Kapabilitas Inovasi	Nilai	38	38,6	39,5	40,5	41,5
SS.9	Tersedianya Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	12	% Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan	%	100	100	100	100	100
SS.10	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	13	% Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
SS.11	Terwujudnya ASN Kemenko Marves yang Profesional	14	Indeks Profesionalitas ASN	%	71	73	75	78	81
SS.12	Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik	15	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	Nilai	75	80	85	90	95
SS.13	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang Terintegrasi	16	Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3	3,3	3,6	3,8	4,0
SS.14	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	17	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Penandatanganan perjanjian kinerja (PK) Menteri Koordinator dilakukan pada bulan Januari 2021 dan selanjutnya diikuti oleh seluruh pejabat struktural yang mencakup Eselon I, II, III dan IV. Perjanjian Kinerja tersebut berisikan penjabaran dari IKU Kemenko Marves yang harus dicapai pada tahun 2021.

B. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, Sasaran Strategis Kemenko Marves didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 10. Program/Kegiatan Kemenko Marves Tahun 2021

NO	SS	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
I	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan		
1	Teguhnya Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat	Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Rp 38.521.237.000,-
2	Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional	Koordinasi Investasi Dan Pertambangan	Rp 10.260.386.000,-
3	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur	Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	Rp 8.064.542.000,-
		Koordinasi Investasi Dan Pertambangan	Rp 10.260.386.000,-
4	Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional	Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Rp 38.521.237.000,-
5	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis	Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	Rp 8.064.542.000,-
		Koordinasi Investasi Dan Pertambangan	Rp 10.260.386.000,-
6	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia	Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp 6.808.603.000,-
		Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Rp 6.616.036.000,-
7	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam	Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Rp 38.521.237.000,-
		Koordinasi Investasi Dan Pertambangan	Rp 10.260.386.000,-
		Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	Rp 8.064.542.000,-
		Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Rp 6.616.036.000,-

NO	SS	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
8	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara	Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp 6.808.603.000,-
		Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 6.869.367.000,-
9	Tersedianya Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	Rp 8.064.542.000,-
		Koordinasi Investasi Dan Pertambangan	Rp 10.260.386.000,-
10	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	Koordinasi Investasi Dan Pertambangan	Rp 10.260.386.000,-
II	Program Dukungan Manajemen		
11	Terwujudnya ASN Kemenko Marves yang Profesional	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	Rp 827.188.000,-
12	Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp 3.304.838.000,-
13	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang Terintegrasi	Layanan Data dan Informasi	Rp. 2.736.560.000,-
14	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Layanan Keuangan	Rp. 2.736.492.000,-

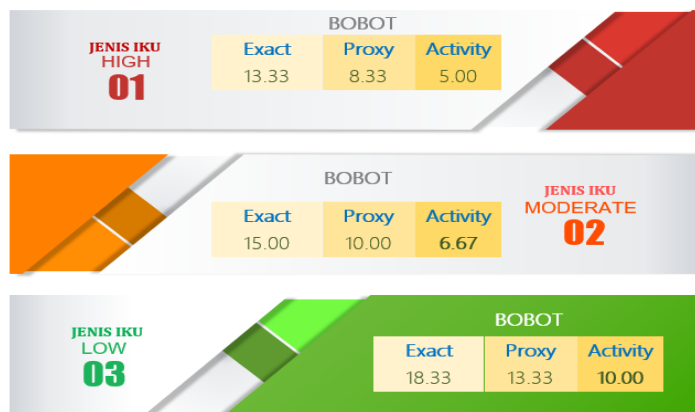
Catatan:

1. Anggaran yang dialokasikan sebelum dilakukan refocusing dalam rangka pemotongan anggaran
2. Akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan hasil refocusing anggaran

2.4. Penghitungan Capaian Kinerja

Dalam menghitung capaian realisasi kinerja dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Menghitung capaian IKU:
 - a. Penghitungan capaian dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
 - Tingkat kendali dan tingkat validitas suatu IKU, dengan komposisi bobot sebagai berikut:



Gambar 3. Komposisi bobot IKU terhadap Tingkat Kendali dan Validitas IKU

- Bukti hasil kinerja, dengan komposisi bobot sebagai berikut:

	Kategori Penilaian	Bobot
Bobot Hasil Kerja	Sesuai	1
Bobot Hasil Kerja	Belum Relevan	0,5
Bobot Hasil Kerja	Tidak Sesuai	0

Gambar 4. Bobot Bukti Hasil Kinerja

- Menghitung persentase capaian Indikator Kinerja Utama, yaitu dengan membagi capaian berbanding targetnya.

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$$

- Menghitung persentase capaian final IKU, yaitu dengan menjumlahkan eviden dengan capaian IKU kemudian total penjumlahan dibagi 2.

$$\text{Capaian Final IKU} = \frac{\text{Eviden} + \text{Capaian IKU}}{2}$$

- Menghitung capaian Sasaran Strategis

Penghitungan didapatkan dengan perkalian antara capaian final IKU dan bobot final kemudian dibagi terhadap total bobot final IKU per SS yang ada targetnya.

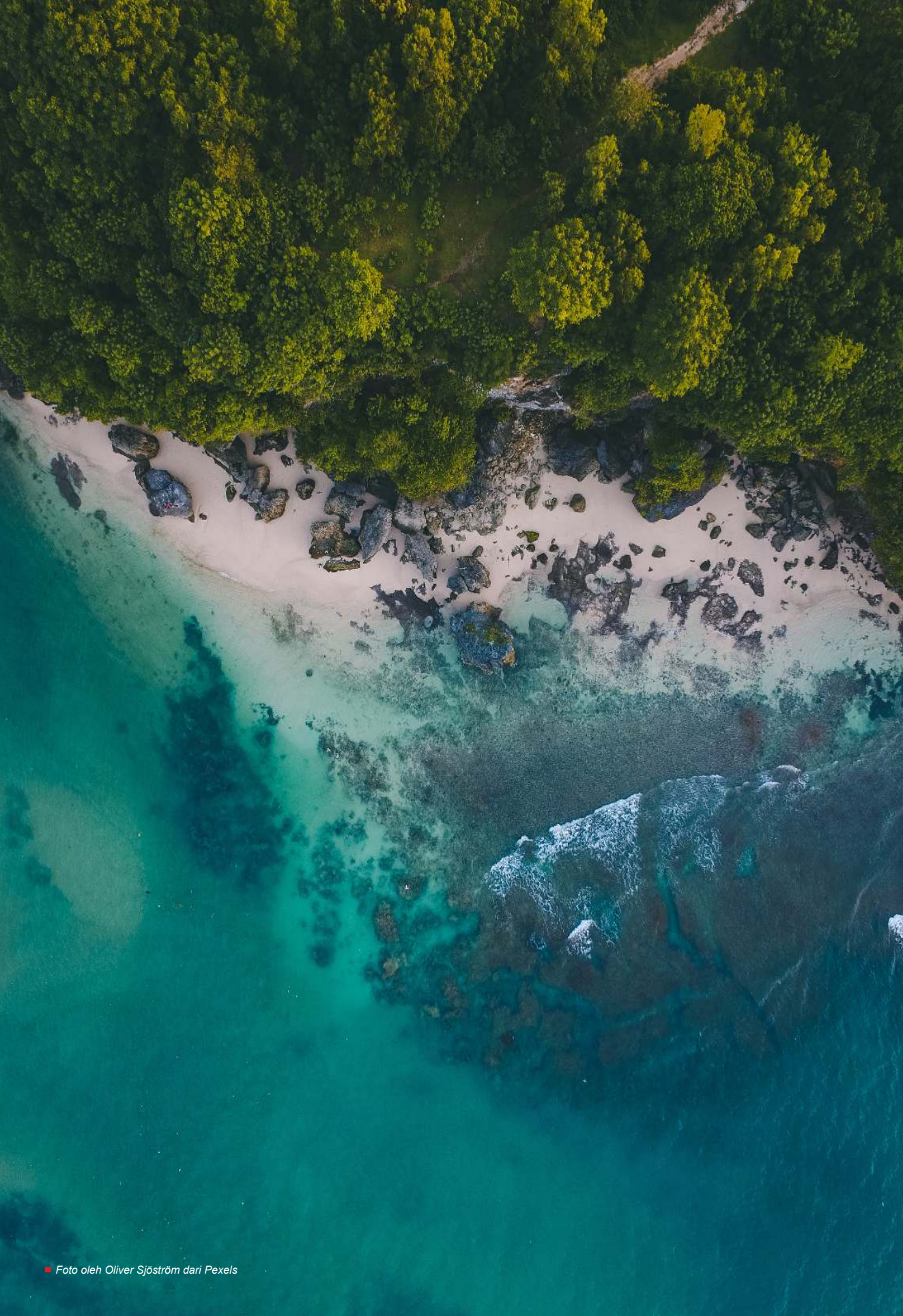
$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Capaian Final IKU} \times \text{Bobot Final IKU}}{\text{Total bobot final IKU yang ada targetnya per SS}}$$

- Perspective didapat dari hasil perkalian capaian sasaran dan bobot sasaran kemudian dibagi terhadap total bobot sasaran per Perspective

$$\text{Perspective} = \frac{\text{Capaian Sasaran} \times \text{Bobot Sasaran}}{\text{Total bobot sasaran per Perspektif}}$$

- Capaian Kerja Unit dihasilkan dari perkalian capaian Perspective dengan bobot Perspective yang dibagi terhadap total bobot Perspective.

$$\text{Capaian kerja Unit} = \frac{\text{Capaian Perspective} \times \text{Bobot perspective}}{\text{Total bobot perspective}}$$



Akuntabilitas Kinerja

03

Akuntabilitas Kinerja Kemenko Marves merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsinya. Akuntabilitas kinerja ini tertuang dalam setiap indikator yang menggambarkan ketercapaian sasaran strategis dari kondisi ideal yang ingin diwujudkan Kemenko Marves. Sejak tahun 2016 Kemenko Marves telah menerapkan model *Balanced Score Card* (BSC) dalam pengelolaan kinerjanya. Salah satu keunggulan pengelolaan kinerja dengan konsep BSC adalah disusunnya Strategi Kemenko Marves yang komprehensif dalam suatu peta strategi yang mencakup empat perspektif, yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*.

Dalam implementasinya, Kemenko Marves terus berusaha untuk menyempurnakan model pengelolaan kinerja dengan konsep BSC agar sesuai dengan kondisi riil dan selaras dengan best practice sektor publik secara internasional. Dari masing-masing perspektif tersebut, Kemenko Marves kemudian merumuskan sasaran strategis (SS), indikator kinerja utama (IKU), dan target kinerja yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kemenko Marves. SS, IKU dan target kinerja tersebut kemudian dimuat dalam dokumen Komitmen Kinerja Menko Marves dan Deputi. Dokumen tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah dashboard yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi Kemenko Marves yang dikenal dengan nama Peta Strategi Kemenko Marves.

Peta strategi tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) dan diselaraskan (*alignment*) ke seluruh unit eselon I sampai dengan level terendah di Kemenko Marves, serta dituangkan dalam dokumen kontrak kinerja. Dengan dilaksanakannya proses *cascading* dan *alignment*, pencapaian strategi Kemenko Marves diharapkan selaras dan didukung oleh seluruh unit dan pegawai pada setiap level. Secara umum, pengelolaan kinerja di lingkungan Kemenko Marves meliputi seluruh tahapan dalam eksekusi strategi Kemenko Marves yakni perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja, *review* dan penyempurnaan kontrak kinerja.

3.1. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Kemenko memiliki 14 Sasaran Strategis dengan 17 indikator kinerja utama (IKU). Target kinerja Kemenko Marves pada tahun 2021 yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Menko Marves terdiri dari 14 (empat belas) sasaran strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Target kinerja tersebut disusun dalam 4 (empat) perspective yaitu *stakeholders perspective* (bobot 15%), *customer*

perspective (bobot 25%), *internal business perspective* (bobot 40%), serta *learning and growth perspective* (bobot 20%).

Kinerja Kemenko Marves tahun 2021 merupakan kinerja tahun kedua pelaksanaan Renstra Kemenko Marves periode 2020-2024. Capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2021 tercapai 21,14%, hal ini karena capaian atas target masing-masing IKU hampir seluruhnya dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021), terdapat 5 IKU yang telah dicapai sampai dengan Triwulan III, yaitu:

1. *Stakeholder Perspective* terdiri dari 3 (tiga) SS yaitu:
 - a. Teguhnya Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat;
 - b. Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional;
 - c. Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur.

Pada Triwulan III untuk 3 SS pada *Stakeholder Perspective* capaian sebesar 29,3%, capaian ini didapat dari SS 3: Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur dengan IKU yaitu Indeks Daya Saing Global (IDSG) sebesar 87,69%, dari target tahun 2021 sebesar 65 dengan realisasi 57. Capaian yang disajikan merupakan hasil dari *Survei World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021* yang dilakukan oleh *Institute Management Development (IMD)* menempatkan daya saing Indonesia pada peringkat 37 dari total 64 negara yang didata. Hasil penilaian atas IKU ini akan dirilis oleh *World Economic Forum* pada akhir tahun 2021. Sedangkan 2 IKU lainnya capaian kinerja ditargetkan dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021).

2. *Customer Perspective* terdiri dari 5 (lima) SS yaitu:
 - a. Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional;
 - b. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis;
 - c. Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia;
 - d. Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam;
 - e. Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara

Untuk 5 SS di atas sampai dengan Triwulan III capaian atas perspektif ini sebesar 8,78%, target kinerja yang dapat disajikan pada perspektif yaitu IKU 11 (Indeks Kapabilitas Inovasi). Capaian atas IKU ini telah dirilis *World Intellectual Property*

Organization (WIPO), *Cornell University* dan *INSEAD* pada bulan September 2021. Target tahun 2021 atas IKU ini adalah 38,6, dengan realisasi tercapai 27,1 sehingga capaian nya sebesar 70,21%. Sedangkan capaian kinerja lainnya ditargetkan dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021).

3. *Internal Business Process* terdiri dari 2 (dua) SS yaitu:

- a. Tersedianya Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien;
- b. Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien.

Sampai dengan triwulan III, capaian atas *Internal Business Process perspective* dengan 2 SS ini belum dapat disajikan, karena target atas IKU nya akan dicapai pada akhir tahun 2021.

4. *Learning and Growth* dengan 4 (empat) SS, dengan rincian:

- a. Terwujudnya ASN Kemenko Marves yang Profesional;
- b. Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik
- c. Sistem Informasi Manajemen Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang Terintegrasi, belum ada target dan capaian kinerja;
- d. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang Terintegrasi;
- e. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel.

Pada Triwulan III target atau capaian kinerja yang diperoleh atas *Learning and Growth Perspective* adalah 72,81%, dari 4 SS sampai TW III telah dapat teralisasi 3 IKU, 1 IKU ditargetkan dicapai pada akhir tahun 2021 berdasarkan hasil penilaian dari BKN. Adapun realisasi yaitu sebagai berikut:

- IKU Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves yaitu dari target 80 realisasi 75,18 (93,98%). Namun demikian Kemenko Marves berhak mengajukan penyesuaian tunjangan kinerja menjadi sebesar 80%.
- IKU Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dari target 3,3 pada akhir tahun 2021 telah terealisasi 3,21 (berdasarkan penilaian sementara tim assesor KemenPANRB yang dilaksanakan pada bulan September), capaian atas IKU tersebut adalah 97,27%. KemenPANRB baru akan merilis hasil penilaian secara resmi pada akhir tahun 2021.
- IKU Opini BPK tercapai 100%, hal ini dibuktikan dengan realisasi WTP dari target yang dicanangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan LHP Nomor: 26b/LHP/XV/05/2021 tanggal 31 Mei 2021).

Adapun capaian kinerja utama Kemenko Marves sampai dengan triwulan III tahun 2021 yang diuraikan berdasarkan sasaran strategis (SS) adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian Kinerja Kemenko Marves s.d Triwulan III Tahun 2021

PERSPECTIVE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	TAHUN 2021	%		
 Stakeholder	Stakeholder						n/a	
	SS.1	Teguhnya Jatidiri Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri dan Berdaulat	1	Efektifitas Kepemimpinan Maritim	n/a	n/a	>=3	n/a
	SS.2	Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat Sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional	2	PDB Maritim	n/a	n/a	6,63	n/a
	SS3	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur	3	Indeks Daya Saing Global (IDSG)	n/a	n/a	65	n/a
 Customer	Customer						n/a	
	SS.4	Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional	4	Indeks Kedaulatan Maritim	n/a	n/a	3	n/a
	SS5	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis	5	Indeks Kinerja Logistik	n/a	n/a	3.1	n/a
			6	Indeks Disparitas Ekonomi	n/a	n/a	0	n/a
	SS.6	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia	7	Indeks Kesehatan Laut	n/a	n/a	57	n/a
			8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	n/a	n/a	67.33	n/a
	SS.7	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam	9	PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa	n/a	n/a	16.31	n/a
			10	Tingkat Komponen dalam Negeri	n/a	n/a	45	n/a
SS.8	Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara	11	Indeks Kapabilitas Inovasi	n/a	n/a	38,6	n/a	

		Internal Business Process						n/a
Internal Business Process	SS.9	Tersedianya Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	12	% Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan	n/a	n/a	100	n/a
	SS.10	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	13	% Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti	n/a	n/a	100	n/a
		Learning and Growth						23,50
Learning and Growth	SS.11	Terwujudnya ASN Kemenko Marves yang Profesional	14	Indeks Profesionalitas ASN	n/a	n/a	85	n/a
	SS.12	Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik	15	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	80	75,18	80	93,98
	SS.13	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang Terintegrasi	16	Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	n/a	n/a	3,3	n/a
	SS.14	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	17	Opini BPK	n/a	n/a	WTP	n/a
		Capaian s.d TW III tahun 2021						21,14

*) Keterangan: Capaian dihitung berdasarkan bobot sesuai IKU, SS dan Perspective

*) Digunakan nilai capaian maksimal 120%

Berdasarkan tabel di atas setelah dilakukan penghitungan sesuai bobot, maka nilai capaian kinerja total dan untuk masing-masing perspektif pada setiap triwulan tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 12. Nilai Capaian Kinerja per Perspective Tahun 2021

Perspektif	Bobot (%)	Triwulan			
		I	II	III	IV
Stakeholder	15	-	-	29,23	-
Customer	25	-	-	8,78	-
Internal Business Process	40	-	-	0	-
Learning and Growth	20	-	23,50	72,81	-
		-	4,7	21,14	-

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Kemenko Marves TA. 2021 memperoleh alokasi Pagu Anggaran Definitif sebesar Rp. 314.596.417.000 (Tiga Ratus Empat Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah), namun dengan adanya kebijakan refocusing pertama dari DJA Kementerian Keuangan, Kemenko Marves melakukan revisi dengan jumlah DIPA sebesar Rp. 294.561.417.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).

Tahun 2021 masih dihadapi dengan kondisi pandemic Covid 19, sehingga anggaran belanja seluruh K/L mengalami perubahan/*refocusing*, sebagian anggaran tahun 2021 dialokasikan tetap untuk penanganan Covid-19. Demikian pula dengan Kemenko Marves, atas arahan Presiden telah melakukan beberapa kali perubahan anggaran. Sampai dengan TW III Kemenko Marves telah melakukan *refocusing* sebanyak 4 kali.

Jumlah Pagu Anggaran Kemenko Marves setelah dilakukan 4 kali *refocusing*, dari pagu awal sebesar Rp 314.596.417.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) menjadi Rp 264.977.466.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), adanya pengurangan sebesar Rp 49.618.951.000,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah). Adapun anggaran per unit kerja eselon I setelah dilakukan *refocusing* sampai dengan Triwulan III sebagai berikut:

Tabel 13. Pagu Anggaran Unit Kerja Eselon I setelah Refocusing Tahap 4

No	Unit Kerja	Pagu (Rp.)
1	Sekretariat Kementerian Koordinator	160.474.711.000
2	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	42.250.666.000
3	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	11.600.000.000
4	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	11.749.999.000
5	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	11.375.000.000
6	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11.500.000.000
7	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	16.027.090.000
Total Anggaran		264.977.466.000

Grafik 6 Diagram Realisasi Anggaran



3.2.1. Realisasi per Jenis Belanja

Dari total pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 264.977.466.000, secara garis besar terdiri dari 4 jenis belanja, namun Kemenko Marves hanya melaksanakan 3 jenis belanja, yaitu: belanja pegawai dengan pagu Rp. 55.028.210.000,- dengan realisasi Rp. 47.148.636.523,- (85,68%); belanja barang dengan pagu anggaran Rp. 205.609.387.000,- dengan realisasi Rp. 116.421.709.035,- (56,62%) dan belanja modal Rp. 4.339.869.000,- dengan realisasi Rp. 3.263.128.800,- (75,19%). Sampai dengan triwulan III realisasi anggaran belanja pada Kemenko Marves mencapai 62,96% (Rp. 166.833.474.358,-). Secara detail pagu anggaran dan realisasi belanja terlihat pada tabel berikut ini:

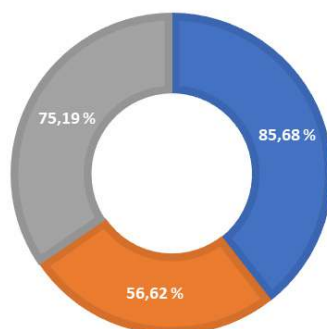
Tabel 14. Realisasi Belanja s.d Triwulan III Tahun 2021

Belanja	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Pegawai	55.028.210.000	47.148.636.523	85,68	7.879.573.477
Barang	205.609.387.000	116.421.709.035	56,62	89.187.677.965
Modal	4.339.869.000	3.263.128.800	75,19	1.076.740.200
Total	264.977.466.000	166.833.474.358	62,96	98.143.991.642

Sumber: SAS, Sept 2021

Grafik 7 Diagram Persentase Pencairan Belanja s.d TW III Tahun 2021

■ Belanja Pegawai ■ Belanja Barang ■ Belanja Modal



Dari tabel dan diagram tersebut terlihat bahwa realisasi belanja tertinggi dari belanja pegawai mencapai 85,68% atau Rp. 47.148.636.523,- sedangkan belanja terendah adalah belanja barang dengan realisasi 56,62 % atau Rp. 89.187.677.965,-.

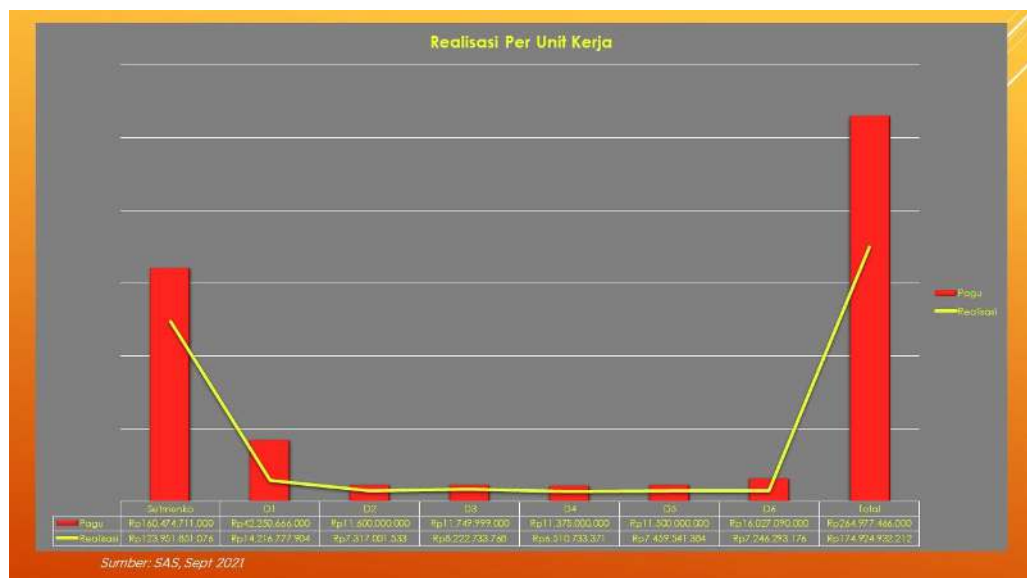
3.2.2. Realisasi per Unit Kerja

Dalam mendukung terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan dan ditargetkan, setiap unit kerja memiliki target kinerja triwulan dan tahunan pada 2021. Pada triwulan III TA. 2021, realisasi belanja anggaran unit kerja eselon I terbesar yaitu Sekretariat Kemenko dari pagu Rp. 160.474.711.000,- realisasi Rp. 123.951.851.076,- (77,24%), sedangkan realisasi terkecil adalah Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (D1) dari pagu sebesar Rp. 42.250.666.000,- baru teralisasi Rp. 14.216.777.904,- (33,65%), realisasi anggaran tiap unit kerja pada Kemenko Marves disajikan pagu anggaran dan realisasi pada grafik berikut ini:

Realisasi Per Unit Kerja Juli s.d September (Triwulan III)

Unit kerja	Juli			Agustus			September		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Sekretariat Kementerian Koordinator	163.751.428.000	100.391.107.652	61,31%	160.474.711.000	112.461.489.521	70,08%	160.474.711.000	123.951.851.076	77,24%
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	44.950.666.000	12.129.429.574	26,98%	42.250.666.000	12.649.696.086	29,94%	42.250.666.000	14.216.777.904	33,65%
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	14.500.000.000	6.415.133.128	44,86%	11.600.000.000	6.780.503.947	58,45%	11.600.000.000	7.517.001.533	63,08%
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	14.449.999.000	6.484.094.998	44,87%	11.749.999.000	7.183.221.297	61,13%	11.749.999.000	8.222.733.768	69,98%
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	14.075.000.000	5.416.049.517	38,48%	11.375.000.000	5.844.167.116	51,38%	11.375.000.000	6.510.733.371	57,24%
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	14.200.000.000	6.138.596.939	43,23%	11.500.000.000	6.394.520.923	55,60%	11.500.000.000	7.459.541.384	64,87%
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	18.725.000.000	6.031.764.604	32,21%	16.027.090.000	6.604.221.751	41,21%	16.027.090.000	7.746.793.176	48,21%
Total	284.452.093.000	143.006.196.392	50,27%	264.977.466.000	157.917.620.611	59,60%	264.977.466.000	174.924.932.212	66,02%

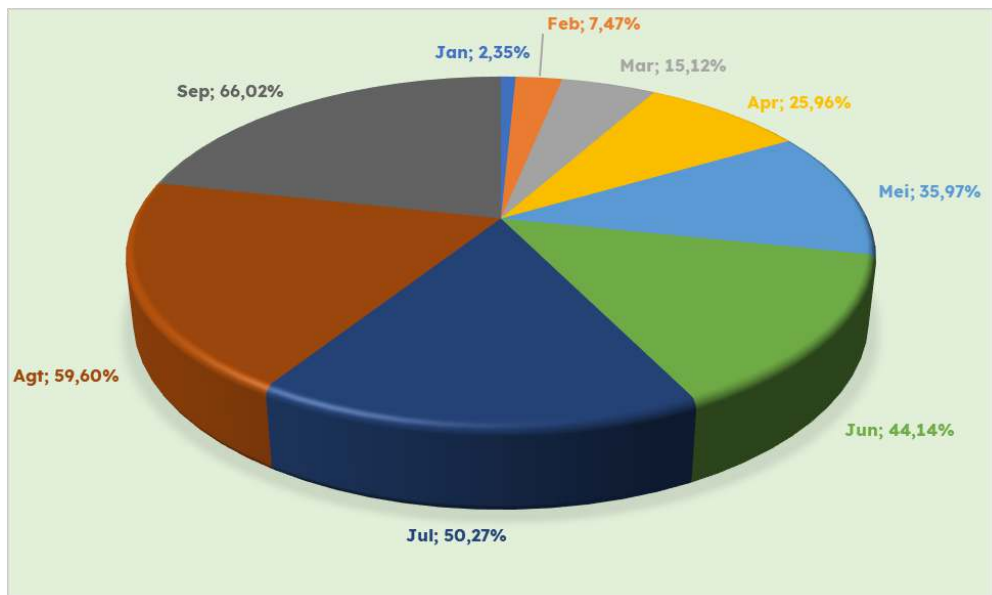
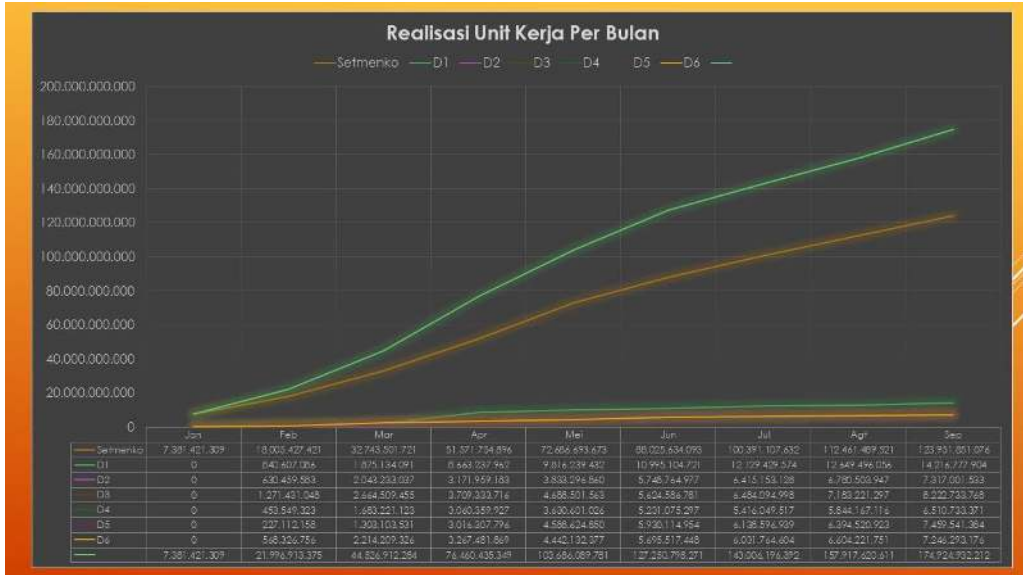
Sumber: SAS, Sept 2021



Grafik 8 Realisasi Belanja Per Unit Eselon I s.d TW III Tahun 2021

3.2.3. Realisasi per Bulan

Realisasi anggaran perbulan sampai dengan triwulan III tahun 2021 tidak merata namun realisasi setiap bulannya mengalami peningkatan, kendati masih dihadapi dengan kondisi Pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi realisasi belanja setiap bulannya. Lonjakan terjadi pada bulan September, setiap unit kerja Eselon I mengalami peningkatan realisasi belanja dibanding bulan sebelumnya seperti terlihat pada grafik berikut:



Sumber: SAS, Sept 2021

Grafik 9 Realisasi Anggaran per Bulan Kemenko Marves TA. 2021

3.3. Analisa Kinerja

Penjelasan capaian IKU untuk setiap SS diuraikan sebagai berikut:



Sasaran yang ingin dicapai dari SS.1. adalah kondisi Bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang mampu berdiri di atas landasan alam dan budaya maritim yang mandiri dan memiliki kedaulatan penuh. Sasaran Strategis ini menggunakan indikator kinerja utama (IKU) Efektivitas Kepemimpinan Maritim. IKU ini merupakan hasil dari penegakan kedaulatan maritim dan penguatan diplomasi Indonesia di bidang kemaritiman.

Penegakan kedaulatan maritim diwujudkan dengan adanya kepastian hukum wilayah Indonesia, terjaganya kepentingan Indonesia, terwujudnya keamanan, ketahanan, dan keselamatan maritim Indonesia. Selanjutnya penguatan diplomasi Indonesia di dunia Internasional diwujudkan dengan partisipasi aktif Indonesia dalam forum maritim regional dan global, penempatan wakil Indonesia di Organisasi Internasional bidang kemaritiman dan diterimanya inisiatif dan posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional.

Pada Triwulan III tahun 2021, capaian Kemenko Marves terkait Indeks Kepemimpinan Maritim Indonesia dapat dideskripsikan dalam capaian atas Tingkat Kedaulatan Maritim dan Efektivitas Diplomasi

a. Tingkat Kedaulatan Maritim

Capaian Tingkat Kedaulatan Maritim diperoleh berdasarkan capaian Tingkat Kepastian Kewilayahan (TKW), Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim (TKKM), dan Tingkat Keselamatan Maritim (TKM).

1. Tingkat Kepastian Kewilayahan (TKW) yaitu terwujudnya kepastian hukum kewilayahan Indonesia dan terjaganya kepentingan nasional di luar yurisdiksi Indonesia. TKK ini dibentuk oleh 2 (dua) komponen yaitu: a) Persentase Zona maritim dan regulasi yang telah ditetapkan; b) Persentase posisi kepentingan Indonesia yang terakomodir di dalam regulasi perairan dan dasar laut internasional
2. Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim (TKKM) terbentuk dari persentase indikator yang mendukung antara lain peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran kedaulatan maritim, peningkatan sumber daya kelautan dan perikanan dan peningkatan antusias pada pekerjaan di sektor maritim.
3. Tingkat Keselamatan Maritim (TKM) terbentuk oleh tiga nilai indikator keselamatan maritim, yaitu: keandalan sarana bantu navigasi pelayaran, keselamatan aktivitas pelayaran, dan penanganan kecelakaan maritim.

Tingkat Kedaulatan Maritim dihitung dengan menggunakan formula:



$$TKM = 30\%TKW + 35\%TKKM + 35\%TKM$$
01

Selanjutnya, dilakukan konversi untuk nilai Tingkat Kedaulatan Maritim sebagai berikut:

Tabel 15. Konversi nilai Tingkat Kedaulatan Maritim

Persentase	Nilai	Keterangan
$0 < x \leq 25$	1	Kurang Berdaulat
$25 < x \leq 50$	2	Cukup Berdaulat
$50 < x \leq 75$	3	Berdaulat
$x > 75$	4	Sangat Berdaulat

b. Nilai Efektivitas Diplomasi Maritim

Efektivitas Diplomasi Maritim diukur dengan tingkat partisipasi aktif Indonesia dalam forum maritim regional dan global, penempatan wakil Indonesia di organisasi internasional bidang kemaritiman, dan diterimanya inisiatif dan posisi Indonesia dalam Perjanjian Internasional. Selanjutnya, dilakukan konversi sehingga diperoleh nilai Indeks Kepemimpinan Maritim Indonesia.

Tabel 16. Konversi nilai Indeks Kepemimpinan Maritim

Persentase	Nilai	Keterangan
$0 < x \leq 25$	1	Kurang Efektif
$25 < x \leq 50$	2	Cukup Efektif
$50 < x \leq 75$	3	Efektif
$x > 75$	4	Sangat Efektif

Tabel 17. Capaian Kinerja SS.1 TW III

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW III	Capaian
1	Efektifitas Kepemimpinan Maritim	7.14	n/a	n/a	n/a
Capaian Indikator SS.1					n/a

Sampai dengan Triwulan III tahun 2021 capaian terhadap IKU 1 belum ada capaian (n/a), hal ini karena target atas IKU akan dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021). Pada Triwulan III tahun 2020 realisasi atas IKU dimaksud belum ada capaian, sedangkan target akhir tahun 2021 dengan nilai ≥ 3 , untuk dilakukan perbandingan seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 18. Perbandingan Capaian dan Target Indikator 1

No	IKU		Realisasi TW III 2020	Realisasi TW III 2021	Target Tahun 2021	Target Akhir Renstra
1	Efektifitas Kepemimpinan Maritim	Nilai	n/a	n/a	≥ 3	≥ 3

Tercapainya target efektivitas kepemimpinan maritim pada tahun 2020 harus dapat dipertahankan pada tahun 2021, karena hal ini menunjukkan keberhasilan Kemenko Marves dalam mendorong tercapainya kondisi Indonesia menjadi sebuah bangsa yang mampu berdiri di atas landasan alam dan budaya maritim dengan mandiri dan memiliki kedaulatan penuh. Ini artinya, negara mampu menguasai dan mengatur sumber daya maritim yang dimilikinya, mampu mengendalikan campur tangan asing dan memanfaatkannya untuk kemakmuran bangsa dan negara.

Beberapa kegiatan atau isu yang ditangani selama Triwulan III guna mendukung pencapaian efektivitas kepemimpinan maritim telah berpartisipasi dalam berbagai forum internasional terkait kemaritiman diantaranya sebagai berikut:

- Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Bidang Kemaritiman RI-Belanda
- Pembahasan *Concept Paper Regional Convention on The Protection of The Marine Environmental and The Coastal Region In The Arafura And Timor Sea*
- Pembahasan *Blue Strategic Document* sebagai rujukan penerbitan Blue Bond 2022
- Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Bidang Kemaritiman RI-Jerman
- FGD Pembahasan dan Penyusunan *Gap Analysis Maritime Labour Convention (MLC) 2006*
- Persiapan penyelenggaraan pertemuan *Archipelagic and Island States (AIS) Forum*

SS.2 merupakan tolak ukur tingkat pertumbuhan perekonomian maritim untuk mewujudkan pengelolaan semua aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, serta lahan di atas daratan yang menggunakan bahan baku dari wilayah pesisir dan lautan sebagai penggerak perekonomian nasional. Perwujudan dari SS ini, diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama PDB Maritim. Data resmi PDB maritim diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan penghitungan dan hasil survei yang dilakukan.



Pengertian dari PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Sementara ekonomi kemaritiman dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang secara langsung dan/atau tidak langsung terjadi di kawasan perairan (yang meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedamanan zona ekonomi eksklusif Indonesia, serta perairan lainnya termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil), dan kegiatan di luar kawasan perairan yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang berasal dari perairan, serta kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk dimanfaatkan di perairan. Sehingga PDB Maritim adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit produksi yang tercakup dalam ekonomi maritim.

Tahun 2021 dinamika yang masih dihadapi yaitu Pandemi Covid-19, maka pada tahun 2021 BPS diharapkan dapat melakukan penghitungan terhadap indikator kinerja utama ini. Namun demikian, tugas dan fungsi Kemenko Marves dalam mendorong tercapainya target PDB maritim tetap terus dilakukan melalui berbagai kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembangunan di bidang kemaritiman dan investasi harapannya dapat mencapai angka ideal yang diharapkan. Sehingga, untuk mengetahui kontribusi PDB maritim Tahun 2021, digunakan data riil kontribusi PDB maritim tahun 2021.

Tahun 2021 target dari PDB maritim sebesar 6,63 yang didasarkan terhadap pendekatan penghitungan yang dilakukan oleh BPS yakni dengan menentukan definisi dan sektor-sektor (klaster) yang masuk dalam ekonomi maritim yaitu: 1) Perikanan; 2) Energi dan sumber daya mineral; 3) Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; 4) Sumber daya non konvensional; 5) Industri bioteknologi; 6) Industri kemaritiman; 7) Jasa kemaritiman; 8) Pariwisata; 9) Perhubungan; 10) Bangunan laut; 11) Pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut. Dari klaster tersebut, maka dipetakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dipresentasikan sebagai aktivitas ekonomi pada masing-masing sektor yang masuk dalam penghitungan. Konsep dan definisi ekonomi maritim masih berdasar KBLI 2015 karena KBLI 2020 baru saja dikeluarkan BPS. Penghitungan estimasi Kontribusi PDB Maritim Tahun 2019 oleh LIPI juga menggunakan pendekatan yang sama namun dengan cakupan KBLI yang berbeda.

Hasil penghitungan capaian kinerja IKU sampai dengan triwulan II tahun 2021 belum ada capaian (n/a), hal ini karena capaian IKU tersebut ditargetkan tercapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021), sebagaimana terlihat pada Tabel 15.

Tabel 19. Capaian Kinerja SS.2 TW III

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW II	Capaian
2	PDB Maritim	5,19	n/a	n/a	n/a
Capaian Kinerja SS 2					n/a

Target capaian IKU PDB Maritim sampai akhir tahun 2021 terlihat di bawah ini:

Tabel 20. Perbandingan Capaian dan Target Indikator 2

No	IKU		Realisasi TW II 2020	Realisasi TW II 2021	Target Tahun 2021	Target Tahun 2024
2	PDB Maritim	%	n/a	n/a	6,63	7,80

Sampai dengan Triwulan III upaya yang dilakukan untuk mencapai terhadap target IKU ini, Kemenko Marves telah melakukan koordinasi dengan K/L teknis. Target tahun 2021 ini akan dihitung pada akhir tahun sehingga akan dilaporkan dalam laporan kinerja (capaian) 2021 di tahun 2022.

Berdasarkan kesepakatan dengan BPS terkait PDM Maritim pada tahun 2021 masih pada tahap scooping, sedangkan untuk perhitungan rincinya akan dimulai pada tahun 2022. Hal ini berdasarkan pertimbangan BPS merasa kurang resources, waktu yang terlalu mepet, dan BPS mengharapkan Marves melakukan scooping dengan K/L terkait atau wali datanya.

SS3. bertujuan untuk mewujudkan suatu kondisi negara dengan jatidiri yang kuat sehingga tangguh dalam menghadapi persaingan dunia yang semakin mengglobal. Jati diri ini ditunjukkan dengan daya saing yang dimiliki sebagai salah satu sumber dari ketahanan negara dalam menghadapi tantangan dalam membangun peradaban bangsa. Peradaban dibangun melalui kekuatan ekonomi, politik, dan budaya yang unggul.



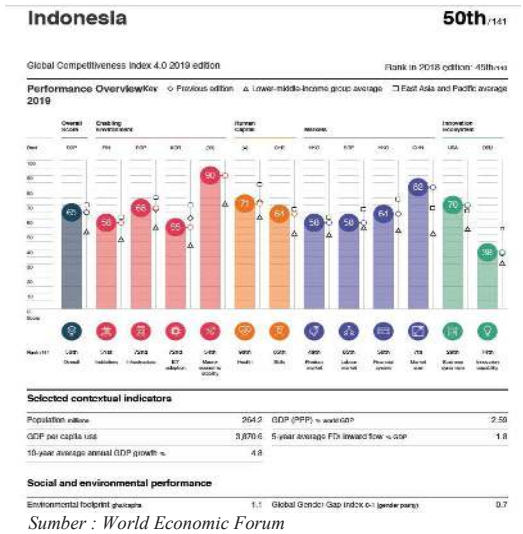
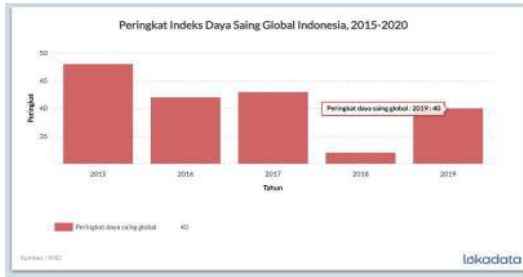
Capaian SS ini diukur dengan IKU Nilai Indeks Daya Saing Global (IDSG) yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* (WEF). IDGS yang menggambarkan kemampuan negara untuk menyediakan kemakmuran tingkat tinggi bagi warga negaranya. Hal ini tergantung dari seberapa produktif sebuah negara menggunakan sumber daya yang tersedia. Menurut *Institute for Management Development* (IMD), daya saing adalah bagaimana suatu bangsa/negara menciptakan dan memelihara suatu lingkungan yang yang dapat mempertahankan daya saing perusahaan-perusahaannya. IMD fokus pada kinerja ekonomi (*Economic Performance*); efisiensi Pemerintah (*Government Efficiency*); efisiensi Bisnis (*Business Efficiency*); dan infrastruktur (*Infrastructure*). Nilai indeks ini dikeluarkan oleh *World Bank* dan terdiri dari dua belas pilar daya saing yaitu:



Gambar 5. Dua Belas Pilar Daya Saing

Dari 12 aspek itu Indonesia menghadapi masalah dalam 5 hal karena mengalami penurunan, yaitu adopsi ICT, kesehatan, keterampilan, pasar tenaga kerja, dan produk. Indonesia menghadapi masalah daya saing. Produk impor membanjiri pasar domestik. Sementara kapasitas inovasi nasional masih rendah. PR besar yang harus dijawab agar indeks daya saing global Indonesia naik. 12 pilar *Global Competitiveness Index 4.0 framework* yang menjadi indikator penilaian indeks daya saing setiap negara, Kemenko Marves mendorong capaian melalui pilar ke-2 yang kemudian dibagi menjadi 2 sub indikator penilaian yaitu *transport infrastructure* dan *utility infrastructure*.

Capaian atas indeks daya saing global Indonesia pada 2019 sebagaimana dirilis oleh *World Economic Forum (WEF)* pada kuartal tiga (bulan September setiap tahunnya), Indonesia menempati peringkat ke-50 dari 141 negara pada 2019. Singapura, Amerika Serikat, Hong Kong, Belanda, dan Swiss menempati lima besar teratas peringkat negara paling kompetitif.



The Global Competitiveness Index 4.0 2019 Rankings

Covering 141 economies, the Global Competitiveness Index 4.0 measures national competitiveness – defined as the set of institutions, policies and factors that determine the level of productivity.

Oct-Nov 2019			Oct-Nov 2019			Oct-Nov 2019		
Rank	Economy	Score	Rank	Economy	Score	Rank	Economy	Score
1	Singapore	84.8	41	Mexico	64.9	101	Chad	54.1
2	United States	82.7	42	Bulgaria	64.9	102	Paraguay	54.0
3	Hong Kong SAR	81.1	43	Indonesia	64.8	103	Peru	53.6
4	Netherlands	80.4	44	Romania	64.4	104	Guatemala	53.5
5	Switzerland	80.3	45	Morocco	64.3	105	San Marino	53.0
6	Japan	80.3	46	Oman	63.8	106	Turkey	52.9
7	Germany	81.8	47	Uruguay	63.5	107	Honduras	52.7
8	Denmark	81.2	48	Kazakhstan	63.9	108	Mexico	52.6
9	United Kingdom	81.2	49	Ireland	63.8	109	Chile	52.6
10	Denmark	81.2	50	Colombia	63.7	110	Ukraine	52.4
11	Ireland	80.2	51	Azerbaijan	63.7	111	Bangladesh	52.1
12	Spain	80.2	52	China	63.6	112	Myanmar	52.0
13	Switzerland	81.2	53	South Africa	63.4	113	Costa Rica	51.8
14	China	79.8	54	Finland	63.1	114	Nepal	51.6
15	France	79.8	55	Czechia	63.0	115	Nicaragua	51.5
16	Australia	79.7	56	Denmark	62.9	116	Poland	51.4
17	China	79.1	57	Philippines	62.9	117	Chile	51.2
18	Luxembourg	77.9	58	Peru	62.7	118	Costa Rica	51.2
19	New Zealand	75.7	59	Paraguay	62.6	119	Laos PDR	51.1
20	Spain	75.7	60	Viet Nam	62.5	120	Burkina Faso	50.7
21	Canada	75.6	61	India	62.4	121	Chad	50.6
22	Japan	75.6	62	Armenia	62.3	122	Nigeria	49.3
23	Spain	75.3	63	Jordan	62.3	123	Tanzania	49.2
24	Ireland	75.1	64	Israel	62.3	124	Chad	49.1
25	United Arab Emirates	74.9	65	Senegal	62.0	125	Guinea	47.6
26	Denmark	74.7	66	Maldives	61.8	126	Zambia	46.5
27	Malaysia	74.6	67	Georgia	61.6	127	Tanzania	46.4
28	China	73.9	68	Morocco	61.5	128	Dominican Republic	46.1
29	Spain	73.9	69	Belgium	61.5	129	Guatemala	45.9
30	Italy	73.8	70	Indonesia	61.5	130	Denmark	45.9
31	Spain	73.9	71	Dominican Republic	61.3	131	Brazil	45.8
32	Green Republic	73.9	72	Turkey and Tajikistan	61.3	132	Uruguay	45.4
33	China	73.8	73	Canada	61.3	133	Chad	45.2
34	Zimbabwe	73.4	74	Albania	61.2	134	Mali	45.1
35	Spain	73.3	75	North Macedonia	61.2	135	Malawi	45.0
36	Saudi Arabia	73.0	76	Argentina	61.2	136	Dominican Republic	45.0
37	Spain	69.9	77	Botswana	61.1	137	Tanzania	45.0
38	Spain	69.5	78	Uruguay	61.1	138	Madagascar	45.0
39	Lithuania	69.4	79	Maldives	61.0	139	Venezuela	44.8
40	Ireland	69.3	80	Turkey	61.0	140	Mauritius	45.0
41	Spain	67.0	81	Guatemala	60.9	141	Tanzania	45.0
42	Switzerland	66.9	82	Algeria	60.9	142	Paraguay	45.0
43	Russian Federation	66.7	83	Ecuador	60.7	143	Mauritius	45.1
44	Spain	66.4	84	Bolivia	60.5	144	India	45.0
45	Spain	66.4	85	Bolivia and Mongolia	60.5	145	Chad	45.0
46	Spain	66.1	86	Spain	60.4	146	Nepal	45.0
47	Spain	66.1	87	Norway	60.4	147	Chad	45.1
48	Spain	66.1	88	Norway	60.4	148	Chad	45.1

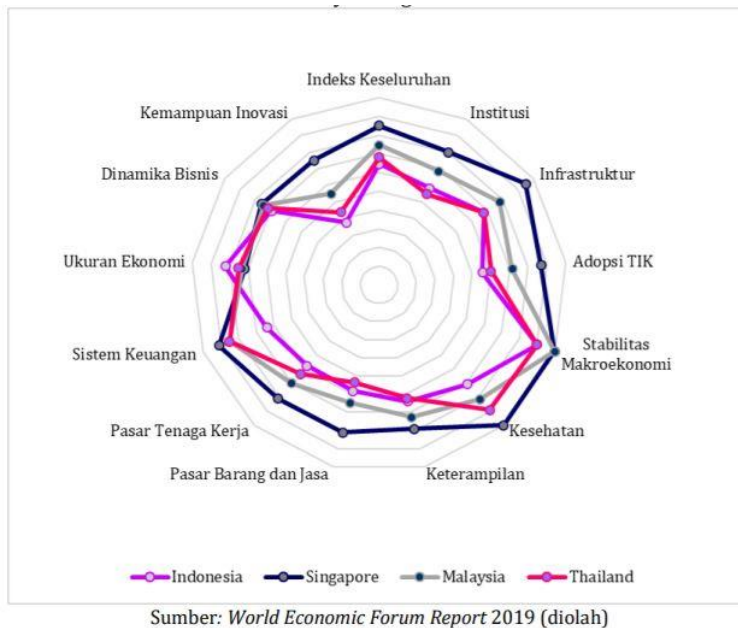
Note: The Global Competitiveness Index 4.0 captures the determinants of long-term growth. Recent developments are reflected only insofar as they have an impact on data resulting from these determinants. Values should be interpreted in the context of 1 = highest score or rank is unchanged from the previous year, 100 = indicates the country was not covered by the index the previous year.

1. Scale ranges from 0 to 100.

2. Rank and score differences with 2018 index. For details refer to Appendix A.

Gambar 6. Capaian Indeks Daya Saing Global

Peringkat Indonesia menempati urutan ke-4 di ASEAN setelah Singapura (1), Malaysia (27) dan Thailand (40), dan jika dibandingkan dengan Singapura yang menempati posisi pertama dalam daya saing global, Indonesia masih tertinggal di hampir seluruh komponen daya saing, kecuali komponen stabilitas makroekonomi dan ukuran ekonomi.



Gambar 7. Indeks Daya Saing Global Indonesia tahun 2019

Penurunan nilai dari indeks daya saing global Indonesia cukup tipis, hanya sebesar 0,3 poin yaitu dari 64,9 poin menjadi 64,6 poin. Menurut laporan WEF, tidak ada perubahan kinerja yang signifikan pada indeks daya saing global Indonesia pada tahun 2019. Namun, ada beberapa pilar yang menyebabkan penurunan pada skor Indonesia, diantaranya adalah adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebesar 5,77 poin yaitu dari 61,1, menjadi 55,4. Pilar selanjutnya adalah kesehatan, turun sebesar 0,9 poin.

Untuk tahun 2021, laporan IDSG terbaru sampai dengan triwulan III belum dirilis oleh *World Economic Forum*, meninjau dari laporan IDSG tahun 2020 perihal ranking daya saing juga tertunda diakibatkan adanya *pandemic covid*, sehingga lebih terfokus kepada kebangkitan dan pemulihan ekonomi. Namun apabila dilihat dari sumber lain yaitu *Survei World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021* yang dilakukan oleh *Institute Management Development (IMD)* menempatkan daya saing Indonesia pada peringkat 37 dari total 64 negara yang didata. Peringkat Indonesia di 2021 sedikit mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil survey secara total peringkat Indonesia mengalami peningkatan, pada peringkat di negara Asia Pasifik, Indonesia tetap berada pada posisi 11 dari 14 negara, di atas India dan Filipina.

Hasil penilaian peringkat tersebut didasarkan pada analisis data-data kinerja perekonomian Indonesia sampai dengan tahun 2020 serta penilaian para pelaku usaha terkait persepsi kondisi lingkungan bisnis yang dihadapi. Penilaian daya saing didasarkan dari penilaian 4 (empat) komponen utama meliputi, Kinerja Perekonomian, Efisiensi Pemerintahan, Efisiensi Bisnis, dan Infrastruktur. Dari hasil survei, peningkatan peringkat Indonesia terlihat pada komponen efisiensi bisnis dan pemerintahan. Peringkat efisiensi pemerintahan mengalami kenaikan dari posisi 31 di tahun 2020 menjadi 26 di tahun 2021. Kenaikan peringkat pada komponen ini didukung oleh faktor kebijakan keuangan publik cukup efektif merespon kondisi pandemi.

Pada aspek lainnya, Indonesia mengalami penurunan peringkat pada dua komponen utama, yakni kinerja perekonomian dan infrastruktur. Peringkat kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2021 berada pada posisi 35, menurun dibandingkan tahun 2020 di posisi 26. Penurunan peringkat tersebut didorong oleh kondisi ketenagakerjaan, perdagangan internasional, dan tingkat harga domestik. Peringkat infrastruktur Indonesia juga beranjak dari posisi 55 di tahun 2020 menjadi posisi 57 di tahun 2021. Hal tersebut disebabkan oleh faktor kesiapan infrastruktur kesehatan dan pendidikan dalam menghadapi pandemi.



Sumber: Perkiraan hasil Survei World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021, Institute Management Development (IMD) 2021 (diolah)

Grafik 10. Survey Penilaian IDSG Indonesia Tahun 2021

Berdasarkan diagram di atas sesuai dengan tugas Kemenko Marves untuk mendorong capaian dari IDSG melalui pilar ke-2 yaitu aspek infrastruktur, sampai dengan triwulan III tahun 2021 kami menampilkan data sementara berdasarkan hasil survey. Karena target dari IKU ini akan dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021), kami akan menyampaikan hasil penilaian dari WEF pada laporan kinerja tahun 2021.

Dari hasil survey tersebut sektor infrastruktur memperoleh nilai 57, sehingga capaian atas IKU ini sebesar 87,69% dari yang ditargetkan dicapai tahun 2021 sebesar 65, harapannya sampai dengan akhir tahun 2021 IKU ini bisa tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Capaian tersebut seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Capaian Kinerja SS.3 TW III

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW III	Capaian
3	Indeks Daya Saing Global (IDSG)	5,19	65	57*)	87,69
Capaian Kinerja SS 3					87,69

*) Peringkat infrastruktur Perkiraan hasil Survei (total 64 negara yang didata)

Sumber: Perkiraan hasil Survei World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021, Institute Management Development (IMD) 2021. (<https://ekonomi.bisnis.com>)

Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan kemampuan inovasi dalam mengejar ketertinggalan dari negara maju, bahkan Indonesia masuk ke dalam salah satu jajaran inovator teratas di antara negara-negara berkembang pada tahun 2017-2018. Namun untuk kesiapan dalam peningkatan teknologi, Indonesia masih tertinggal jauh di belakang. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi di Indonesia masih belum menyebar secara merata dalam masyarakat. Selain itu jika dilihat dari grafik indeks daya saing global selama 5 tahun terakhir, Indonesia juga perlu untuk mendorong pilar pasar tenaga kerja, misalnya dalam hal penentuan upah yang masih kurang fleksibel dan keterwakilan perempuan dalam angkatan kerja yang masih terbatas.

Dalam penilaian indeks daya saing global, tugas dari Kemenko Marves seperti yang telah disinggung di atas yaitu mendukung dari sektor infrastruktur, berdasarkan hasil penilaian sampai dengan tahun 2019 Indonesia memiliki peluang untuk dapat bersaing dengan negara-negara peers (negara dengan grade setara atau double B) yaitu ASEAN-5 ditambah Vietnam dan negara-negara BRIC (Brazil, Russia, India and China) yaitu dari pilar-pilar dimana Indonesia memiliki skor yang sangat baik dan baik, yaitu dengan pencapaian di atas 80, 2 (dua) pilar yang masuk dalam kategori ini, yaitu ukuran ekonomi dan stabilitas makroekonomi. Sedangkan yang memiliki skor yang baik, dengan pencapaian skor antara 61-79. Terdapat 5 pilar yang masuk dalam kategori ini, yaitu infrastruktur, kesehatan, keterampilan, sistem keuangan, dan dinamika bisnis. Khusus pilar infrastruktur, posisi Indonesia memiliki skor yang sama dengan Thailand dan India, serta lebih tinggi dibandingkan dengan Filipina, Vietnam, dan Brazil, namun masih lebih rendah dari Rusia, Malaysia, China, dan Singapura.

Country	Infrastruktur					Kesehatan				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
ASEAN										
Indonesia	60	60	64	67	68	80	79	77	72	71
Malaysia	79	77	79	78	78	90	87	90	83	81
Philippines	49	49	49	59	58	79	80	80	68	66
Singapore	93	93	93	96	95	96	96	97	100	100
Thailand	66	63	67	70	68	83	79	79	87	89
Vietnam	54	56	56	65	66	84	83	83	81	81
BRIC Country										
Brazil	56	57	59	64	65	73	76	77	80	79
Russia	69	70	70	72	74	84	84	86	68	69
India	53	57	60	69	68	79	79	79	69	61
China	67	67	67	78	78	87	89	89	87	88

*Rentang penilaian 2015-2017 dikonversi menjadi rentang nilai 0-100 dengan formula dan latar belakang yang sama dengan Gambar 3

Sumber: *World Economic Forum Report 2015-2019* (diolah)

Dengan melihat peluang tersebut pada pilar infrastruktur khususnya, maka sesuai dengan misi RPJMN 2020-2024 yaitu “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya infrastruktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”, Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar ditujukan untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pelayanan dasar yang akan dibangun mencakup hunian layak, peningkatan akses ketenagalistrikan, layanan telekomunikasi untuk fasilitas umum, pengembangan sistem keselamatan lalu lintas, layanan transportasi perintis serta pembangunan waduk multi-purpose. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada pembangunan sarana-prasarana transportasi, ketenagalistrikan dan energi, dan teknologi informatika untuk mendukung pengembangan Big Data, *Internet of Things* (IoT) maupun *Artificial Intelligence* (AI) yang nantinya akan berdampak guna meningkatkan IDSG.

Guna mendukung atas capaian IKU IDSG, Kemenko Marves terus berupaya melakukan koordinasi dengan K/L lainnya, diantaranya sebagai berikut:

- Koordinasi dengan *stakeholder*, dengan melakukan kunjungan kerja maupun studi di lapangan sehingga data yang didapat maupun diolah lebih valid.
- Menyediakan Infrastruktur konektivitas secara memadai, berdaya saing global, dan mempercepat pembangunan bidang transportasi;
- Meningkatkan kembali koordinasi dan sinkronisasi yang terfokus pada penyederhanakan regulasi dalam rangka meningkatkan daya Tarik investasi di Indonesia. Dalam masa peralihan dari masa pandemic Covid-19 dan kondisi Indonesia yang belum ramah investasi disebabkan regulasi dan birokrasi pemerintah yang terlalu rumit.
- Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terhadap proyek-proyek strategis pemerintah dan juga proyek prioritas sebagai upaya dalam mendukung peningkatan indeks daya saing infrastruktur;

- Upaya percepatan-percepatan dan mengawal proyek strategis Nasional dan juga proyek-proyek yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 agar tarus berjalan sesuai rencana dan target pembangunan; salah satu kegiatan yang telah dilakukan dan menjadi prioritas adalah meneruskannya pembangunan jalan trans pada 18 pulau tertinggal, terluar dan terdepan adalah merupakan *Major Project* RPJMN 2020-2024 (nomor 30). Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah dilaksanakan melalui pembangunan jalan pada jalan lintas utama pulau, jalan yang mendukung kawasan industri dan pariwisata prioritas, jalan akses ke simpul transportasi prioritas, jalan lingkaran/trans pulau terluar dan jalan akses mendukung wilayah 3T dan kawasan perbatasan.
- Ada beberapa proyek yang progressnya cukup signifikan kenaikannya seperti wilayah Enggano dan tol trans Sumatera serta Tol Bengkulu-Lubuk Linggau.
- Perihal proyek PSN, adanya perpanjangan Nota Kesepahaman Bersama (NKB) antara TNI AU dan Kab. Bengkulu Selatan akan diperpanjang (masa akhir bulan Oktober 2021).
- Pemkab Mengharapkan Hibah Seluas 1.200 Ha Untuk Lahan Lumbung Ketahanan Pangan, Lahan Penelitian Dan Terminal. TNI AL Berkenan menghibahkan sebagian Lahan Kepada Pemkab Kaur. (Pecahan dari Kabupaten Bengkulu Selatan) telah dilaksanakan pemasangan 132 pal batas. belum ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Naskah Hibah.

Beberapa hambatan dan tantangan dalam pencapaian iku ini antara lain sebagai berikut:

- Pandemi Covid-19 yang terus berkepanjangan sampai dengan triwulan III tahun 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan hanya dilakukan dengan virtual meeting.
- Kondisi geografis Indonesia dengan medan yang cukup sulit dijangkau.
- Birokrasi yang belum ramping, sehingga beberapa kebijakan mengalami hambatan.
- Masih terbatasnya konektivitas di beberapa wilayah, sehingga penyaluran distribusi mengalami hambatan.
- Ada beberapa wilayah atau lahan yang berbatasan dengan Pal batas milik masyarakat sehingga mudah sekali memicu konflik.
- Faktor eksternal, dimana negara-negara saingan Indonesia semakin agresif menawarkan kemudahan untuk berinvestasi terutama dalam bidang infrastruktur dan transportasi.

Faktor Pendukung Pencapaian IKU

Dalam mendorong percepatan penyediaan infrastruktur tersebut, diperlukan dukungan berbagai pihak dalam pembiayaan infrastruktur, termasuk dari pihak swasta. Adapun faktor pendukung adalah sebagai berikut:

- Faktor internal: adanya kepemimpinan, koordinasi, dan kerja sama tim yang baik di lingkup unit kerja eselon I maupun lintas eselon I. seperti diadakannya rakor internal

serta evaluasi rutin didalam ruang lingkup deputi bidang koordinasi infrastruktur dan transportasi ataupun dengan unit kerja lain.

- Faktor eksternal: adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antar Kementerian/ Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves, seperti dengan pemerintahan daerah, Kementerian PUPR, TNI dll.
- Faktor pendukung lainnya yang merupakan program yang memiliki sumbangsih besar terhadap pencapaian IKU IDSG: Pembangunan infrastruktur wilayah 3T yaitu Daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal merupakan daerah yang paling terluar pada wilayah Indonesia; Proyek PSN seperti Pembangunan rumah susun

Dalam pencapaian IKU, kendati yang mengeluarkan nilai IKU dari lembaga luar (*World Economic Forum*) namun beberapa berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan K/L teknis di bawah koordinasi Kemenko Marves dan unit kerja internal Kemenko Marves dalam pencapaian IKU yaitu dengan adanya *refocusing* anggaran, mengakibatkan berpengaruh pada capaian, karena berkurangnya kegiatan pemantauan yang tidak seperti dalam awal perencanaan sehingga sangat berdampak, terutama anggaran yang dibutuhkan untuk pemantauan non kasuistik, namun demikian dari segi laporan dapat terpenuhi dan ditindak lanjuti.

Target capaian IDSG di renstra sampai dengan tahun 2024 tercapai 66 dan target IKU menko IDSG pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 adalah tercapai nilai index 65. Sampai dengan saat ini belum dapat dikatakan bahwa target sudah tercapai/belum dikarenakan tahun 2021 belum berakhir, namun melihat situasi dan kondisi saat ini peran Kemenko Marves dalam mengawal meningkatnya pilar infrastruktur dalam capaian IDSG adalah sudah banyak mengawal beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat meningkatkan nilai index pilar infrastruktur pada periode penilaian tahun 2021. Sebagai perbandingan realisasi atas target IKU dari tahun 2018 sampai dengan akhir Renstra Kemenko Marves tahun 2024 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 22. Perbandingan Realisasi dan Target Indikator 3

No	Indikator	Capaian TW III				Target 2021	Target Tahun 2024
		2018	2019	2020	2021		
3	Indeks Daya Saing Global (IDSG)	46	50	n/a*)	57**)	65	66

*) WEF tidak melakukan penilaian karena pandemic covid 19

**) Perkiraan hasil *Survei World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021, Institute Management Development (IMD) 2021*

Kendala yang dihadapi sampai dengan saat ini adalah refocusing anggaran seluruh K/L dalam masa penanganan pandemi COVID-19 dan meningkatnya wabah di pertengahan tahun 2021 sehingga sedikit banyak mempengaruhi capaian target pembangunan infrastruktur di Indonesia, Dengan capaian target jangka menengah sebesar 65 dengan situasi kondisi capaian pada tahun ini yang diperkirakan akan tercapai/tidak. maka masih perlu ditingkatkan/dipertahankan lagi di periode berikutnya.

Dengan adanya kendala di atas, tentunya akan berpengaruh selain terhadap capaian dari target perjanjian kinerja dan pencapaian target pada Renstra Kemenko Marves juga terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur serta gagalnya perencanaan dikarenakan target yang sudah direncanakan tidak dapat tercapai/terpenuhi.

Agar target IKU IDSG tercapai, beberapa rekomendasi/masukan untuk mempertahankan pencapaian target IKU tersebut pada periode berikutnya, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan studi yang komprehensif dan benar untuk mendukung pengembangan wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan Perbatasan.
- Pemerataan akses konektivitas serta jaringan internet dari 2G menjadi 4G.
- Dari hasil peninjauan lapangan akan ditindak lanjuti dengan FGD agar menghasilkan data yang akurat terkait pengembangan wilayah 3T.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU IDSG melalui program dan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan dengan stakeholder terkait perihal perampingan birokrasi
- Pembangunan Jalan Lingkar Enggano, pengembangan bandara, Pelabuhan Kahyapu, dan Pelabuhan Melakoni untuk memenuhi permintaan kunjungan wisata dengan menyediakan sarana dan frekuensi transportasi yang layak dan dukungan konektivitas.
- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Perlindungan Investasi Dalam RPP Penyelenggaraan Rumah Susun dengan melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pembangunan rumah susun bagi Pegawai Pemprov Maluku Utara.
- Rakor Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan pengembangan wilayah di Provinsi Bengkulu:
 - Percepatan pembangunan Jalan Tol Bengkulu-Lubuk Linggau sepanjang 95 Km (Fisik: 61% dan pembebasan lahan: 92%);
 - Percepatan Pembangunan PSN Akses Air Minum Perpipaian (SPAM Benteng-Kobema).
 - Percepatan Pembangunan Jalan Lingkar Luar Pulau Enggano (Pulau Terluar).
 - Pengendalian banjir kota Bengkulu dan rekayasa pantai.

Dengan capaian IDSG ini menunjukkan Indonesia sebagai negara yang memiliki daya saing yang kuat dan dapat menjaga pertumbuhan ekonominya, sehingga ke depannya diharapkan dapat mulai membangun kehidupan negara yang teratur sehingga terwujud sebuah peradaban. Ke depan upaya dalam mendorong peningkatan IDSG harus terus ditingkatkan dengan didorong melalui kegiatan-kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang infrastruktur sebagai salah satu pilar IDSG.

Tujuan yang ingin dicapai dari SS.4 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri mengelola lautnya serta aktif di forum internasional. Tercapainya SS.4 ini diukur dengan indikator Tingkat Kedaulatan Maritim yang diperoleh berdasarkan capaian Tingkat Kepastian Kewilayahan, Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim, dan Tingkat Keselamatan Maritim. Capaian Indeks Kedaulatan Maritim 2020 dihitung dengan formula:

$$TKM = 30\%TKW + 35\%TKKM + 35\%TKM$$



Selanjutnya, dilakukan konversi sehingga diperoleh nilai Tingkat Kedaulatan Maritim.

Tabel 23. Konversi Nilai Tingkat Kedaulatan Maritim

Persentase	Nilai	Keterangan
$0 < x \leq 25$	1	Kurang Berdaulat
$25 < x \leq 50$	2	Cukup Berdaulat
$50 < x \leq 75$	3	Berdaulat
$x > 75$	4	Sangat Berdaulat

Dengan demikian capaian SS.4 pada triwulan III sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 24. Capaian Kinerja SS.4 TW III

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW II	Capaian
4	Indeks Kedaulatan Maritim	5,19	n/a	n/a	n/a
Capaian Kinerja SS 4					n/a

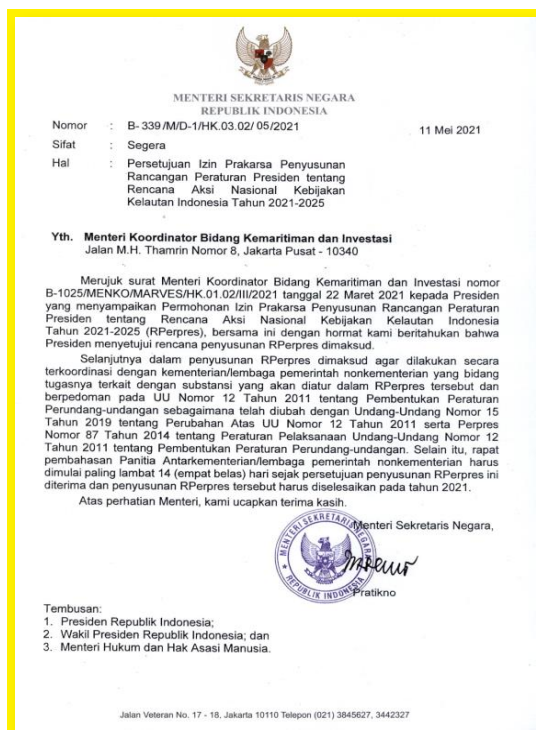
Tercapainya target SS.4 ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang mampu mengelola lautnya dan merupakan negara yang aktif di forum internasional. Perbandingan capaian indeks ini antara triwulan III tahun 2021 dan triwulan III tahun 2020 belum dapat ditampilkan (n/a), hal ini karena pada tahun 2021 capaian atas IKU ini pada triwulan IV (akhir tahun 2021), sedangkan untuk target akhir (tahun 2021) dengan nilai 3, hal ini seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Perbandingan Capaian dan Target Indikator 4

No	IKU	Realisasi TW II 2020	Realisasi TW II 2021	Target 2021	Target Tahun 2024
4	Indeks Kedaulatan Maritim	n/a	n/a	3	4

Di antara beberapa kegiatan atau isu yang ditangani selama triwulan III yang mendukung pencapaian tingkat kedaulatan maritim, Kemenko Marves telah melaksanakan pertemuan maupun tindakan-tindakan, sebagai berikut:

- Peningkatan peran dan fungsi Satpol PP dalam menjaga keamanan di Laut;
- Pembahasan Rancangan Permenko tentang SOP Berbagi Data Antar K/L dalam rangka penegakan hukum di laut;
- Penanganan kasus penelantaran pelaut dan awak kapal perikanan (MV PL Yui Lam dan MV Shun Chao, MV TSYS, FV Ying Shun 368);
- Evaluasi kemampuan patroli dan penegakan hukum di laut;
- Kesiapan keamanan dan keselamatan pelabuhan dan objek vital strategis terhadap ancaman terorisme;
- Rapat Koordinasi Teknis Perkembangan Negosiasi *Realignment Flight Information Region*;
- Finalisasi dan Penandatanganan Berita Acara Rekomendasi Teknis Identifikasi Calon Perairan Pedalaman dan Revisiting Titik Dasar Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
- Koordinasi Teknis Percepatan Penyusunan Regulasi Nasional (RPepres) Peran Aktif Indonesia di Kawasan Dasar Laut Internasional
- Diskusi Pakar Rencana Penetapan Perairan Pedalaman Indonesia dan Revisiting Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
- Proses Pembentukan Rancangan Keputusan Presiden tentang Rujukan Nasional Data Kewilayahan
- Penyusunan *Risk Assessment* Daerah Rawan Kecelakaan Kapal
- Penyusunan Indeks Keselamatan Maritim



Gambar 8 Surat Izin Prakarsa

Inovasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kedaulatan maritim, Kemenko Marves mengoordinasikan tersusunnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2020-2024, sampai dengan triwulan III ini telah Surat Izin Prakarsa telah terbit melalui Surat Setneg nomor B-229/M/D-1/HK.03.02/05/21 tanggal 11 Mei 2021, selanjutnya masih dalam proses finalisasi harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Diperkirakan target penetapan Perpres diundur pada Triwulan IV.



Tujuan dari SS.5 yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan menurunkan biaya pengiriman barang, memangkas disparitas harga bahan pokok antar wilayah, serta memeratakan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Hal ini dapat dilaksanakan diantaranya dengan meningkatkan konektivitas dan kinerja logistik yang akan menjamin kelancaran arus barang. Kebijakan yang dilakukan adalah meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui strategi:

- ❖ Menurunkan biaya logistik nasional yang memperlancar arus barang dan berdampak pada pemerataan
- ❖ Menyediakan Infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah

Representasi pelaksanaan target SS.5 dilakukan melalui berbagai bidang kemaritiman dengan fokus pada penanganan program Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi serta program Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Sasaran strategis 5 (SS.5) dijabarkan dengan 2 indikator kinerja, yaitu; Indeks Kinerja Logistik dan Indeks Disparitas Ekonomi. Kedua indikator kinerja ini belum ditargetkan untuk Triwulan III 2021.

Tabel 26. Capaian Kinerja SS.5 TW III

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW II	Capaian
5	Indeks Kinerja Logistik	5,19	n/a	n/a	n/a
6	Indeks Disparitas Ekonomi	7,14	n/a	n/a	n/a
Capaian SS.5					n/a

Indeks Kinerja Logistik (*Logistic Performance Index/LPI*)

Indeks Kinerja Logistik (*Logistic performance Index/LPI*) merupakan alat pembandingan interaktif untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan apa yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kinerja dalam logistik perdagangan. LPI merupakan parameter kinerja logistik yang dirilis oleh *World Bank* setiap 2 tahun, sampai dengan triwulan II capaian atas IKU ini belum dapat kami sajikan (n/a), hal ini dikarenakan IKU ditargetkan dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021).

Indeks kinerja logistik merupakan indeks yang dihitung untuk mengetahui permasalahan logistik (*bottleneck logistics*) dalam pengiriman barang antar pulau dan membandingkan indikator daya saing perdagangan antar pulau, khususnya biaya dan waktu antar rute-rute tertentu. LPI Indonesia adalah tolok ukur kinerja logistik yang sederhana, yang dapat mencerminkan dalam perspektif global, apakah sebuah negara terkoneksi (mendukung kelancaran dan kecepatan distribusi barang logistik) secara global.

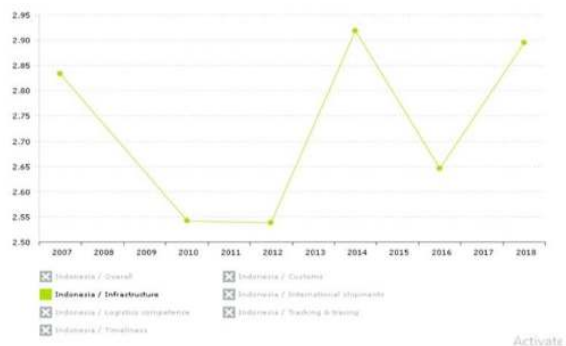
Dasar penilaian LPI menggunakan 6 dimensi perdagangan yang diukur sebagai berikut:



LPI adalah suatu survei yang didasarkan pada pendapat dan pengalaman pelaku logistik yang mempunyai pengetahuan paling banyak di bidang rantai penawaran, indeks ini mencerminkan ketidaknyamanan umum para pengguna jasa logistik. Pengalaman memperlihatkan bahwa pendapat sektor swasta penting, pandangan mereka secara langsung mempengaruhi pilihan jalur dan gerbang pelayaran serta mempengaruhi keputusan banyak perusahaan mengenai lokasi produksi, pilihan pemasok dan seleksi pasar sasaran. Hal ini juga menegaskan bahwa ukuran rintangan yang bersifat kualitatif dapat mencakup perbedaan-perbedaan yang signifikan di berbagai negara yang mencerminkan penilaian terhadap kondisi aktual di lapangan serta maknanya bagi perusahaan-perusahaan.

Sampai dengan triwulan III capaian atas IKU ini belum dapat kami sajikan (n/a), hal ini dikarenakan sampai dengan laporan ini disusun Word Bank belum merilis hasil dari penilaian tahun 2021 atas IKU ini, dan Kemenko Marves menargetkan dapat dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021), sehingga data yang ditampilkan sampai dengan triwulan III adalah hasil penilaian LPI pada tahun 2018.

Pada 2018, peringkat Indonesia meningkat ke posisi 46 dengan skor 3,15 atau naik 17 tingkat dari sebelumnya di posisi 63 dengan skor 2,98. Dari semua aspek penilaian LPI 2018, aspek kepabeanan meraih skor terendah sebesar 2,67. Sementara itu, aspek penilaian tertinggi adalah ketepatan waktu dengan skor 3,67. Aspek lainnya yaitu infrastruktur dengan skor



Analisis dimensi Indeks Kinerja Logistik *Logistic performance index* pada tahun 2018 Indonesia

- Bea cukai berada diperingkat 62 dengan skor 2,67;
- Infrastruktur berada diperingkat 54 dengan skor 2,90;
- Pengiriman barang internasional berada diperingkat 42 dengan skor 3,23;
- Kualitas dan kompetensi logistik berada diperingkat 44 dengan skor 3,10;
- Pencarian barang berada diperingkat 39 dengan skor 3,30;
- Ketepatan waktu berada diperingkat 41 dengan skor 3,67.

Dari hasil capaian nilai indeks di atas (tahun 2018) dapat kita simpulkan bahwa meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk mengurangi hambatan yang besar, seperti disahkannya UU Pelayaran tahun 2008, UU Pos tahun 2009, penerapan operasi pelabuhan selama 24/7, promosi pelabuhan kering (*dry ports*) untuk mengurangi kemacetan, dan implementasi *National Single Window* yang saat ini sedang berlangsung, hal-hal tersebut belum dapat diwujudkan menjadi hasil yang positif bagi para responden.

Oleh karena itu, meskipun angin perubahan sudah mulai dihembuskan ke arah yang tepat, kekuatannya masih belum dirasakan: kesenjangan implementasi seperti kurangnya koordinasi dan buruknya penetapan prioritas atas tindakan-tindakan yang mendesak menghalangi angin perubahan untuk berhembus lebih kuat. Untuk capaian agar LPI Indonesia pada tahun mendatang nilainya meningkat.

Kemenko Marves yang memiliki tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terhadap 7 K/L teknis di bawah lingkup koordinasinya dalam mendorong capaian IKU pada komponen kualitas infrastruktur dan mengkoordinasikan komponen lain dengan K/L terkait untuk terus berupaya meminimalisir permasalahan yang ada sampai saat ini terkait logistik sehingga penilaian dari para responden terhadap Indonesia bisa positif (nilai LPI meningkat).

Sampai dengan triwulan III, target capaian atas indeks logistik pada renstra sampai dengan tahun 2024 tercapai 3,5 dan target IKU Indeks logistik pada Perjanjian Kinerja

Domestic LPI, Performance: Indonesia 2018

Indonesia	
Export time and distance / Port or airport supply chain	
Distance (kilometers)	171km
Lead time (days)	2 days
Export time and distance / Land supply chain	
Distance (kilometers)	297km
Lead time (days)	3 days
Import time and distance / Port or airport supply chain	
Distance (kilometers)	277km
Lead time (days)	4 days
Import time and distance / Land supply chain	
Distance (kilometers)	277km
Lead time (days)	4 days
Shipments meeting quality criteria (%)	
Number of agencies - exports	73%
Number of agencies - imports	4
Number of documents - exports	3
Number of documents - imports	5
Clearance time without physical inspection (days)	3
Clearance time with physical inspection (days)	1 days
Physical inspection (%)	7 days
Multiple inspection (%)	8%
Declarations submitted and processed electronically and on-line (%)	2%
Importers use a licensed Customs Broker (%)	N/A
Able to choose the location of the final clearance (%)	N/A
Goods released pending customs clearance (%)	N/A
N/A	

tahun 2021 adalah dengan nilai index 3,2. Sampai dengan saat ini belum dapat dikatakan bahwa target sudah tercapai/belum dikarenakan tahun 2021 belum berakhir, namun melihat situasi dan kondisi saat ini peran unit kerja Kemenko Marves sudah banyak melakukan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian yang cukup efektif. Capaian dari Indeks Kinerja Logistik pada triwulan III tahun 2021 dibandingkan triwulan III tahun 2020 dan target yang ingin dicapai tahun 2021 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 27. Perbandingan Capaian dan Target Indikator 5

No	IKU	Realisasi TW III 2018	Realisasi TW III 2020	Realisasi TW III 2021	Target Tahun 2021	Target Tahun 2024
5	Indeks Kinerja Logistik	3,15	n/a	n/a	3,2	3,5

Biaya Logistik Nasional dapat membantu untuk melihat progress pembangunan di bidang infrastruktur dan transportasi yang dilakukan Pemerintah memiliki gambaran berbanding lurus atau tidak terhadap penurunan biaya logistik nasional. Yang bertujuan untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan. Serta menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mendorong pencapaian IKU ini, ada beberapa faktor yang mendukung baik dari internal dan eksternal, diantaranya sebagai berikut:

Faktor Pendukung

- ❖ Konsep SSM sudah mulai diterapkan dalam pengurusan ijin-ijin impor alat kesehatan dan vaksin
- ❖ Saat ini sudah bergabung satu Bank BUMN, yaitu Bank Mandiri. Sistem pembayaran *online* di Bank Mandiri tersebut sudah dapat dilakukan satu siklus pembayaran mulai dari pemesanan DO sampai penerbitan SP2.
- ❖ Dari faktor internal yaitu adanya kepemimpinan, koordinasi, dan kerja sama tim yang baik di lingkup unit kerja eselon I maupun lintas eselon I. seperti diadakannya rakor internal serta evaluasi rutin didalam ruang lingkup deputi bidang koordinasi infrastruktur dan transportasi ataupun dengan unit kerja lain.
- ❖ Sedangkan sebagai pendukung dari faktor eksternal adalah adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antar Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves. Seperti dengan pemerintahan daerah, Kemenkeu, Kemenhub, Kemendag, Kementan, Kemenperin, KemenKP, Kemen Investasi/BKPM, KemenBUMN, BI dll.
- ❖ Faktor pendukung lainnya merupakan program Kemenko Marves yang memiliki sumbangsih besar untuk Indeks logistik adalah NLE dan Tol Laut.

Selain faktor pendukung yang telah disampaikan tadi juga adanya pengaruh penggunaan anggaran dalam upaya pencapaian target IKU ini yakni dengan adanya refocusing jelas sangat berdampak pada efektifitasnya capaian kinerja, salah satu kegiatan yang terkena

dampak yaitu pengawasan lapangan, untuk beberapa kegiatan seperti pengawasan tol laut di papua tertunda karena hal ini.

Pengaruh lainnya sampai dengan TW III atas IKU tersebut terhadap pencapaian Renstra Kemenko Marves 2020 – 2024 akan mempengaruhi kualitas logistik Indonesia, serta akan mempersulit distribusi barang dikarenakan biaya logistik yang cukup mahal dan menghambat roda perekonomian serta akan mempengaruhi turunnya kesejahteraan masyarakat sehingga untuk mengatasi hal tersebut sampai dengan akhir triwulan III, Kemenko Marves melakukan upaya untuk mempertahankan pencapaian target IKU tersebut pada periode berikutnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- ❖ Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara terstruktur untuk memastikan tercapainya dampak yang diinginkan
- ❖ Penyediaan dan penataan Infrastruktur logistik di dalam dan di luar pelabuhan
- ❖ mengimplementasikan secara *Pilot Project* dengan mendahulukan pihak-pihak yang sudah siap dan memiliki antusiasme tinggi
- ❖ Proses dan hasilnya di-Komunikasi-kan kepada Publik untuk mendapatkan kontrol dan masukan

Kemenko Marves terus berinovasi dalam pencapaian target dari IKU ini sampai dengan akhir tahun 2021 dengan melakukan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan TW III, diantaranya adalah:

- ❖ Koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L terjalin sangat baik dalam pengawalan proyek-proyek strategis pemerintah dan juga proyek prioritas
- ❖ Koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L terjalin sangat baik dalam pembuatan rekomendasi kebijakan ataupun pengendalian kebijakan guna mewujudkan turunya biaya *logistic* terhadap PDB
- ❖ Telah siapnya platform digital LCS (*logistic communication system*) yang dikembangkan Kemenhub dan PT Telkom
- ❖ Integrasi aplikasi muatan tol laut melalui LCS Kemenhub dengan aplikasi NLE
- ❖ NLE sudah diterapkan dengan Konsep SSm sehingga mempermudah dalam pengurusan ijin-ijin impor alkes dan vaksin.
- ❖ Perihal sistem pembayaran, saat ini sudah bergabung satu Bank BUMN, yaitu Bank Mandiri. Sistem pembayaran *online* di Bank Mandiri tersebut sudah dapat dilakukan satu siklus pembayaran mulai dari pemesanan DO (*delivery online*) sampai penerbitan SP2. (Surat penyerahan peti kemas)
- ❖ Melakukan monitoring dan evaluasi secara terstruktur untuk memastikan tercapainya dampak yang diinginkan;
- ❖ Penyediaan dan penataan infrastruktur logistik di dalam dan di luar pelabuhan;
- ❖ Mengimplementasikan secara *pilot project* dengan mendahulukan pihak-pihak yang sudah siap dan memiliki antusiasme tinggi;

- ❖ Proses dan hasilnya di-komunikasi-kan kepada Publik untuk mendapatkan kontrol dan masukan;
- ❖ *Delivery* NLE di kantor pelayanan;
- ❖ Diskusi dengan *stakeholder*;
- ❖ Marketing platform dan kolaborasi;
- ❖ Edukasi dengan mempertemukan *supply and demand* setempat; serta
- ❖ Identifikasi hambatan dan masalah yg ada di daerah.
- ❖ Tol laut kawasan Papua dan Papua Barat telah melaksanakan kolaborasi angkutan multimoda melalui tol laut, angkutan perintis darat dan jembatan udara dengan rute Surabaya-Merauke-Oksibil (Kab.Pegunungan Bintang). Membantu distribusi beras 24 Kontainer Merauke-Jayapura. Total Muatan berangkat 6503 TEUS dan muatan balik 2372 TEUS (data per 17 juni 2021), dengan tindaklanjut atas program ini adalah:
 - Telah dibentuk draf gugus tugas pengawasan program tol laut berdasarkan keputusan menko marves dengan melibatkan seluruh k/l terkait sesuai arahan perpres 27 tahun 2021 telah berproses secara internal.
 - Melaksanakan kegiatan *business matching* antara pelaku bisnis di daerah dan pelaku bisnis di daerah pusat agar mengurangi permasalahan *imbalance cargo*.

Indeks Disparitas Ekonomi

Indeks Disparitas Ekonomi bertujuan untuk mengukur pemerataan pembangunan ekonomi serta untuk memberi gambaran tentang pembangunan Infrastruktur dan Investasi maritim di Kawasan Jawa dan Kawasan Luar Jawa. Capaian tahun 2020 indeks disparitas ekonomi -0.176 direpresentasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebaran PDRB ini dinilai dapat menggambarkan tingkat pemerataan pembangunan antar wilayah yang diukur melalui nilai tambah ekonomi yang dihasilkan.

Indeks disparitas ekonomi ini juga dalam upaya: Percepatan perizinan berusaha; Meningkatkan daya saing dan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif terutama dalam bidang infrastruktur dan transportasi; Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dasar dan pelayanan dasar; serta Mengoptimalkan pengembangan ekonomi berbasis komoditas lokal. Indeks Disparitas Ekonomi diformulasikan sebagai berikut:

Indeks Disparitas Ekonomi diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Disparitas Ekonomi} = \frac{\text{PDRB Luar Jawa} - \text{PDRB Jawa}}{\text{PDRB Total}}$$

• Rumus:

$$\sqrt{\frac{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 / n}{\bar{Y}}}$$

dimana:

Y_i = PDRB percapita kecamatan

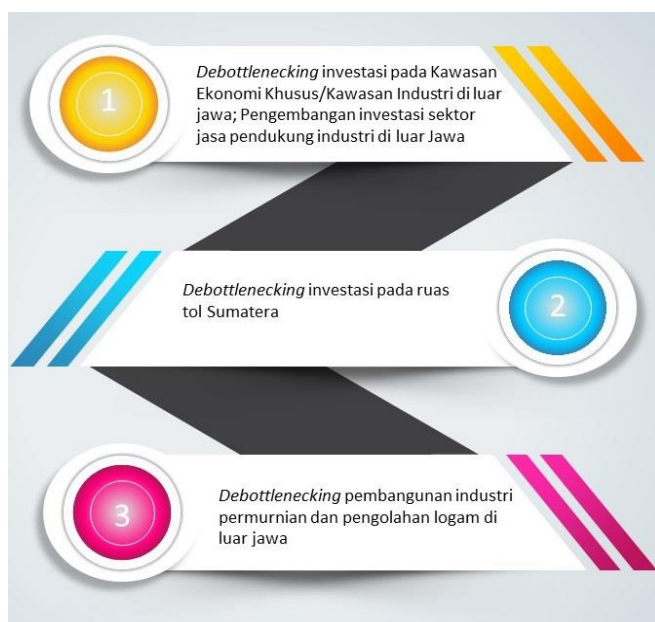
\bar{Y} = rata-rata PDRB kota

N = jumlah penduduk kecamatan

F = jumlah penduduk kota

***) berdasarkan indeks Williamson**

Adapun untuk mencapai target Indeks Disparitas Ekonomi sampai akhir tahun 2021, Kemenko Marves tetap melakukan kontribusi dalam kebijakan terkait hal tersebut melalui:

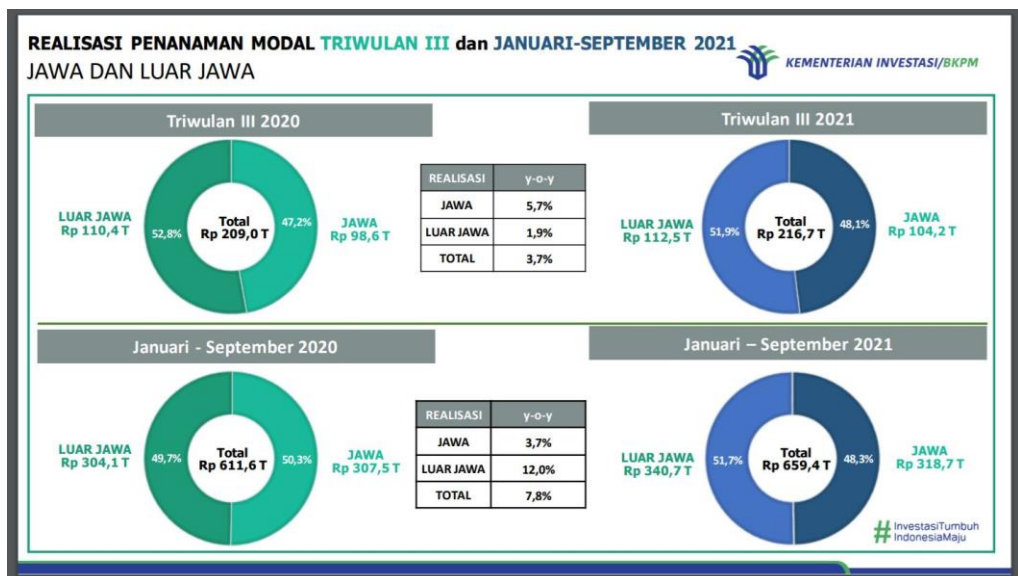


Berdasarkan hasil rilis dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahwa data capaian realisasi investasi pada Triwulan III (periode Juli – September) untuk Tahun 2021, berhasil mencatat realisasi investasi triwulan III tahun 2021 sebesar Rp 216,7 triliun, tumbuh 3,7% *year on year* (yoy). Namun secara kuartalan, realisasi investasi justru tumbuh minus 2,8% yoy. Sebab, pada kuartal II-2021 investasi yang terkumpul mencapai Rp 223 triliun. Meskipun tercatat 3,7 persen dibandingkan periode TW III tahun 2020 (yoy), namun capaian tersebut tercatat melambat 2,8 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (q-t-q).

Capaian realisasi investasi pada periode Januari – September ini menyumbang 73,3% terhadap target tahun 2021 sesuai dengan arahan Presiden sebesar Rp 900,0 triliun. Dari realisasi investasi tersebut dapat menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 912.402 orang. Apabila dilihat capaian triwulan III dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami perlambatan sebesar 2,7%

dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan sebesar 10,3%. Capaian PMA di triwulan III mengalami perlambatan sebesar 11,6% jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2021.

Berdasarkan capaian realisasi investasi tersebut, terlihat kontribusi yang cukup signifikan dari PMDN sebesar Rp 113,5 triliun atau 52,4% dari total capaian realisasi investasi dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 133.972 orang. Sektor penyumbang terbesar berasal dari perumahan, kawasan industri, dan perkantoran Rp 20,6 triliun (18,2%), sedangkan untuk lokasi proyek, realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat Rp 17,1 triliun (15,1%).



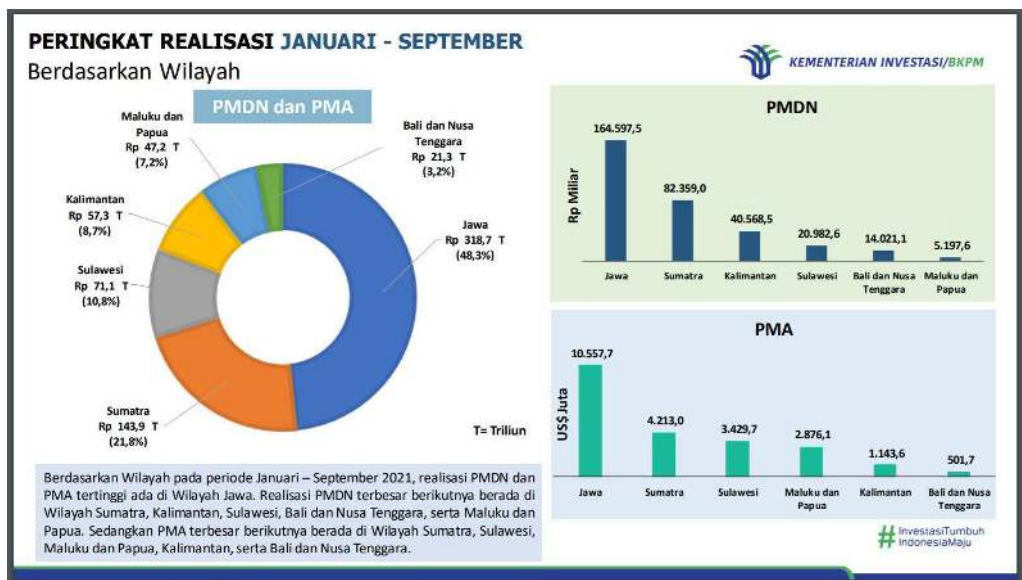
Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, TW 3 2021

Dalam periode yang sama, realisasi PMA sebesar Rp 103,2 triliun atau 47,6% dari total capaian realisasi investasi dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 154.715 orang. Sektor penyumbang realisasi PMA terbesar berasal dari industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya Rp 21,5 triliun (20,9%) dan untuk lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat Rp 17,7 triliun (17,1%). PMA yang menyumbangkan realisasi terbesar berasal dari negara Singapura Rp 37,4 triliun (36,2%).

Apabila dilihat dari persebarannya, realisasi investasi di Pulau Jawa mencapai Rp 104,2 triliun (48,1%), sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar Rp 112,5 triliun (51,9%). Kendala yang ada saat ini adalah pembangunan antara wilayah daratan dan lautan yang belum merata serta stabilitas ekonomi dan sistem distribusi yang masih belum stabil serta masih dalam tahap pembangunan. Kinerja realisasi investasi di luar Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Jawa karena diberlakukannya PPKM darurat level 3 dan 4 di Pulau Jawa dan Bali, sementara realisasi investasi di luar Pulau Jawa dan Bali tetap berjalan dengan sebagian PPKM level 1 dan 2. Namun dari segi peluang bahwa

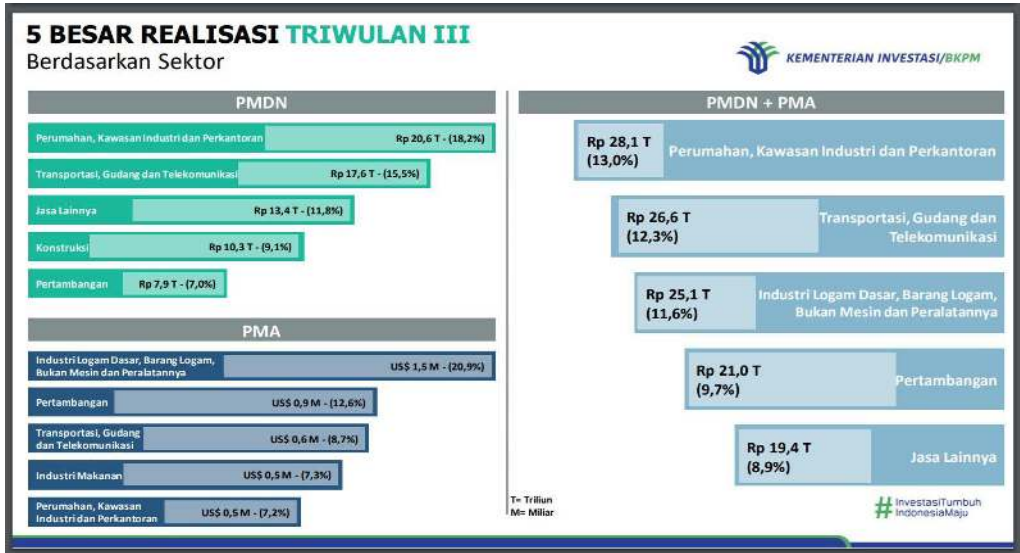
kondisi saat ini komposisi realisasi investasi di luar Pulau Jawa melewati Pulau Jawa dengan selisih 8,3%. Artinya disparitas yang ada sampai dengan triwulan III (Juli s.d September 2021) hampir tidak ada 'gap' lagi (hampir merata).

Sedangkan berdasarkan wilayah realisasi PMDN dan PMA sampai dengan triwulan III tahun 2021 tertinggi di wilayah Jawa. Realisasi PMDN berikutnya berada di wilayah Luar Jawa (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua), sedangkan PMA terbesar berada di Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Papua, Kalimantan serta Bali dan Nusa Tenggara. investasi antara Jawa dan Luar Jawa mengalami peningkatan.



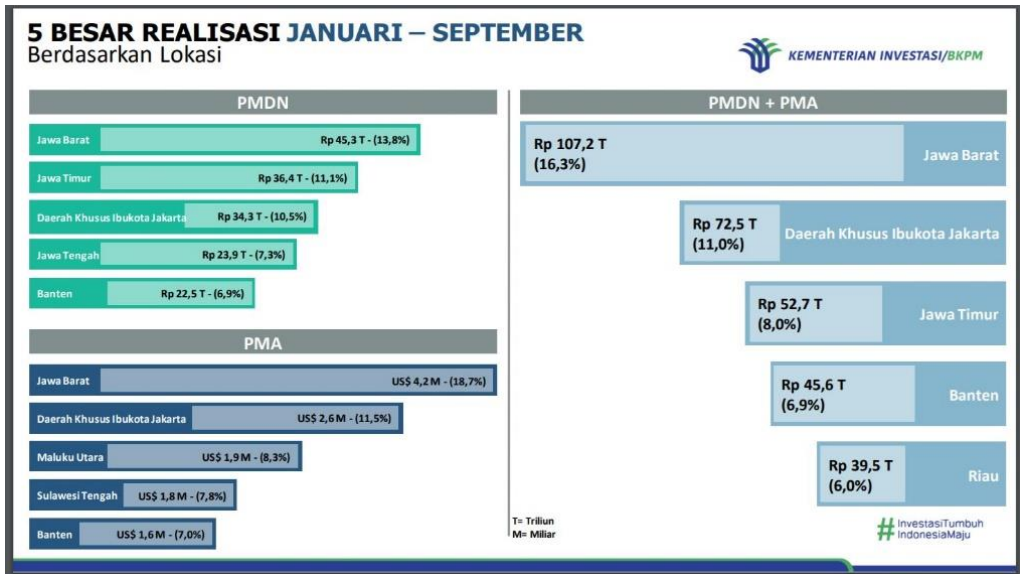
Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, TW 3 2021

Berdasarkan sektor usahanya, paling banyak disumbang oleh perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar RP 28,1 triliun. Lalu, transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp 26,6 triliun. Kemudian, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya Rp 25,1 triliun. Selanjutnya, pertambangan sebesar Rp 21 triliun. Terakhir jasa lainnya Rp 19,4 triliun. Di sisi lain, dari total realisasi investasi kuartal III-2021 yang tercatat oleh Kementerian Investasi, telah menyerap 288.687 orang, lebih rendah daripada periode sama tahun lalu sebanyak 295.387.

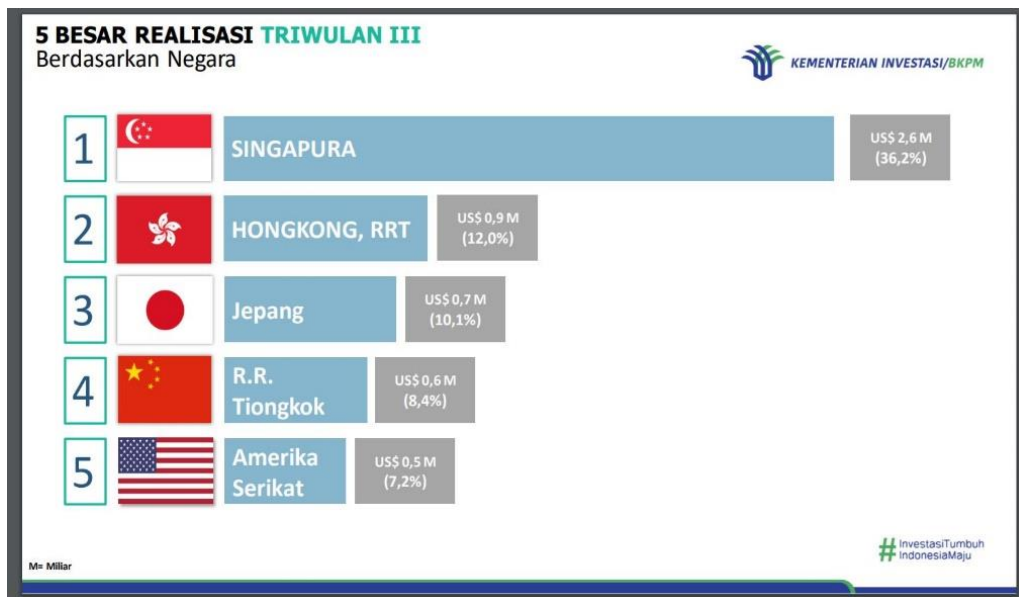


Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, TW 3 2021

Berdasarkan lokasi proyek, realisasi investasi triwulan III-2021 tersebar di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau dan Banten, dengan realisasi secara kumulatif dari Januari-September 021 PMA mencapai Rp 331,7 trilyun (50,3%) dan PMDN sebesar 327,7 trilyun (49,7%).

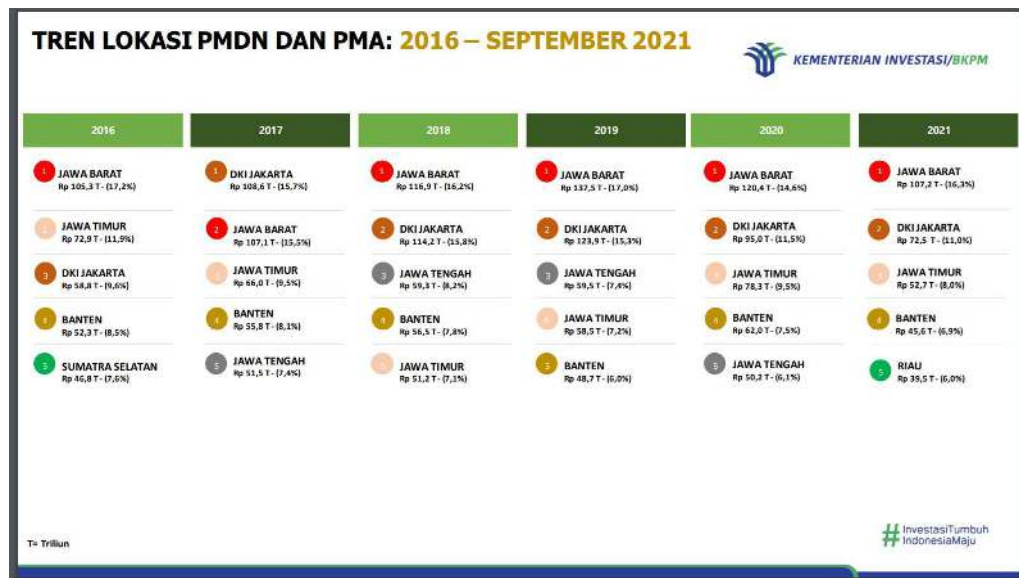


Sedangkan 5 besar negara yang paling besar investasi asing di Indonesia s.d TW III 2021 yaitu Singapura (US\$ 2,6 M), Hongkong (US\$ 0,9 M), Jepang (US\$ 0,7 M), China (US\$ 0,6 M), dan Amerika Serikat (US\$ 0,5 M).



Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, TW 3 2021

Sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 tren 5 besar lokasi investasi (PMDN dan PMA) selalu berada di wilayah Jawa (hanya pada tahun 2016 Sumatera Selatan (Luar Jawa) masuk 5 besar lokasi investasi), hal ini yang menimbulkan adanya 'gap' (disparitas) dengan luar Jawa, namun tren lokasi itu mulai bergeser kembali pada tahun 2021, dimana Riau masuk dalam 5 besar lokasi untuk berinvestasi. Seperti terlihat pada gambar berikut:



Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, TW 3 2021

Gambaran di atas menunjukkan bahwa tugas dari Kemenko Marves sebagai kementerian yang mengkoordinir K/L teknis dalam pembangunan bidang kemaritiman dan investasi untuk mendorong investor dapat berinvestasi di luar Jawa, sehingga sudah tidak ada lagi 'gap' pembangunan antara Jawa dan Luar Jawa.

Dalam pencapaian IKU ini terdapat beberapa faktor pendukung, baik itu dari internal, eksternal serta lainnya. Beberapa faktor pendukung diantaranya sebagai berikut: Koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L terjalin sangat baik. Sedangkan faktor internal yang ada saat ini adalah adanya kepemimpinan, koordinasi, dan kerja sama tim yang baik di lingkup unit kerja eselon I maupun lintas eselon I seperti diadakannya rakor internal serta evaluasi rutin didalam ruang lingkup deputi bidang koordinasi infrastruktur dan transportasi ataupun dengan unit kerja lain.

Untuk faktor eksternalnya antara lain: adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antar K/L di bawah koordinasi Kemenko Marves. Seperti dengan pemerintahan daerah , BKPM dll. Berikutnya adalah faktor pendukung lainnya merupakan program dan kegiatan Kemenko Marves pada bidang infrastruktur dan transportasi yang memiliki sumbangsih besar untuk Indeks disparitas ekonomi adalah: Ekosistem logistik nasional, dengan menurunkan biaya logistik nasional yang memperlancar arus barang dan berdampak pada pemerataan serta menyediakan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Data PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Sampai dengan penyusunan laporan kinerja Triwulan III Tahun 2021 data Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 belum dirilis oleh Kementerian Investasi/BPKM, sehingga untuk triwulan III TA 2021 belum dapat kami sajikan (n/a). Namun demikian target atas IKU ini pengukurannya akan dilaksanakan pada triwulan IV (akhir tahun 2021).

Tahun 2021 ini sampai dengan triwulan III, adanya beberapa perubahan (*refocusing*) anggaran atas pelaksanaan program sehingga intensitas kunjungan lapangan berkurang khususnya apabila ada penugasan langsung atau bersifat *ad hoc* yang berdampak terhadap reporting kepada pimpinan masih kurang aplikatif (tidak *real time*). Namun demikian harapannya target atas IKU ini sampai dengan akhir tahun 2021 dapat tercapai.

Target capaian indeks disparitas ekonomi di renstra sampai dengan tahun 2024 tercapai ~ 0 dan target IKU menko Indeks disparitas ekonomi pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 adalah tercapai nilai index ~ 0 . Sampai dengan saat ini belum dapat dikatakan bahwa target sudah tercapai/belum dikarenakan tahun 2021 belum berakhir, namun melihat situasi dan kondisi saat ini peran deputi bidang koordinasi infrastruktur dan transportasi sudah banyak melakukan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian yang cukup efektif.

Perbandingan capaian Indeks Disparitas Ekonomi triwulan III tahun 2021 dengan tahun 2020, tahun 2020 realisasi mencapai -0.17~, pada tahun 2024 indeks ini menargetkan ~0, seperti pada tabel berikut:

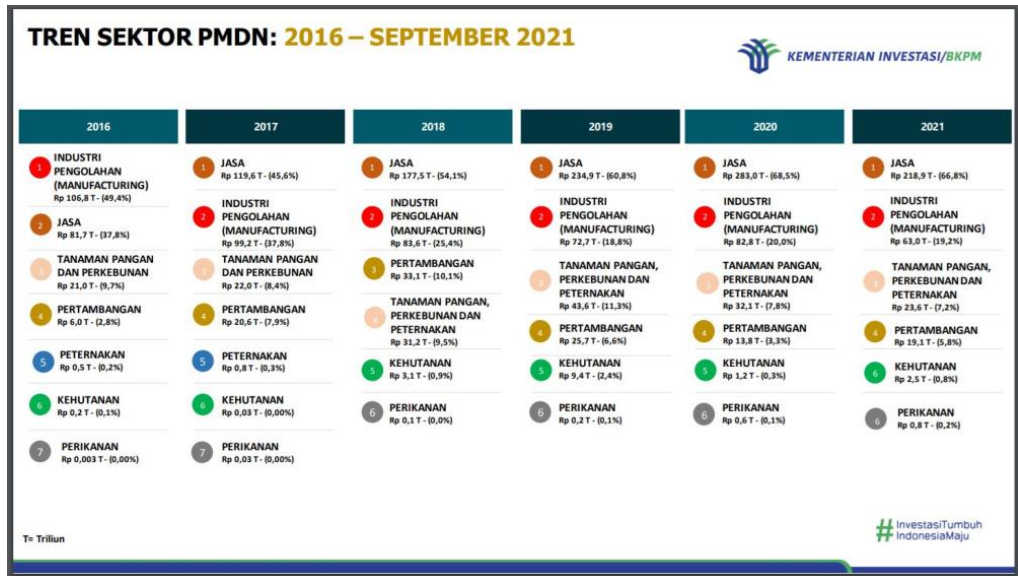
Tabel 28. Perbandingan Capaian dan Target Indikator 6

No	IKU	Realisasi TW III 2020	Realisasi TW III 2021	Target Tahun 2021	Target Tahun 2024
6	Indeks Disparitas Ekonomi	n/a	n/a	~0	~0

Berdasarkan tabel di atas bahwa sampai dengan triwulan III terlihat apabila tidak tercapai dari IKU 6 ini akan berpengaruh, maka jika ditarik kembali perhitungan menggunakan rumus indeks williamson akan berakibat ketidak merataan pembangunan dan perekonomian secara terus-menerus yang akan berdampak dengan kesejahteraan masyarakat dan akan munculnya berbagai macam ketimpangan yang akan dengan mudah menciptakan berbagai konflik di dalam masyarakat.

Sampai dengan akhir tahun 2021 rekomendasi/masukan untuk mempertahankan pencapaian target IKU tersebut pada periode berikutnya, Kemenko Marves melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata, dapat diwujudkan melalui strategi:
 - Meningkatkan nilai investasi bidang jasa yang mendukung pertumbuhan dan manfaat ekonomi nasional;
 - Meningkatkan nilai investasi strategis yang mendukung pertumbuhan dan manfaat ekonomi nasional.
- b. Terbangunnya Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional sesuai target, dapat diwujudkan melalui strategi mengimplementasikan pembangunan pariwisata berkelanjutan pada destinasi prioritas.
- c. Meningkatkan konektivitas dan kinerja logistik yang akan menjamin kelancaran arus barang dengan kebijakannya adalah meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah.



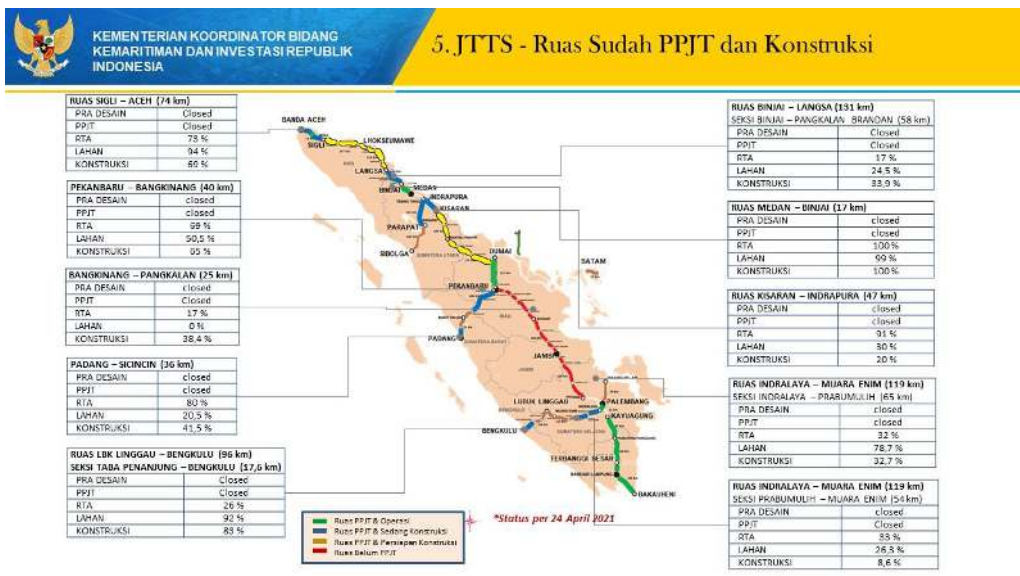
Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, TW 3 2021

Upaya lainnya yang telah dilakukan Kemenko Marves sesuai dengan tugasnya yaitu pembangunan di bidang kemaritiman dan investasi agar dapat mencapai target IKU ini diantaranya adalah:

- Menyelesaikan permasalahan dalam Percepatan Penyelesaian Pembebasan Lahan di 24 ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang ditargetkan dapat selesai pada akhir Desember 2021 dengan membentuk tim kerja yang dikuatkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 127 Tahun 2020 tentang Tim Kerja Percepatan dan Pengawasan Pembangunan Jalan.

Adapun keberhasilan yang telah dicapai sampai dengan triwulan III adalah sebagai berikut:

- Dari 24 ruas JTTS yang direncanakan, saat ini telah beroperasi baik sebagian maupun seluruh seksi sebanyak 9 ruas (Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Kayu Agung-Palembang-Betung (Seksi 1 dan 2 A), Terbangi Besar-Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, Bakauheni-Terbangi Besar, Sigli-Banda Aceh (Seksi 3 dan 4), Pekanbaru-Kandis dan Kandis-Dumai.
- Sebanyak 8 ruas saat ini sedang dilaksanakan konstruksi dan 1 ruas penyelesaian konstruksi, yaitu Bengkulu-Taba Penanjung (Seksi 1 Tol Bengkulu-Curup-LubukLinggau), Padang-Sicincin (Seksi 1 Tol Padang-Bukittinggi), Sp. Indralaya-Prabumulih (Seksi 1 Tol Sp. Indralaya-Lubuk Linggau), Binjai-Stabat (Seksi 1 Tol Binjai-Langsa), Pekanbaru-Bangkinang (Seksi 1 Tol Pekanbaru-Bukittinggi), Tebing Tinggi-PematangSiantar (Seksi 3 dan Seksi 4 Tol Tebing Tinggi-Sibolga), Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Indrapura, Indrapura-Kisaran dan penyelesaian Tol Sigli-Banda Aceh (Seksi 1 dan Seksi2).
- Sebanyak 4 ruas telah selesai tahap persiapan dan penetapan Penlok, namun belumdilulai tahapan pengadaan tanah yaitu Betung-Tempino-Jambi, Jambi-Rengat, Sigli-Lhokseumawe, dan Lhokseumawe-Langsa.
- Sebanyak 3 ruas dilaksanakan tahap persiapan dan penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), yaitu Pekanbaru-Rengat, Kisaran-Rantau Prapat, dan Rantau Prapat-Sp. Sigambal-Dumai.



Sumber: Kemenko Marves, September 2021



SS6. diukur dengan 2 IKU yaitu Indeks Kesehatan Laut dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2021 belum ditargetkan, capaian IKU ini seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 29. Capaian Kinerja SS.6 TW III

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW III	Capaian
7	Indeks Kesehatan Laut	7,14	n/a	n/a	n/a
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	7,14	n/a	n/a	n/a
Capaian SS.6					n/a

Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI)

Kesehatan Laut Indonesia adalah kondisi dimana laut Indonesia terjaga sehingga dapat bermanfaat sebagai produsen oksigen, pengaturan iklim, tempat sumber makanan, tempat hidup keanekaragaman hayati dan serta tempat sumber ekonomi. Terwujudnya Kesehatan Laut Indonesia untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Maritim adalah kondisi dimana kualitas laut Indonesia yang baik sehingga dapat menunjang pemanfaatan Sumber Daya Maritim.

Indeks kesehatan laut Indonesia (IKLI) merupakan alat pengukuran kondisi kesehatan laut Indonesia yang pengukurannya diadopsi dari ocean health index (OHI). Capaian nilai IKLI pada triwulan III tahun 2021 belum dapat disajikan (n/a) karena realisasi atas IKU ini akan dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021), sedangkan target dari IKLI yang harus dicapai tahun 2021 adalah 75.

Pengukuran IKLI berdasarkan dari 10 tujuan yang diadopsi dari OHI yang kemudian dari 10 tujuan tersebut dijabarkan menjadi variabel-variabel dan indikator yang menjadi instrument pengukuran sehingga didapatkan perhitungan index IKLI. Yang dimaksud pada 10 tujuan tersebut antara lain:



Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) adalah nilai yang menunjukkan parameter kondisi kesehatan laut, dan bagaimana pengelolaannya untuk keberlanjutan laut di masa depan. Tujuan indeks ini adalah mewujudkan ekosistem laut yang sehat serta mengevaluasi program dan kegiatan yang mendasari pencapaian tujuan tersebut. Indeks ini diharapkan dapat membangun kesadaran serta memberikan informasi kepada pemerintah dalam merumuskan dan menentukan kebijakan yang mempromosikan laut yang sehat.

Capaian atas IKU ini dihitung dengan formula :

IKLI Agregat = Nilai Variabel IKLI Tujuan 1+Nilai Variabel IKLI Tujuan 2+ Nilai Variabel IKLI Tujuan 3 + Nilai Variabel IKLI Tujuan 4+Nilai Variabel IKLI Tujuan 5+Nilai Variabel IKLI Tujuan 6+Nilai Variabel IKLI Tujuan 7+Nilai Variabel IKLI Tujuan 8+Nilai Variabel IKLI Tujuan 9+Nilai Variabel IKLI Tujuan 10

Penilaian atas indeks tersebut menggunakan range antara 0 s.d 100, dengan nilai terendah 0 dan nilai tertinggi 100. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kondisi kesehatan laut. Dalam penilaian IKLI dibutuhkan pendekatan penilaian untuk mengevaluasi kondisi laut saat ini secara komprehensif (menyeluruh) mulai dari sisi/ perspective sosial, ekonomi dan lingkungan alam. Laut yang sehat berdasarkan IKLI adalah laut yang dapat bermanfaat bagi manusia secara terus menerus (berlanjut) sampai masa mendatang. Indeks Kesehatan Laut Indonesia dihitung berdasarkan dari hasil akhir pengukuran Kesehatan laut berdasarkan dengan variabel pengukuran yang ditetapkan. Sepuluh goals dari Indeks Kesehatan Laut meliputi :

No.	Target/Tujuan	Variabel	K/L
1.	Sumber pangan	Ikan, Penangkapan, budidaya	KKP, MENKO MARITIM
2.	Mata pencaharian nelayan tradisional, skala kecil	Nelayan tradisional, akses ke sumberdaya, pendapatan, produksi, surplus produksi	KKP, MENKO MARITIM
3.	Produk alam lainnya	Produk farmasi, bahan baku industri, garam industri, garam konsumsi	DEPERIN, BUMN
4.	Sumber Carbon Biru	Luasan mangrove, kondisi mangrove, rehabilitasi, reboisasi, manajemen,	KKP, KLHK
5.	Perlindungan pesisir	terumbu karang, hutan pesisir, ekosistem lamun, reklamasi, konversi lahan pesisir	LIPI, BIG
6.	Keberlanjutan Ekonomi Kelautan	Perhubungan, transportasi, periklanan, industri maritim, pendapatan daerah/negara	DEPHUB, BPS, KKP
7.	Pariwisata	daya dukung, jumlah wisatawan, pendapatan RT, pendapatan daerah	DEP PARIWISATA
8.	kekhasan Ekosistem	Focal species, keragaman spesies, produksi spesies komersial, perlindungan tempat khusus, TURF, Sasi	LIPI, KKP, MENKO MARITIM
9.	Air bersih	Sampah plastik, micro-plastic, sampah lainnya, pembuangan limbah	MENKO, UNIVERSIAS LOKAL
10.	Keragaman Hayati	Keberlanjutan ekosistem, indeks keragaman spesies	LIPI, KKP, MENKO MARITIM

Penghitungan atas pencapaian nilai variabel dari masing-masing bobot (tujuan) seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 30. Nilai Variabel Masing-masing Bobot

No	Tujuan (Bobot Tujuan)	Nilai Variabel
1	Laut Sebagai Sumber Pangan	7,65
2	Perikanan Tradisional	7,27
3	Laut Sebagai Sumber Produk Alam	8,64
4	Laut Sebagai Penyimpan Karbon	7,66
5	Perlindungan Pesisir	5,05
6	Laut Sebagai Sumber Mata Pencarian	7,29
7	Laut Sebagai Penyedia Jasa Pariwisata dan Rekreasi	8,07
8	Perlindungan Spesies dan Tempat Ikonis	8,32
9	Perairan Yang Bersih	5,82
10	Keanekaragaman Hayati	10
IKLI Agregat		75,79

Sumber : Pedoman Pengukuran IKLI

Capaian nilai IKLI pada tahun 2020 adalah 75,79. Berdasarkan dari capaian nilai tersebut, target dari IKLI untuk tahun 2021 adalah 75. Sampai dengan triwulan III, belum dapat menampilkan realisasi atas target IKU ini, capaian pada IKU IKLI akan dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2020). Perbandingan capaian triwulan III tahun 2021 dan triwulan III tahun 2020 serta target akhir tahun 2021 seperti pada tabel berikut:

Tabel 31. Perbandingan Capaian dan Target Indikator 7

No	IKU	Realisasi TW III 2020	Realisasi TW III 2021	Target 2021	Target 2024
7	Indeks Kesehatan Laut	n/a	n/a	65	67

Seperti yang telah disampaikan pada laporan kinerja TW I tahun 2021 bahwa capaian progress yang adalah telah diputuskan 3 lokasi yang akan dijadikan sebagai pilot project pengukuran IKLI yang antara lain WPPNRI 711 (TWP Kep. Anambas dan SKPT Natuna), WPPNRI 715 (SKPT Morotai dan MIAMARI) dan WPPNRI 573 (TNP Sawu dan SKPT Rote Ndao). Selanjutnya pada Triwulan III ini, progress yang dicapai adalah telah berpartisipasi dalam pembahasan implementasi pedoman pengukuran indeks kesehatan laut Indonesia (IKLI). Pada kegiatan tersebut diinformasikan bahwa peran

penting IKLI antara lain sebagai dasar pengelolaan laut sehat dan sebagai salah satu kebijakan dalam penyusunan RZWP3K/RTRWP. Pusat Riset Kelautan KKP diharapkan dapat mengembangkan suatu konsepsi untuk mengukur posisi kesehatan laut Indonesia. Peran stakeholders (termasuk perguruan tinggi dan seluruh civitas akademika) sangat dibutuhkan untuk mendukung pengukuran IKLI di daerah (provinsi). Pengukuran IKLI di provinsi akan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pengukuran Ruang Laut melalui UPT di daerah dan dibutuhkan pula peran Kementerian Dalam Negeri serta perguruan tinggi setempat.

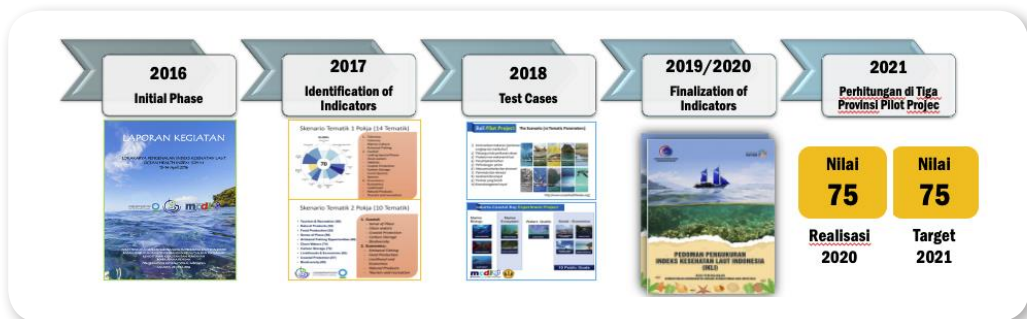
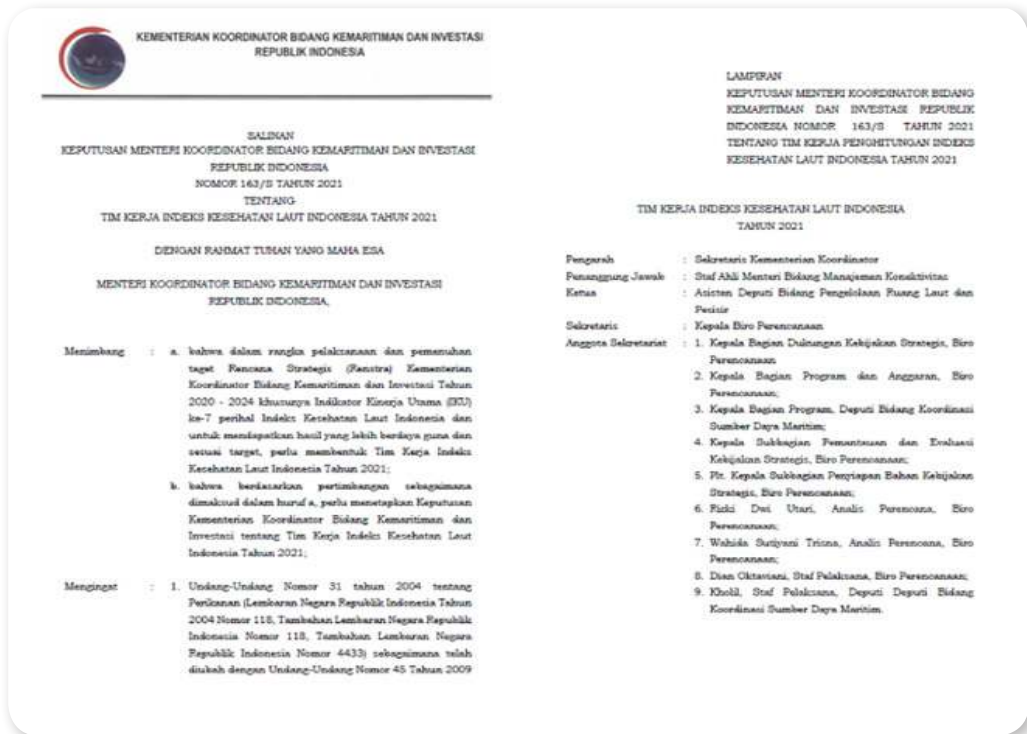
■ Lokasi Pilot Project Implementasi IKLI (Setiap Propinsi dan WPP Prioritas)



Gambar 9. Lokasi *Pilot Project* Implementasi IKLI

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target dari IKU ini sampai dengan triwulan III adalah:

- ❖ Berpartisipasi dalam pembahasan implementasi pedoman pengukuran indeks kesehatan laut Indonesia (IKLI);
- ❖ Koordinasi Teknis terkait pengelolaan kawasan konservasi laut/perairan;
- ❖ Koordinasi Persiapan Perhitungan IKLI 2021 dan Penyusunan Modul IKLI
- ❖ Diterbikannya SK Menko Marves Tentang Tim Kerja IKLI Tahun 2021;
- ❖ Terus mendorong upaya pencapaian IKU ini sejak tahun 2016, seperti terlihat di bawah ini:

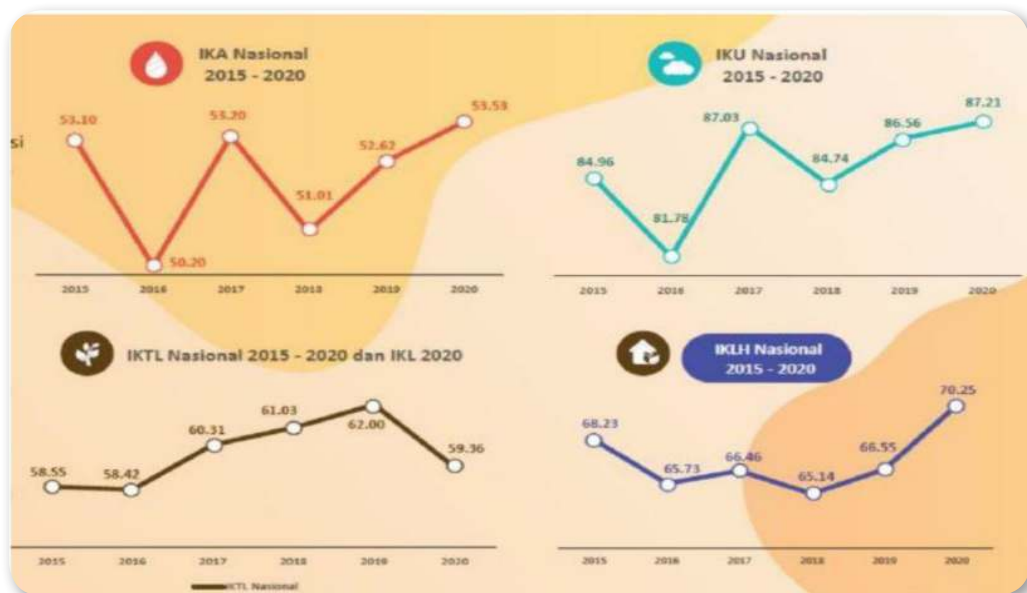


Permasalahan yang dihadapi adalah belum tersosialisasinya pedoman pengukuran IKLI kepada Pemda (direncanakan untuk kerja sama dengan kemendagri). Akan dilakukan upaya untuk mendorong Pemda agar dapat melaksanakan perhitungan nilai IKLI provinsi.

Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2021 guna tercapainya IKU ini adalah: Dilaksanakan FGD terkait penyusunan Modul IKLI; Pelaksanaan sinergitas penyusunan indeks efektifitas pengelolaan kawasan konservasi laut/perairan dengan indeks IKLI; Melakukan perhitungan IKLI Skala Nasional 2021; Melaksanakan sosialisasi IKLI kepada Pemda; Melakukan pengukuran IKLI di WPPNRI 711, 715 dan 573; Melakukan pengenalan IKLI kepada universitas sebagai pendamping Pemda dan melakukan internalisasi IKLI kepada BPS.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Nilai IKLH adalah indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas: (1) indeks kualitas udara (IKU); (2) indeks kualitas air (IKA); (3) indeks kualitas air laut (IKAL); (4) indeks kualitas tutupan lahan dan ekosistem Gambut (IKTL). Berdasarkan Laporan Kinerja KLHK 2020, sebagai perbandingan atas target IKLH tahun 2021, dapat kita lihat capaian tiap indikator dari tahun 2015 hingga 2020 seperti pada gambar berikut:



Gambar 10. Capaian IKLH, IKA, IKU, dan IKTL Tahun 2015 – 2020

Sampai dengan triwulan III tahun 2021, capaian atas IKU dimaksud seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 32. Perbandingan Capaian dan Target Indikator 8

No	IKU	Realisasi TW III 2020	Realisasi TW III 2021	Target 2021	Target 2024
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	n/a	n/a	67,33	68,53

Realisasi sampai dengan triwulan III, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum dapat kami sajikan (n/a), hal ini karena IKU tersebut ditargetkan tercapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021). Namun demikian upaya yang dilakukan untuk mencapai target IKU ini, Kemenko Marves terus melaksanakan koordinasi dengan K/L teknis guna mendorong pencapaian target IKU.

Keterkaitan dengan RPJMN tahun 2020 - 2024

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6 salah satunya terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dilakukan dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan arah kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJMN 2020-2024 meliputi:

1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut; (b) Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan; (c) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (d) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (e) Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Laut dan Pesisir, serta Pemantauan Kesehatan Ekosistem Laut; (f) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (g) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem melalui konservasi Kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah baik di daratan maupun perairan; serta (h) Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.
2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan: (a) Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; (b) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik; (c) Penghapusan dan Penggantian Merkuri, terutama di lokasi PESK; serta (d) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis secara terpadu.
3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; (c) Pemulihan Kerusakan Ekosistem dan Lingkungan Pesisir dan Laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; (d) Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah; serta (e) Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah.
4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (c) Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang SDA dan LH.

Faktor Penghambat/Tantangan atas pencapaian IKU

1. IKLH pada RPJMN 2020 – 2024 mengalami perubahan dalam dua indikator yakni:
 - a. Indeks Kualitas Air Laut; dan
 - b. Integrasi indeks kualitas ekosistem gambut terhadap Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Metodologi perhitungan IKLH yang baru masih dalam tahap proses pematangan oleh KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) per Desember 2020. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat melakukan intervensi berupa pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka mengawal proses finalisasi metodologi perhitungan IKLH yang baru.

2. Kemenko Marves telah melakukan koordinasi beberapa program dan kegiatan terkait untuk mendukung peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yakni:
 - a. Pengelolaan DAS Citarum
 - b. Penanganan Limbah B3
 - c. Penanganan sampah di Laut
 - d. Pengelolaan Ekosistem Mangrove
 - e. Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Gambut

Walaupun demikian, perlu kajian lebih lanjut mengenai korelasi antara program yang dilakukan tersebut terhadap peningkatan IKLH. Jenis IKLH ada tiga jenis namun tidak semua program dapat dilakukan intervensi atas seluruh jenis IKLH yakni IKU (Indeks Kualitas Udara). Sehingga, perlu dilakukan koordinasi lintas deputy di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait hal tersebut.

Model berbasis kerangka Pressure State Response yang memiliki indeks dan korelasi antar IKLH sebagai angka status lingkungan hidup perlu diadakan.

Adapun faktor pendukung atas pencapaian IKU ini adalah:

1. Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu deputy di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memiliki peran dan fungsi sebagai koordinator sehingga dapat mendukung pencapaian peningkatan IKLH salah satunya yakni terdapat pada IKU (Indikator Kinerja Utama) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dapat mendukung IKU RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan IKU KLHK.
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memiliki Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang fokusnya berhubungan dengan IKLH.

3. Pada Rapat Koordinasi Pengawasan IKLH yang dilakukan oleh Dirjen PPKL KLHK menyatakan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diminta untuk mengkoordinasikan dan mengawal program-program pembangunan Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan naiknya angka IKLH. Bentuknya dapat berupa tagging anggaran pembangunan bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
- c. Pembangunan Rendah Karbon.

Strategi untuk mewujudkan masing-masing arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJMN 2020-2024 meliputi:

1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan:
 - a. Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut;
 - b. Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim;
 - d. Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan;
 - e. Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Laut dan Pesisir, serta Pemantauan Kesehatan Ekosistem Laut;
 - f. Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup;
 - g. Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem melalui konservasi Kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah baik di daratan maupun perairan; serta
 - h. Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.

2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan:
 - a. Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - b. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik;
 - c. Penghapusan dan Penggantian Merkuri, terutama di lokasi PESK; serta
 - d. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis secara terpadu.
3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan:
 - a. Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut;
 - b. Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3;
 - c. Pemulihan Kerusakan Ekosistem dan Lingkungan Pesisir dan Laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 - d. Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah; serta
 - e. Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah.
4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan:
 - a. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah;
 - b. Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta
 - c. Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang SDA dan LH.



Tujuan dari SS.7 adalah peningkatan kontribusi ekonomi dari keempat sektor terhadap PDB nasional yang dinilai dapat menggambarkan peningkatan produksi dan nilai tambah dibidang kemaritiman dan investasi dari waktu ke waktu, keempat sektor dimaksud yaitu: Kehutanan dan Penebangan Kayu; Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; serta Pariwisata. SS.7 memiliki 2 IKU yaitu PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa dan Tingkat Komponen dalam Negeri. Capaian triwulan III tahun 2021 atas SS.7 seperti terlihat di bawah ini:

Tabel 33. Capaian Kinerja SS.7 TW III

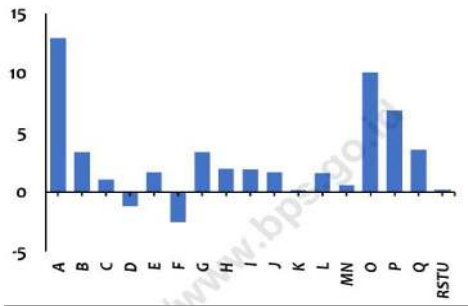
No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW III	Capaian
9	PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa	3.90	n/a	n/a	n/a
10	Tingkat Komponen Dalam Negeri	5.19	n/a	n/a	n/a
Capaian SS.7					n/a

PDB Sektor Sumberdaya Alam

Tujuan dari IKU ini adalah peningkatan kontribusi ekonomi dari keempat sektor terhadap PDB nasional dinilai dapat menggambarkan peningkatan produksi dan nilai tambah dibidang kemaritiman dan investasi dari waktu ke waktu. Pada tahun 2020 Kemenko Marves memiliki realisasi PDB Sektor Sumber Daya Alam dan Jasa dengan sebesar 12,13 sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan triwulan III, realisasinya belum dapat disajikan (n/a). Hal ini dikarenakan target dari IKU akan tercapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021).

Perekonomian Indonesia pada triwulan II/2021 mengalami pertumbuhan yang positif untuk pertama kali sejak adanya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, sebesar 7,07 persen (y-on-y). Kinerja positif tersebut melanjutkan perbaikan yang telah terjadi pada triwulan I 2021 (2,97 persen). Perbaikan ekonomi triwulan II/2021 ditopang oleh kinerja positif seluruh komponen lapangan usaha.

Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang tumbuh sebesar 20,39 persen. Namun laju pertumbuhan ini tidak mampu menahan terjadinya kontraksi ekonomi triwulan I/2021 sebesar 0,92 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha yang mengalami kontraksi di triwulan II/2021 diantaranya Lapangan Usaha F Konstruksi sebesar 2,51 persen, dan Lapangan Usaha D Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 1,17 persen.



Gambar 11. Laju Pertumbuhan PDB Triwulan II/2021 (q-to-q) Menurut Kategori (persen)

Sumber: BPS 2021 (PDB Indonesia Triwulanan)

Tahun 2021 sampai saat laporan kinerja ini disusun BPS belum merisis capaian PDB Sumberdaya Alam, sebagai gambaran atas capaian PDB SDA kami tampilkan capaian triwulan I dan II tahun 2021. Di triwulan II-2021, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 0,38 persen (y-on-y). Hal ini dipacu karena adanya peningkatan produksi perikanan dan peternakan serta unggas karena tingginya permintaan menjelang Idulfitri. Selain itu, pertumbuhan ini juga disebabkan oleh

peningkatan permintaan pada komoditas hortikultura dan kelapa sawit.

Jika di dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, Lapangan Usaha ini mengalami pertumbuhan sebesar 12,93 persen (q-to-q). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pada kuartal sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,22persen. Pertumbuhan ini disebabkan karena meningkatnya permintaan luar negeri untuk komoditas karet dan kakao.

Secara kumulatif, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 1,75 persen pada semester I/2021 (c-to-c). Pertumbuhan ini juga lebih tinggi dibandingkan pada semester I/2020 yang tumbuh 1,17 persen.



Grafik 11. Laju Pertumbuhan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2019-2021 (persen)



Grafik 12. Distribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Dalam PDB Triwulanan, 2019-2021 (persen)

Sumber: BPS 2021 (PDB Indonesia Triwulanan)

Tabel 34. PDB Triwulanan menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2021 (miliar Rp.)

Lapangan Usaha/Industry (1)	2021***	
	I (2)	II (3)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry, and Fishery	13,21	14,27
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/ Crop, Animal Production, Hunting and Related Service Activities	9,84	10,78
a. Tanaman Pangan/ Food Crops	3,04	3,07
b. Tanaman Hortikultura/ Horticultural Crops	1,52	1,71
c. Tanaman Perkebunan/ Plantation Crops	3,37	4,06
d. Peternakan/ Animal Production	1,71	1,73
e. Jasa Pertanian dan Perburuan/ Agriculture and Hunting Related Service Activities	0,20	0,20
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu/ Forestry and Logging	0,60	0,66
3 Perikanan/ Fishing	2,77	2,83
B Pertambangan dan Penggalian / Mining and Quarrying	7,64	8,09
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/ Extraction of Crude Petroleum, Natural Gas and Geothermal	2,62	2,60
2 Pertambangan Batubara dan Lignit / Mining of Coal and Lignite	2,41	2,79
3 Pertambangan Bijih Logam / Mining of Iron Ores	1,05	1,26
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya / Other Mining and Quarrying	1,56	1,45

Sumber: BPS 2021 (PDB Indonesia Triwulanan)

*** Angka sangat sangat sementara

Tabel 35. Distribusi Persentase PDB Triwulanan menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2021 (miliar Rp.)

Lapangan Usaha/Industry (1)		2021***		Jumlah/ Total (4)
		I (2)	II (3)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry, and Fishery	524 612,2	596 011,4	1 120.623,6
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/ Crop, Animal Production, Hunting and Related Service Activities	390 667,2	450 052,2	840.719,4
	a. Tanaman Pangan/ Food Crops	120 642,0	128 260,5	248.902,5
	b. Tanaman Hortikultura/ Horticultural Crops	60 228,8	71 545,4	131.774,2
	c. Tanaman Perkebunan/ Plantation Crops	133 945,7	169 648,7	303.594,4
	d. Peternakan/ Animal Production	67 831,1	72 191,2	140.022,3
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan/ Agriculture and Hunting Related Service Activities	8 019,6	8 406,4	16.426,0
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu/ Forestry and Logging	23 973,8	27 608,5	51.582,3
3	Perikanan/ Fishing	109 971,2	118 350,7	228.321,9
B	Pertambangan dan Penggalian / Mining and Quarrying	303 403,1	337 953,3	641.356,4
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/ Extraction of Crude Petroleum, Natural Gas and Geothermal	104 176,2	108 367,6	212.543,8
2	Pertambangan Batubara dan Lignit / Mining of Coal and Lignite	95 671,6	116 646,2	212.317,8
3	Pertambangan Bijih Logam / Mining of Iron Ores	41 565,8	52 531,0	94.096,8
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya / Other Mining and Quarrying	61 989,5	60 408,5	122.398,0

Sumber: BPS 2021 (PDB Indonesia Triwulanan)

*** Angka sangat sangat sementara

Untuk capaian PDB Sektor Sumberdaya Alam, dihitung dengan menggunakan formula:

Tabel 36. Formula Perhitungan PDB Sektor Sumberdaya Alam

No	PDB Lapangan Usaha	Kontribusi PDB (persen)	Unit Terkait
1	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.74	D4
2	Perikanan	2.74	D2
3	Pertambangan dan Penggalian		
	3.1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	2.1	D1
	3.2 Pertambangan Batubara dan Lignit	1.56	D6
	3.3 Pertambangan Bijih Logam	0.9	D6
	3.4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.6	D6
4	Pariwisata	2.49	D5
	Total	12.12	

Perbandingan capaian indikator ini dan target tahun 2021 seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 37 Perbandingan Capaian dan Target Indikator 9

No	IKU	Realisasi TW III 2020	Realisasi TW III 2021	Target 2021	Target 2024
9	PDB Sektor Sumberdaya Alam dan Jasa	n/a	n/a	16,31	17,73

PDB Sumber Daya Alam dan Jasa merupakan wujud persentase jumlah produksi yang dihasilkan di bidang sumber daya alam dan jasa maritim yang meliputi: produksi perikanan, hutan mangrove, produk kehutanan, terumbu karang, produksi mineral dan batubara produksi minyak dan gas bumi, produksi jasa yang dihasilkan dari pariwisata dan ekonomi kreatif. Indikator ini menggabungkan kontribusi (*share*) dari PDB sektor yaitu perikanan, kehutanan, pertambangan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Peningkatan kontribusi ekonomi dari keempat sektor terhadap PDB nasional dinilai dapat menggambarkan peningkatan produksi dan nilai tambah di bidang kemaritiman dan investasi dari waktu ke waktu.

Beberapa sektor PDB Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2021 terus didorong, sehingga dapat mencapai kontribusi sesuai dengan target dari IKU ini, adapun beberapa hal atas capaian kontribusi dan upaya lainnya yang telah dilakukan sampai dengan triwulan III, diantaranya sebagai berikut:

1. PDB Kehutanan

Kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun, akar dan getahnya merupakan parameter penunjang PDB sektor kehutanan. Terutama pada hasil hutan bukan kayu (HHBK), dimana produk utamanya bisa dipanen berulang, tanpa harus merusak atau mengeksploitasi tanamannya. Selain bahan yang menjadi produk, jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan system balas jasa atau kontrak juga termasuk dalam penghitungan PDB kehutanan.

Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia untuk sektor kehutanan meliputi: (1) KBLI 021, terdiri atas perusahaan Hutan yang berasal dari perusahaan Hutan Tanaman, Hutan Alam, dan HHBK; (2) KBLI 022 dalam bentuk penebangan dan pemungutan kayu; (3) KBLI 023 meliputi pemungutan HHBK; dan, (4) KBLI 024 meliputi jasa penunjang kehutanan.

Berdasarkan Laporan Kinerja KLHK tahun 2020, PDB sektor kehutanan menyumbang 108,63 triliun rupiah dan mencapai 19,93% terhadap target Renstra 2020-2024. Rencana Strategis KLHK Tahun 2020 – 2024 berkaitan dengan kontribusi terhadap PDB Nasional adalah:

Tabel 38. Capaian dan Target IKU Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional

Indikator	Realisasi TW III		Target	
	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional (Rp. Triliun)	n/a	109	112	115

Kemenko Marves terus mendorong agar Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional terus meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan. Khusus untuk PDB Kehutanan terus dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian antar K/L dan Lembaga terkait khususnya dalam bidang:

- Bidang Pengembangan dan Pemasaran Produk Hutan Produksi
- Bidang Pengembangan Jasa Lingkungan
- Bidang Pengendalian, Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan

Faktor penghambat/tantangan dan pendukung sampai dengan triwulan III terhadap capaian IKU dari sektor kehutanan yaitu:

1. Diperlukan regulasi yang mengatur integrasi sektor hulu dan hilir produk industri kehutanan, yang berfungsi meningkatkan pengawasan penggunaan kayu sekaligus menjaga ketersediaan bahan baku kayu bagi industri hilir.
2. Diperlukan kebijakan mendatori untuk penggunaan kayu legal pada pasar domestik, hal ini mendorong peningkatan PNPB dan kelestarian sumber daya hutan.
3. Perlu dibuka izin impor mesin *plywood* dalam keadaan tidak baru (BMTB), untuk meningkatkan penggunaan kayu hutan rakyat, serta mendorong produksi mesin *plywood* tersebut untuk diproduksi dalam negeri.
4. *Refocusing* anggaran di setiap K/L yang berperan dalam pengembangan jasa lingkungan IAD (*integrated area development*) Belitung, dan masih diperlukan sinkronisasi data di daerah dan K/L.

Kinerja sub sektor kehutanan pada triwulan III tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding periode yang sama pada tahun 2020. Peningkatan tersebut meliputi produksi kayu bulat, produksi kayu olahan, produksi HHBK dan nilai ekspor produk kehutanan.

Produksi kayu bulat baik dari Hutan Alam (HA) maupun Hutan Tanaman (HT) pada kuartal kedua tahun 2020 yaitu 11,56 juta meter kubik, menjadi 12,8 juta meter kubik pada kuartal kedua Tahun 2021, artinya meningkat 10,74 persen. Sementara, produksi kayu olahan, mengalami peningkatan 5,94% dibanding 2020.

Kemudian, nilai ekspor produk kehutanan secara akumulatif meningkat 70,33 %, dimana pada tahun 2020 yaitu USD 2,59 juta, menjadi USD 4,41 juta pada Tahun 2021. Sementara, produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada Tahun 2020 yaitu 130 ribu ton, dan kuartal kedua tahun 2021 yaitu 192 ribu ton, secara akumulatif meningkat 47,60 %.

Untuk percepatan peningkatan pertumbuhan sub sektor kehutanan, pemerintah melalui KLHK menerbitkan beberapa kebijakan antara lain:

- Relaksasi kebijakan fiskal,
- Percepatan implementasi UUCK dan turunannya, serta fasilitasi pembiayaan sertifikasi legalitas kayu untuk UMKM industri hasil hutan dan hutan rakyat.
- Melakukan promosi perdagangan dan kerja sama dengan mitra dagang,
- Serta menerapkan pelayanan berbasis digital kepada pelaku usaha.

Kebijakan-kebijakan tersebut telah dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sub sektor kehutanan pada kuartal kedua dibandingkan kuartal pertama pada Tahun 2021 dan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Agar kinerja sub sektor kehutanan dapat terus meningkat, Kemenko Marves dan PKLHK akan memperkuat strategi melalui sejumlah langkah-langkah strategis seperti:

- ❖ Melanjutkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan menjaga produktifitas dan keberlangsungan usaha, antara lain melalui penguatan insentif kebijakan fiskal.
- ❖ Percepatan Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya.
- ❖ Meningkatkan peran dan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan berbasis agroforestry dalam rangka peningkatan produktifitas hutan. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Perhutanan Sosial antara lain Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan kemitraan, untuk mendukung industri pengolahan hasil hutan dan industri lainnya.
- ❖ Meningkatkan pelayanan pemanfaatan hutan berbasis digital yang terintegrasi mulai dari Perencanaan, Produksi, Pembayaran PNBP, Peredaran, Pemasaran hingga Ekspor melalui penguatan Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SI-PHPL).

Prestasi lain yang dapat disampaikan adalah keberhasilan Indonesia dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta peningkatan nilai ekspor kehutanan, dan mendapatkan apresiasi dari dunia internasional atas prestasi tersebut.

Pengaruh terhadap pencapaian IKU ini adalah dengan adanya pengurangan anggaran melalui *refocusing*, membuat pola pekerjaan berubah dengan meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat virtual dan mengurangi kegiatan yang sifatnya fisik seperti kunjungan ke lapangan. Namun demikian secara keseluruhan tidak mengurangi volume output kegiatan.

2. PDB sektor pariwisata

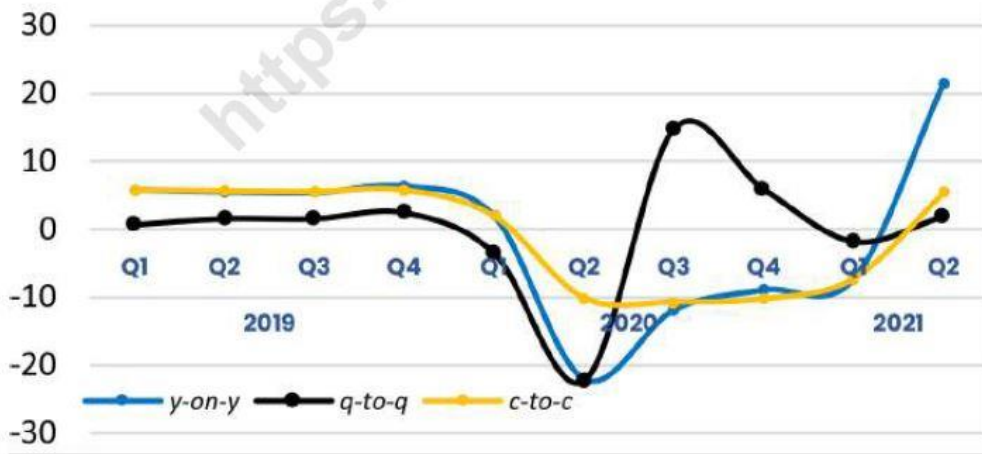
Persentase kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada PDB Indonesia mengalami kenaikan. Berdasarkan data BPS, pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami kenaikan sebesar 0.01%. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2020 persentase kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada PDB Indonesia adalah 2.55% dan pada triwulan I tahun 2021 adalah sebesar 2,56%.

Sampai dengan triwulan III (saat laporan ini disusun) BPS belum merilis capaian atas PDB ini. Sebagai gambaran bahwa untuk PDB sektor pariwisata seperti dijelaskan di atas bahwa capaian didukung oleh kontribusi penyediaan akomodasi dan makan minum. Sampai dengan triwulan II/2021, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami ekspansi yang cukup besar sebesar 21,58 persen (y-on-y). Pertumbuhan positif tersebut merupakan yang pertama kali terjadi dalam setahun terakhir.

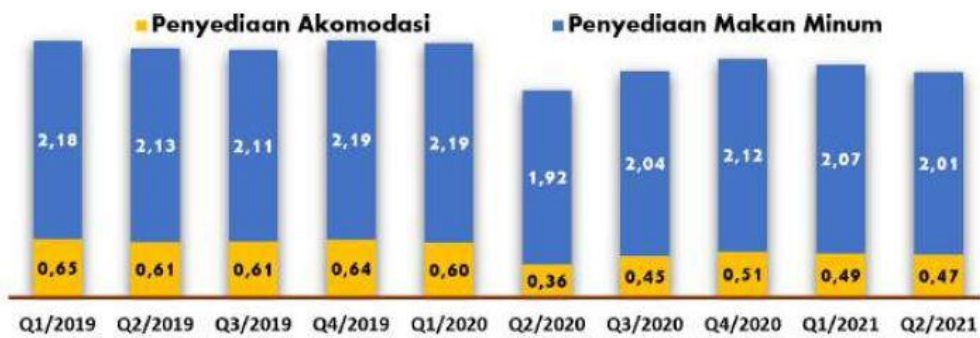
Sebelumnya, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami kontraksi sejak triwulan II/2020 akibat pandemi Covid 19. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan konsumsi makanan dan minuman selama Ramadan dan Idulfitri.

Bila dibandingkan dengan triwulan I/2021 (q-to-q), Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan sebesar 1,91 persen. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pada kuartal sebelumnya yang

terkontraksi 1,8 persen. Secara kumulatif Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan sebesar 5,35 persen pada semester I/2021 (c-to-c). Pertumbuhan ini juga lebih tinggi dibandingkan pada semester I/2020 yang berkontraksi 10,11 persen.



Grafik 13. Laju Pertumbuhan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 2019-2021 (persen)



Grafik 14. Distribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Dalam PDB Triwulanan, 2019-2021 (persen)s

Sumber: BPS 2021 (PDB Indonesia Triwulanan)

Tabel 39. Distribusi PDB Berdasarkan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2021***		
	I	II	Jumlah
Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman	76.794,6	78.258,6	155.053,2
1. Penyediaan Akomodasi	12.462,8	12.696,2	25.159,0
2. Penyediaan Makanan Minuman	64.331,8	65.562,4	129.894,2

*** Angka sangat sangat sementara

Sumber: BPS 2021 (PDB Indonesia Triwulanan)

Tabel 40. Laju Pertumbuhan (q-to-q) PDB Triwulanan menurut Lapangan Usaha, 2021 (persen)

Lapangan Usaha	2021***	
	I	II
Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman	-1,80	1,91
1. Penyediaan Akomodasi	-3,20	1,87
2. Penyediaan Makanan Minuman	-1,52	1,91

*** Angka sangat sangat sementara

Sumber: BPS 2021 (PDB Indonesia Triwulanan)

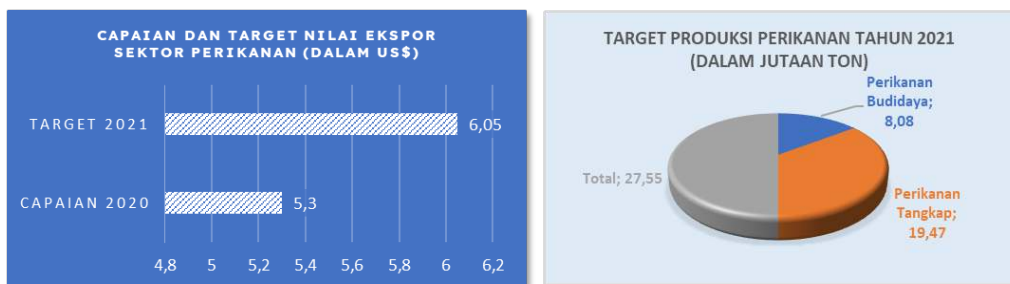
Sampai dengan triwulan III realisasi PDB dari sektor pariwisata (s.d laporan ini disusun) belum dirilis oleh BPS. Namun demikian Kemenko Marves untuk meningkatkan nilai devisa pariwisata ekonomi kreatif dan persentase kontribusi PDB pariwisata, Untuk meningkatkan nilai devisa pariwisata ekonomi kreatif dan persentase kontribusi PDB pariwisata, Kemenko Marves telah melakukan beberapa kegiatan sampai triwulan III 2021, diantaranya yaitu:

- ❖ Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Terumbu Karang Berkelanjutan;
- ❖ Koordinasi Perkembangan Platform Bangga Berwisata di Indonesia Aja;
- ❖ Koordinasi Awal Peningkatan Peringkat *Travel & Tourism Competitiveness Index* (TTCI);
- ❖ Koordinasi Tindak Lanjut Penyusunan Payung Hukum ICRG Nusa Dua;
- ❖ Diskusi work from bali dengan Garuda Indonesia;
- ❖ Kunjungan Kerja Menko Marves dan para Duta Besar perihal Pemulihan Pariwisata di Bali;
- ❖ Koordinasi Teknis Percepatan Pemulihan Perekonomian Bali melalui Skema “*Work from Bali*”;
- ❖ Koordinasi Teknis Pembentukan Tim Kajian Akademis Dalam Penyelenggaraan PES Nusa Dua;
- ❖ Koordinasi dan Kunjungan Lapangan ke Lokasi ICRG Nusa Dua, Bali;
- ❖ Peluncuran Program Indonesia *Spice Up the World di Expo 2020 Dubai*.

3. PDB Perikanan

Tercapainya produksi sumber daya maritim secara berkelanjutan adalah kondisi dimana produksi sumber daya maritim dalam aspek perikanan budidaya dan perikanan tangkap tersedia dan proses produksi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan mengoptimalkan nilai ekspor pada sektor perikanan. Capaian nilai produksi dan nilai ekspor tersebut disesuaikan pada Target RKP 2021. Secara berkelanjutan adalah kondisi yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan tanpa mengurangi potensi perikanan di masa yang akan datang dengan memperhatikan daya dukung ekosistem.

Capaian nilai ekspor sektor perikanan pada tahun 2020 adalah 5,30 US\$. Target produksi perikanan pada tahun 2021 adalah 27,55 juta ton dengan rincian 8,08 juta ton pada perikanan tangkap dan 19,47 juta ton pada perikanan budidaya. Target nilai ekspor sektor perikanan pada tahun 2021 adalah 6,05 US\$. Target tersebut telah disesuaikan pada Dokumen RKP 2021.



Sumber: BPS 2021

Guna pencapaian target kinerja upaya yang telah dilakukan sampai dengan triwulan III terkait produksi perikanan budidaya, produksi perikanan tangkap dan nilai tukar nelayan serta nilai ekspor produk perikanan, hal-hal yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

- ❖ Dilakukan Koordinasi pada Level Menteri dengan pembahasan terkait Target Produksi dan Ekspor Udang 2021-2024;
- ❖ Penyusunan masterplan tambak udang di lokus prioritas major project dan sinkronisasi lokus pengembangan kawasan pertambakan dengan dukungan jaringan irigasi teknis;
- ❖ Dilakukan pengembangan budidaya laut (Marikultur) terpadu di Seram Barat;
- ❖ Akselerasi produksi rumput laut Kab. Maluku Tenggara dan Akselerasi Produksi Rumput Laut di Kab. Tanimbar.

Perikanan Budidaya

Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya adalah suatu upaya untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya yang berkualitas, didukung oleh pengembangan kawasan yang berkelanjutan dengan dukungan sarana produksi (induk, benih, pakan dan obat)

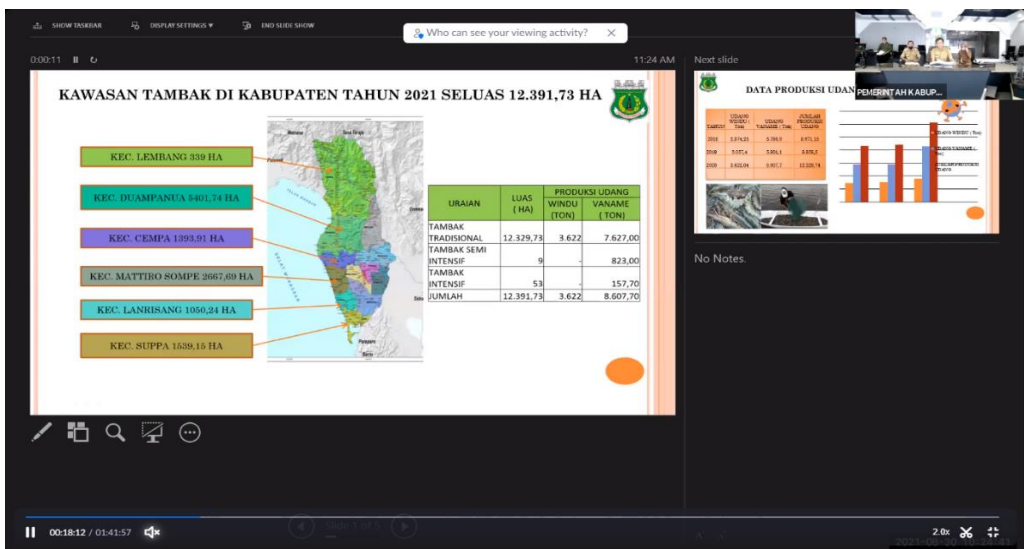
yang berkualitas dan sarana prasarana infrastruktur yang memadai pada kondisi yang optimal, yang ada kondisi dimana suatu capaian produksi perikanan budidaya berkualitas, berdaya dukung dan berkelanjutan secara ekologi, ekonomi dan sosial.

Berdasarkan perhitungan pemerintah bahwa produksi perikanan budidaya yang optimal untuk ikan budidaya 7.92 juta ton dan rumput laut 11.55 juta ton pada tahun 2021 (Perpres 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 pada Lampiran II) target tersebut merupakan peningkatan dari capaian pada Tahun 2020 yang sejumlah 15,45 Juta Ton.

Guna mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya telah dilaksanakan koordinasi terkait target produksi dan ekspor udang Tahun 2021-2024, penyusunan masterplan tambak udang pada Lokus Prioritas *Major Project* dan serta sinkronisasi lokus pengembangan kawasan pertambakan dengan dukungan jaringan irigasi teknis. Data dengan status sangat sementara, telah dilaporkan total produksi budidaya pada Triwulan II adalah sebesar 4.129.820 ton dengan total data sementara pada Triwulan I sebesar 4.082.895 ton, jumlah produksi komoditas budidaya adalah sebesar 8.212.715 ton.

Upaya untuk pencapaian target dari komoditas budidaya sampai dengan triwulan III adalah sebagai berikut:

- ❖ Pada tahun 2021 penyusunan DED dan Masterplan Klaster Tambak Udang 5 ha di 5 lokasi prioritas tidak jadi dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran DJPB.
- ❖ DJPB terkena *refocusing* anggaran sebesar 435 miliar rupiah, maka dari itu program – program diluar program pemulihan ekonomi nasional tidak jadi dilaksanakan, salah satunya adalah penyusunan DED dan masterplan



- ❖ Pada tahun 2022 akan dilaksanakan Revitalisasi tambak di 7 lokasi dengan total luasan 7000 ha yang berlokasi di Aceh, Lampung, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan Dll.
- ❖ Program revitalisasi tambak bukan seperti pembangunan klaster tambak yang dilakukan pada tahun 2020, tetapi pemberian bantuan pemerintah berupa pitap, sarana prasarana tambak (kincir), pengelolaan kesehatan ikan, benih udang, sosialisasi dan lain-lain
- ❖ Pada tahun 2022, DJPB juga akan membangun Shrimp Estate di Kab. Kebumen seluas 100 Ha. Program Kawasan tambak terintegrasi di kebumen sedang dalam tahapan DED dan dokumen pendukung dan akan dilakukan penelaahan oleh Bappenas pada bulan September/ Oktober.
- ❖ Telah dilaksanakan koordinasi lanjutan terkait Rencana Pengembangan Kawasan Tambak Berkelanjutan;
- ❖ Koordinasi teknis program revitalisasi tambak rakyat pada Provinsi Lampung, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah;
- ❖ Koordinasi kalkulasi pencapaian produksi udang nasional;
- ❖ Pembahasan strategi pengembangan benih rumput laut yang berkualitas dan berkesinambungan.

Tindak lanjut dalam upaya pencapaian target budidaya Perikanan adalah sebagai berikut:

- ❖ DJPB perlu melaporkan kegiatan –kegiatan yang tersisa setelah adanya refocusing anggaran
- ❖ DJPB perlu melaporkan lokasi dan luasan revitalisasi tambak yang akan dilakukan pada tahun 2022 dan
- ❖ Kemenko Marves akan mengirimkan surat terkait mengalokasikan anggaran untuk penyusunan masterplan klaster tambak udang di 5 lokasi prioritas pada anggaran 2022.

Produksi Perikanan Tangkap dan Nilai Tukar Nelayan:

- ❖ Progress lanjutan terkait Program M-Lin
- ❖ Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Ambon
- ❖ Koordinasi WPP Percontohan yang dilakukan pembahasan terkait PNPB sektor perikanan

Nilai Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan:

- ❖ Telah dilaksanakan koordinasi pembahasan kendala logistik pada produk ekspor;
- ❖ Penyelesaian kasus penolakan ekspor produk KP oleh GACC
- ❖ Kunjungan pangan pemantauan posisi dan kondisi kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak.

Sedangkan terkait perikanan tangkap, progres yang telah dicapai adalah:

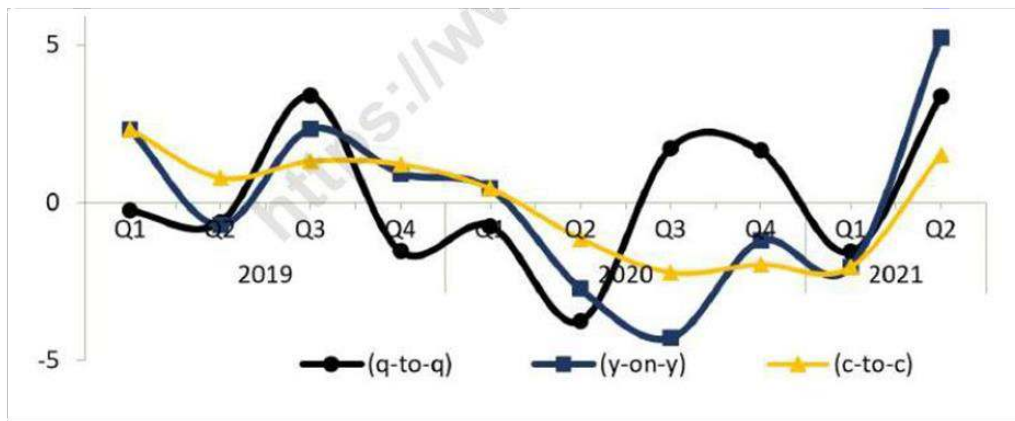
- ❖ Pengembangan M-Lin;
- ❖ Koordinasi implementasi kebijakan pemanfaatan kapal perikanan eks-moratorium;
- ❖ Koordinasi pada WPP Percontohan;
- ❖ Kesiapan ekspor di Biak dan dukungan sarana dan prasarana serta infrastruktur percepatan ekspor komoditas perikanan dari Tual.

4. PDB Pertambangan dan Penggalian

Sesuai data tahunan 2020, PDB Sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan IV mencapai 6,48, sedangkan untuk capaian tahunan yaitu 6,44. Capaian ini masih dipengaruhi oleh kondisi Pandemi covid 19 yang menyebabkan penurunan permintaan.

Capaian atas PDB Pertambangan dan Penggalian sampai dengan triwulan III tahun 2021 (sampai laporan kinerja ini disusun). BPS belum merilis. Sebagai gambaran capaian pada triwulan II/2021, untuk Pertambangan dan Penggalian tumbuh 5,22 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), didorong oleh peningkatan produksi tambang bijih logam seperti tembaga dan emas serta peningkatan ekspor barang galian.

Bila dibandingkan dengan triwulan I/2021 (q-to-q), Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian tumbuh 3,37 persen, didukung peningkatan produksi tambang bijih logam serta batubara.



Grafik 15. Laju Pertumbuhan Pertambangan dan Penggalian, 2019-2021 (persen)

Tingkat Komponen dalam Negeri

Tujuan dari IKU ini yaitu untuk mengetahui berapa persen TKDN dari produk-produk yang dihasilkan melalui pengembangan produk logam, mesin, elektronika, dan alat angkut dalam negeri. Penggunaan produk dalam negeri berupa barang dan jasa akan membangkitkan industri nasional dan akan menarik banyak investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam jangka panjang hal ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam negeri dan membentuk kemandirian dalam berusaha untuk peningkatan ekonomi. Tingkat Komponen Dalam Negeri dihitung dengan menggunakan formula:

Rata Rata Nilai TKDN pada Produk dalam negeri yang telah memiliki sertifikat TKDN.

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, gabungan barang dan jasa. Upaya ini dilakukan guna memacu produktivitas dan daya saing industri nasional di tengah kondisi perdagangan dunia yang cenderung tertutup.

Kemenko Marves mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri disemua sektor industri adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Hal ini sangat mendukung perkembangan dan penguatan industri dalam negeri melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Program P3DN ini sudah wajib diterapkan diberbagai sektor.

Guna mendukung IKU ini beberapa menjadi faktor pendukung baik internal maupun eksternal, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Sudah adanya tim pokja P3DN serta sistem pengaduan yang lebih terkoordinir.
- Adanya kepemimpinan, koordinasi, dan kerja sama tim yang baik di lingkup unit kerja eselon I maupun lintas eselon I. seperti diadakannya rakor internal serta evaluasi rutin didalam ruang lingkup deputi bidang koordinasi infrastruktur dan transportasi ataupun dengan unit kerja lain.
- Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antar Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves. Seperti dengan pemerintahan daerah, Kemenperin, dan seluruh instansi pemerintah yang mengelola sumber daya yang dikuasai negara dli.

Sedangkan faktor pendukung lainnya merupakan program yang memiliki sumbangsih besar untuk TKDN: Pembentukan pokja P3DN; Pembentukan aplikasi laporan P3DN; serta KBLBB.

Dengan adanya pandemic covid ini adanya pengaruh terhadap pelaksanaan program hal ini karena adanya refocusing anggaran sehingga yaitu tidak bisa melakukan koordinasi dan terutama pengendalian kebijakan secara langsung dilapangan secara tuntas. Pengaruh lainnya apabila IKU ini tidak tercapai maka akan sangat berpengaruh pada menurunnya penggunaan produksi dalam negeri dampaknya akan terasa hingga kebagian terkecil masyarakat, menimbulkan efek domino dalam roda perekonomian.

Rekomendasi/masukan langkah-langkah untuk mempertahankan pencapaian target IKU tersebut pada periode berikutnya adalah dengan mengoptimalkan pelayanan terutama dalam pengoperasian aplikasi P3DN; mendorong peningkatan sertifikasi TKDN.

Perbandingan atas capaian target IKU ini dengan periode sebelumnya (tahun 2020), target capaian TKDN di renstra sampai dengan tahun 2024 tercapai 50 dan target IKU TKDN pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 adalah tercapai nilai 45. Sampai dengan saat ini belum dapat dikatakan bahwa target sudah tercapai/belum dikarenakan tahun 2021 belum berakhir, namun melihat situasi dan kondisi saat ini peran deputi bidang koordinasi infrastruktur dan transportasi sudah banyak melakukan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian yang cukup efektif. Terutama data realisasi target capaian di TW II yaitu sebesar 45,15%. Sebagai perbandingan bahwa realisasi triwulan III tahun 2021 dan triwulan III 2020 serta target akhir tahun 2021 dari indikator TKDN sebagai berikut:

Tabel 41. Perbandingan Capaian dan Target Indikator 10

No	IKU	Realisasi TW III 2020	Realisasi TW III 2021	Target 2021	Target 2024
10	Tingkat Komponen Dalam Negeri	n/a	n/a	45	50

Upaya yang telah dilakukan sampai dengan triwulan III dalam mendorong penggunaan komponen dalam negeri disemua sektor industri selain dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Hal ini sangat mendukung perkembangan dan penguatan industri dalam negeri dengan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Program P3DN ini sudah wajib diterapkan diberbagai sektor. Capaian pelaksanaan pemantauan P3DN triwulan III tahun 2021, yaitu:

- ❖ Pembentukan Tim Pelaksana dan Penyusunan prosedur Operasional Standar Pokja Pemantauan P3DN;
- ❖ Penyelesaian Permasalahan Conductor Pipe Pertamina Lawe-lawe
- ❖ Penyelesaian Permasalahan Offshore Pipe Pertamina RDMP Balikpapan
- ❖ Penandatanganan Nota Kesepahaman implementasi P3DN di Lingkungan PLN antara PLN dan BPPT
- ❖ Revisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/2020 tentang Spesifikasi, Peta jalan Pengembangan dan Ketentuan Penghitungan TKDN KBLBB
- ❖ Pemetaan Potensi Kemampuan Industri Dalam Negeri Industri Maritim
- ❖ Pemetaan Potensi Kemampuan Industri Dalam Negeri Komponen Perkeretaapian
- ❖ Telah dilaksanakan sertifikasi TKDN gratis sebanyak 1.000 sertifikat di tahun 2020, dan sebanyak 2.253 produk hingga bulan Juni 2021, total 3.253 sertifikat (Tercapai 32,5 %).

Selain itu inovasi/upaya lain dalam mendorong P3DN yang dilakukan Kemenko Marves sampai dengan triwulan III meliputi:

- ❖ Dikembangkan integrasi sistem database selanjutnya dengan SIRUP LKPP untuk produk ber TKDN,
- ❖ Pengembangan sistem integrasi dengan database produk dalam negeri di setiap K/L/BUMN (SIMPKE PU PR, ESDM, AML Pertamina/PLN),
- ❖ Pengembangan sistem integrasi perijinan/fasilitasi impor produk (BKPM, Kemenkeu, Bea Cukai)
- ❖ Sistem pengaduan P3DN terintegrasi di seluruh K/L/PD/BUMN/BUMD
- ❖ Tindak lanjut pemantauan pembentukan Tim P3DN di setiap K/L/BUMN/SKPD:
- ❖ Rekapitulasi K/L/BUMN/SKPD yang sudah dan yang belum membentuk Tim P3DN
- ❖ Finalisasi sistem pelaporan terpadu pengaduan/pelanggaran P3DN
- ❖ Pengawasan BPKP terhadap peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), dilakukan terhadap kemandirian Industri Farmasi dan Industri Energi.
- ❖ Mendorong potensi belanja barang dan belanja modal pemerintah pusat tahun 2021 mencapai Rp. 607.7 Trilyun dioptimalkan sebagai peluang pasar Produk Dalam Negeri
- ❖ Dilaksanakan sertifikasi lanjutan hingga 10 ribu produk.



Maksud dari SS8. Menguatnya Jati Diri Indonesia Sebagai Bangsa Bahari adalah bertambah kuatnya jiwa semangat, daya gerak, budaya, ciri khas bangsa Indonesia yang bercirikan/ berkaitan dengan kelautan. SS8 memiliki 1 IKU yaitu Indeks Kapabilitas Inovasi (*Global Innovation Index (GII)*), indeks ini berdasarkan data dari *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, *Cornell University* dan *INSEAD*. *GII* adalah proyek yang terus berkembang dengan menggabungkan data sebelumnya dan data baru yang tersedia serta menjadi salah satu referensi terkemuka untuk mengukur kinerja inovasi ekonomis, serta tingkat perkembangannya menjadi alat pembandingan berharga yang dapat memfasilitasi dialog publik atau swasta dimana para pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengevaluasi kemajuan inovasi dari suatu negara setiap tahunnya. Capaian indeks kapabilitas inovasi triwulan III tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 42. Capaian Kinerja SS.8 TW III

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW III	Capaian (%)
11	Indeks Kapabilitas Inovasi	5.19	38,6	27,1	70,21
Capaian Kinerja SS 8		5.19	38,6	27,1	70,21

Pada bulan September 2021 kolaborasi antara Universitas Cornell dan INSEAD, dan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) kembali merilis peringkat atas Indeks Kapabilitas Inovasi (*Global Innovation Index* (GII)). Tahun 2021 Indonesia berada pada peringkat 87 dari 132 negara dengan perolehan nilai 27,1, walaupun secara nilai ada peningkatan 0,61 poin namun secara peringkat menurun dari tahun sebelumnya (2020) yaitu berada diperingkat 85 dengan nilai 26,49. Capaian atas IKU tahun 2021 sebesar 70,21% (nilai 27,1), capaian ini jauh dari target IKU pada tahun 2021, yaitu 38,6.

Korea Selatan kembali ke posisi pertama, dan Singapura mencuat sebagai “runner-up” dalam Indeks Inovasi tahun 2021 ini, sementara Amerika Serikat justru terlempar dari 10 besar dunia yang didominasi oleh negeri-negeri Eropa dan Israel. Korea mendapatkan kembali mahkota dari Jerman, yang turun ke posisi keempat. Dengan demikian, negara-negara dan bangsa-bangsa Asia kini telah menduduki puncak indeks inovasi selama tujuh dari sembilan tahun terakhir.

Negara-negara tetangga ASEAN kita yang “rankingnya semula bertetangga” dengan Indonesia, saat ini jauh melesat meninggalkan Indonesia; Viet Nam sekarang di ranking # 42, dan bahkan Filipina juga berhasil melesat dari ranking # 100 ke ranking # 50! Indonesia di ASEAN, hanya lebih baik dari Cambodia dan Myanmar di barisan paling bawah.

GII 2021 rankings in Asia (excluding Western Asia)

Rank	Top 15	Rank	Top 50	Rank	Top 60	Rank	Top 100	Rank	Top 130
5	Republic of Korea	36	Malaysia	51	Philippines	79	Kazakhstan	103	Tajikistan
8	Singapore	43	Thailand	58	Mongolia	82	Brunei Darussalam	109	Cambodia
12	China	44	Viet Nam	60	Iran (Islamic Republic of)	86	Uzbekistan	111	Nepal
13	Japan	46	India			87	Indonesia	116	Bangladesh
14	Hong Kong, China					95	Sri Lanka	117	Lao People's Democratic Republic
						98	Kyrgyzstan		
						99	Pakistan	127	Myanmar

Source: Global Innovation Index Database, WIPO, 2021

Global Innovation Index 2021 rankings

GII rank	Economy	Score	Income group rank	Region rank	GII rank	Economy	Score	Income group rank	Region rank
1	Switzerland	65.5	1	1	67	Colombia	31.7	17	6
2	Sweden	63.1	2	2	68	Qatar	31.5	45	7
3	United States of America	61.3	3	1	69	Armenia	31.4	18	8
4	United Kingdom	59.8	4	3	70	Peru	31.2	19	7
5	Republic of Korea	59.3	5	1	71	Tunisia	30.7	7	9
6	Netherlands	58.6	6	4	72	Kuwait	29.9	46	10
7	Finland	58.4	7	5	73	Argentina	29.8	20	8
8	Singapore	57.8	8	2	74	Jamaica	29.6	21	9
9	Denmark	57.3	9	6	75	Bosnia and Herzegovina	29.6	22	38
10	Germany	57.3	10	7	76	Oman	29.4	47	11
11	France	55.0	11	8	77	Morocco	29.3	8	12
12	China	54.8	1	3	78	Bahrain	28.8	48	13
13	Japan	54.5	12	4	79	Kazakhstan	28.6	23	3
14	Hong Kong, China	53.7	13	5	80	Azerbaijan	28.4	24	14
15	Israel	53.4	14	1	81	Jordan	28.3	25	15
16	Canada	53.1	15	2	82	Brunei Darussalam	28.2	49	13
17	Iceland	51.8	16	9	83	Panama	28.0	50	10
18	Austria	50.9	17	10	84	Albania	28.0	26	39
19	Ireland	50.7	18	11	85	Kenya	27.5	9	3
20	Norway	50.4	19	12	86	Uzbekistan	27.4	10	4
21	Estonia	49.9	20	13	87	Indonesia	27.1	27	14
22	Belgium	49.2	21	14	88	Paraguay	26.4	28	11
23	Luxembourg	49.0	22	15	89	Cabo Verde	25.7	11	4
24	Czech Republic	49.0	23	16	90	United Republic of Tanzania	25.6	12	5
25	Australia	48.3	24	6	91	Ecuador	25.4	29	12
26	New Zealand	47.5	25	7	92	Lebanon	25.1	30	16
27	Malta	47.1	26	17	93	Dominican Republic	25.1	31	13
28	Cyprus	46.7	27	2	94	Egypt	25.1	13	17
29	Italy	45.7	28	18	95	Sri Lanka	25.1	14	5
30	Spain	45.4	29	19	96	El Salvador	25.0	15	14
31	Portugal	44.2	30	20	97	Trinidad and Tobago	24.8	51	15
32	Slovenia	44.1	31	21	98	Kyrgyzstan	24.5	16	6
33	United Arab Emirates	43.0	32	3	99	Pakistan	24.4	17	7
34	Hungary	42.7	33	22	100	Namibia	24.3	32	6
35	Bulgaria	42.4	2	23	101	Guatemala	24.1	33	16
36	Malaysia	41.9	3	8	102	Rwanda	23.9	1	7
37	Slovakia	40.2	34	24	103	Tajikistan	23.9	2	8
38	Latvia	40.0	35	25	104	Bolivia (Plurinational State of)	23.4	18	17
39	Lithuania	39.9	36	26	105	Senegal	23.3	19	8
40	Poland	39.9	37	27	106	Botswana	22.9	34	9
41	Turkey	38.3	4	4	107	Malawi	22.9	3	10
42	Croatia	37.3	38	28	108	Honduras	22.8	20	18
43	Thailand	37.2	5	9	109	Cambodia	22.8	21	15
44	Viet Nam	37.0	1	10	110	Madagascar	22.5	4	11
45	Russian Federation	36.6	6	29	111	Nepal	22.5	22	9
46	India	36.4	2	1	112	Ghana	22.3	23	12
47	Greece	36.3	39	30	113	Zimbabwe	21.9	24	13
48	Romania	35.6	40	31	114	Côte d'Ivoire	21.0	25	14
49	Ukraine	35.6	3	32	115	Burkina Faso	20.5	5	15
50	Montenegro	35.4	7	33	116	Bangladesh	20.2	26	10
51	Philippines	35.3	4	11	117	Lao People's Democratic Republic	20.2	27	16
52	Mauritius	35.2	41	1	118	Nigeria	20.1	28	16
53	Chile	35.1	42	1	119	Uganda	20.0	6	17
54	Serbia	35.0	8	34	120	Algeria	19.9	29	18
55	Mexico	34.5	9	2	121	Zambia	19.8	30	18
56	Costa Rica	34.5	10	3	122	Mozambique	19.7	7	19
57	Brazil	34.2	11	4	123	Cameroon	19.7	31	20
58	Mongolia	34.2	5	12	124	Mali	19.5	8	21
59	North Macedonia	34.1	12	35	125	Togo	19.3	9	22
60	Iran (Islamic Republic of)	32.9	13	2	126	Ethiopia	18.6	10	23
61	South Africa	32.7	14	2	127	Myanmar	18.4	32	17
62	Belarus	32.6	15	36	128	Benin	18.0	33	24
63	Georgia	32.4	16	5	129	Niger	17.8	11	25
64	Republic of Moldova	32.3	6	37	130	Guinea	16.7	12	26
65	Uruguay	32.2	43	5	131	Yemen	15.4	13	19
66	Saudi Arabia	31.8	44	6	132	Angola	15.0	34	27

Source: Global Innovation Index Database, WIPO, 2021.

Note: For an explanation of classifications, see Economy profiles, note 1.

High-income	Europe	South East Asia, East Asia, and Oceania	Northern Africa and Western Asia
Upper middle-income	Northern America	Central and Southern Asia	Sub-Saharan Africa
Lower middle-income	Latin America and the Caribbean		
Low-income			

Indonesia

GII 2021 rank

87

Output rank	Input rank	Income	Region	Population (mn)	GDP, PPP\$ (bn)	GDP per capita, PPP\$	GII 2020 rank
84	87	Upper middle	SEA0	273.5	3,328.3	12,345	85

		Score/ Value	Rank			Score/ Value	Rank
	Institutions	51.2	107		Business sophistication	17.5	110
1.1	Political environment	58.5	64	5.1	Knowledge workers	8.0	126
1.1.1	Political and operational stability*	66.1	74	5.1.1	Knowledge-intensive employment, %	11.3	106
1.1.2	Government effectiveness*	54.7	59	5.1.2	Firms offering formal training, %	7.7	97
1.2	Regulatory environment	20.4	131	5.1.3	GERD performed by business, % GDP	0.0	83
1.2.1	Regulatory quality*	41.1	76	5.1.4	GERD financed by business, %	8.0	80
1.2.2	Rule of law*	37.7	82	5.1.5	Females employed w/advanced degrees, %	6.3	87
1.2.3	Cost of redundancy dismissal	57.8	129	5.2	Innovation linkages	20.7	64
1.3	Business environment	74.6	52	5.2.1	University-industry R&D collaboration*	58.4	27
1.3.1	Ease of starting a business*	81.2	108	5.2.2	State of cluster development and depth†	61.9	23
1.3.2	Ease of resolving insolvency*	68.1	35	5.2.3	GERD financed by abroad, % GDP	0.0	99
				5.2.4	Joint ventures/strategic alliance deals/bn PPP\$ GDP	0.0	113
				5.2.5	Patent families/bn PPP\$ GDP	0.0	99
	Human capital and research	22.4	91	5.3	Knowledge absorption	23.9	73
2.1	Education	35.4	106	5.3.1	Intellectual property payments, % total trade	0.9	44
2.1.1	Expenditure on education, % GDP	3.6	82	5.3.2	High-tech imports, % total trade	8.9	48
2.1.2	Government funding/pupil, secondary, % GDP/cap	10.5	90	5.3.3	ICT services imports, % total trade	1.6	48
2.1.3	School life expectancy, years	13.6	74	5.3.4	FDI net inflows, % GDP	2.0	78
2.1.4	PISA scales in reading, maths and science	381.9	72	5.3.5	Research talent, % in businesses	7.5	65
2.1.5	Pupil-teacher ratio, secondary	15.2	74		Knowledge and technology outputs	18.3	74
2.2	Tertiary education	21.5	93	6.1	Knowledge creation	9.5	81
2.2.1	Tertiary enrolment, % gross	36.3	78	6.1.1	Patents by origin/bn PPP\$ GDP	0.9	65
2.2.2	Graduates in science and engineering, %	19.4	76	6.1.2	PCT patents by origin/bn PPP\$ GDP	0.0	96
2.2.3	Tertiary inbound mobility, %	0.1	109	6.1.3	Utility models by origin/bn PPP\$ GDP	0.7	27
2.3	Research and development (R&D)	10.4	57	6.1.4	Scientific and technical articles/bn PPP\$ GDP	1.5	128
2.3.1	Researchers, FTE/mn pop.	216.0	80	6.1.5	Citable documents H-index	14.5	56
2.3.2	Gross expenditure on R&D, % GDP	0.2	89	6.2	Knowledge impact	31.8	58
2.3.3	Global corporate R&D investors, top 3, mn US\$	0.0	41	6.2.1	Labor productivity growth, %	1.3	36
2.3.4	QS university ranking, top 3*	34.9	34	6.2.2	New businesses/1h pop. 15-64	0.3	106
				6.2.3	Software spending, % GDP	0.4	27
	Infrastructure	41.4	68	6.2.4	ISO 9001 quality certificates/bn PPP\$ GDP	2.0	88
3.1	Information and communication technologies (ICTs)	60.9	80	6.2.5	High-tech manufacturing, %	31.9	41
3.1.1	ICT access*	55.4	84	6.3	Knowledge diffusion	13.7	74
3.1.2	ICT use*	45.1	92	6.3.1	Intellectual property receipts, % total trade	0.0	72
3.1.3	Government's online service*	68.2	72	6.3.2	Production and export complexity	44.2	61
3.1.4	E-participation*	75.0	57	6.3.3	High-tech exports, % total trade	3.1	47
3.2	General infrastructure	36.1	36	6.3.4	ICT services exports, % total trade	0.6	95
3.2.1	Electricity output, GWh/mn pop.	1,090.5	96		Creative outputs	17.5	91
3.2.2	Logistics performance*	51.2	45	7.1	Intangible assets	24.3	88
3.2.3	Gross capital formation, % GDP	33.0	17	7.1.1	Trademarks by origin/bn PPP\$ GDP	12.2	106
3.3	Ecological sustainability	27.2	69	7.1.2	Global brand value, top 5,000, % GDP	30.0	44
3.3.1	GDP/unit of energy use	14.4	28	7.1.3	Industrial designs by origin/bn PPP\$ GDP	0.5	83
3.3.2	Environmental performance*	37.8	96	7.1.4	ICTs and organizational model creation†	65.4	27
3.3.3	ISO 14001 environmental certificates/bn PPP\$ GDP	0.6	78	7.2	Creative goods and services	12.0	74
				7.2.1	Cultural and creative services exports, % total trade	0.0	94
	Market sophistication	48.5	57	7.2.2	National feature films/mn pop. 15-69	0.6	95
4.1	Credit	33.6	95	7.2.3	Entertainment and media market/1h pop. 15-69	3.1	50
4.1.1	Ease of getting credit*	70.0	44	7.2.4	Printing and other media, % manufacturing	0.9	65
4.1.2	Domestic credit to private sector, % GDP	37.8	84	7.2.5	Creative goods exports, % total trade	2.2	27
4.1.3	Microfinance gross loans, % GDP	0.0	67	7.3	Online creativity	9.3	98
4.2	Investment	24.0	92	7.3.1	Generic top-level domains (TLDs)/1h pop. 15-69	1.5	89
4.2.1	Ease of protecting minority investors*	70.0	36	7.3.2	Country-code TLDs/1h pop. 15-69	0.7	94
4.2.2	Market capitalization, % GDP	48.2	35	7.3.3	Wikipedia edits/mn pop. 15-69	32.9	96
4.2.3	Venture capital investors, deals/bn PPP\$ GDP	0.0	65	7.3.4	Mobile app creation/bn PPP\$ GDP	4.5	57
4.2.4	Venture capital recipients, deals/bn PPP\$ GDP	0.0	59				
4.3	Trade, diversification, and market scale	87.8	6				
4.3.1	Applied tariff rate, weighted avg., %	2.0	55				
4.3.2	Domestic industry diversification	94.8	27				
4.3.3	Domestic market scale, bn PPP\$	3,328.3	7				

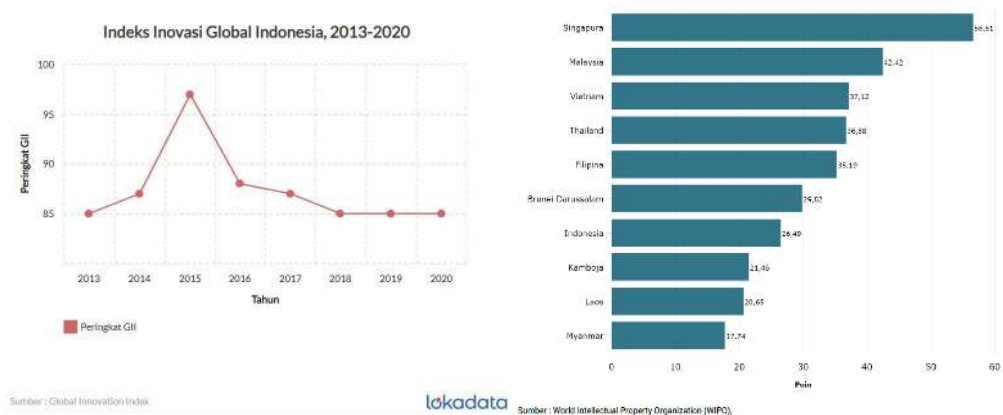
NOTES: ● indicates a strength; ○ a weakness; ◆ an income group strength; ◇ an income group weakness; * an index; † a survey question. ⊙ indicates that the economy's data are older than the base year; see appendices for details, including the year of the data, at <http://globalinnovationindex.org>. Square brackets [] indicate that the data minimum coverage (DMC) requirements were not met at the sub-pillar or pillar level.

Seperti terlihat di atas bahwa Skor tersebut dihitung berdasarkan inovasi suatu negara pada institusi, pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, kebaruan dalam bisnis dan pasar, serta hasil dari inovasi itu. Menurut WIPO, keterlibatan negara dalam rantai pasok global juga mampu meningkatkan inovasinya.

Selain itu Indeks Inovasi juga menganalisis lusinan kriteria menggunakan tujuh tolok ukur, antara lain pengeluaran penelitian dan pengembangan, kemampuan manufaktur, dan upaya-upaya perusahaan publik berteknologi tinggi. Peringkat Indeks Inovasi Global sungguh menggambarkan gerakan inovasi di seluruh dunia; di mana perjuangan melawan Covid-19 telah memicu dan mengakselerasi inovasi secara luar-biasa. Ini termasuk berbagai upaya inovasi berbagai pemerintah negara-negara dalam mengatasi pandemi, hingga “keterpaksaan” membangun infrastruktur digital agar bisa survive di era pandemi, dan juga perlombaan global untuk mengembangkan vaksin untuk mengendalikan pandemi dengan berbagai terobosan inovasi disruptif.

Sekalipun kita patut bersyukur bahwa dalam musibah pandemi Covid-19, Indonesia tergolong paling sedikit menjadi korban; karena sampai saat ini kita masih berada di urutan 19 dari 20 negara besar, kalau diukur berdasarkan banyaknya warga yang terinfeksi. Bahkan selalu menjadi yang terendah dalam tingkat kematian per sejuta penduduk. Namun pada saat yang sama, seharusnya merasa sangat (krisis) melihat ranking inovasi kita di atas. Apalagi persis di depan mata kita, ada “sebutir” negeri kota (nampak jelas di seberang P. Batam kita), yaitu Singapura, yang justru bisa membuktikan diri sebagai Jawara Inovasi terhebat dunia.

Posisi Indonesia tahun 2020 dan 2019 lalu juga berada di urutan ke-85, namun dengan skor lebih tinggi, 29,72. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 perolehan nilai tahun 2021 lebih rendah (27,1), sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini:



Grafik 15. Indeks Inovasi Indonesia tahun 2013 s.d 2020

Perbandingan capaian atas indikator ini adalah sebagai berikut:

Tabel 43. Perbandingan Capaian dan Target Indikator 11

No	IKU	Realisasi TW III 2020	Realisasi TW III 2021	Target 2021	Target 2024
11	Indeks Kapabilitas Inovasi	26,49	27,1	38,6	41,5

Skor tinggi Indonesia ada dalam 4 pilar dari 7 pilar penilaian Global Innovation Index, yaitu (1) Infrastruktur, (2) kecanggihan pasar, (3) keluaran pengetahuan dan teknologi, (4) keluaran kreatif. Sebaliknya Indonesia berada di bawah rata-rata pada 3 pilar, (1) institusi, (2) sumber daya manusia dan penelitian, dan (3) kecanggihan bisnis. Namun dengan adanya pencapaian ini, masyarakat Indonesia tidak lengah, sumber daya sudah ada dan harus mengelola semua potensi yang ada.

Untuk mendongkrak peringkat GII Indonesia lebih baik pada tahun mendatang dan meraih impian Indonesia Emas 2045 guna unjuk gigi di percaturan Jawara Inovasi Global, upaya yang dilakukan sampai dengan triwulan IV 2021 yaitu:

1. Kemenko Marves mendorong K/L teknis dengan melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan agar semakin ditingkatkan serta melaksanakan pemantauan major project secara berkala.
2. Mendorong pelaksanaan kompetisi *The Challengers* "Inovasi Indonesia", ajang para inovator Indonesia agar rutin diadakan setiap tahun, sebagai ajang menciptakan inovasi baru.
3. Menggelar *Focus Group Discussion* dalam upaya mengevaluasi *Global Innovation Index* Indonesia secara berkala.



Evaluasi terhadap penilaian *Global Innovation Index* Indonesia yang dilakukan hendaknya tidak hanya melihat ranking saja, akan tetapi juga memperhatikan kualitas kekayaan intelektual yang Indonesia punya.

Upaya yang dilakukan dalam mendorong IKU tersebut sampai dengan triwulan III diantaranya lanjutan atas Program Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang diinisiasi oleh Kemenko Marves sejak 2020. Tujuannya untuk meningkatkan kembali perekonomian yang terdampak pandemi covid-19.



prestasi yang diraih sampai triwulan III atas dukungan untuk mencapai IKU ini yaitu mendapatkan Apresiasi dalam Merdeka Award 2021 yang diterima pada tanggal 2 April 2021, untuk Program Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI). Program ini dilanjutkan ke tahun 2021. Dengan tujuan mendorong national branding produk lokal unggulan, sehingga dapat menciptakan industri baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu Kemenko Marves juga selalu aktif dalam sosialisasi gerakan Bangga Buatan Indonesia ini.



Tujuan dari SS.9 yaitu untuk mengukur efektifitas pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kemaritiman. Kebijakan Kemaritiman yang Efektif merupakan gagasan atau rancangan ketentuan bidang kemaritiman yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan serta dapat diimplementasikan melalui suatu ketetapan atau lainnya. SS 9 memiliki 1 IKU yaitu persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan. % Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan dihitung dengan menggunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan}}{\text{Total Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Tahun 2021 Kemenko Marves merekomendasikan rancangan kebijakan dengan jumlah 17 rekomendasi kebijakan, adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Perpres Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2020-2024
2. Rancangan Kebijakan Penanganan Pelindungan Pelaut dan Awak Kapal Perikanan di Dalam dan Luar Negeri
3. Rancangan Kebijakan Kerja Sama Implementasi Perpres 35/2018 (PSEL)
4. Rancangan Kebijakan Integrasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi
5. Rancangan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hayati Laut (BMKT/Pasir)
6. Rancangan Kebijakan Penilaian Kesehatan Laut

7. Rancangan Kebijakan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
8. Rancangan Pengelolaan Sumber Daya Ikan
9. Rancangan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Perikanan Tangkap dan Perekonomian Nasional
10. Rancangan Kebijakan Pengembangan Produksi dan Revitalisasi Kawasan Tambak Udang
11. Rancangan Kebijakan Penguatan Peran Multistakeholder Budidaya dalam Memacu Produktifitas
12. Rancangan Kebijakan Pengembangan Budidaya Komoditas Unggulan Berbasis Klaster
13. Rancangan Kebijakan Dukungan Infrastruktur Logistik Sentra Kelautan dan Perikanan
14. Rancangan Kebijakan Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
15. Rancangan Kebijakan Peningkatan Pemasaran Luar Negeri Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing
16. Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan Produk Perikanan
17. Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Perekonomian Nasional Pasca Pandemi melalui Pemberdayaan Pertambangan Rakyat

Realisasi dari IKU tersebut yaitu:

Tabel 44. Capaian Kinerja SS.9 TW III

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW III	Capaian
12	% Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan	3,90	n/a	n/a	n/a
Capaian Kinerja SS 9					n/a

Capaian sampai dengan triwulan III tahun 2021 belum ditampilkan (n/a), hal ini dikarenakan target dari IKU ini akan dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021). Pada indikator 12 capaian sampai dengan triwulan III tahun 2021 dan triwulan III tahun 2020 belum ditargetkan, dan target akhir tahun 2021, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 45. Perbandingan Capaian dan Target Indikator 12

No	IKU	Realisasi TW III 2020	Realisasi TW III 2021	Target 2021	Target 2021
12	% Rekomendasi Kebijakan yang ditetapkan	n/a	n/a	100	100

Namun demikian, guna mencapai IKU tersebut Kemenko Marves upaya yang telah dilakukan terhadap capaian beberapa rekomendasi kebijakan yang selanjutnya bertahap akan ditetapkan sampai dengan TW IV (akhir tahun 2021), diantaranya sebagai berikut:

- ❖ Terkait RPrepres Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021-2024 telah dilakukan Rapat Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan Rapat Penyiapan Administrasi Dokumen Final RPerpres Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021 - 2025 untuk Penetapan;
- ❖ Rapat koordinasi tindak lanjut negosiasi penyusunan perjanjian kerja sama PSEL Kota Palembang dan PSEL Kota Tangerang;
- ❖ Terkait integrasi rencana tata ruang dan rencana zonasi: Pembahasan lanjutan dengan Kumham dan Setneg terkait percepatan integrasi KSN Jabodetabekpunjur, target persetujuan substansi RTRWP:
 - 2021: Jabar, Sumbar
 - 2022: Bengkulu, Jatim, Jambi, Aceh, Riau, Kepri, DKI Jakarta, Banten, Bali
 - 2023: Sumsel, Lampung, Jateng, D.I Yogyakarta, Babel, Sumut
- ❖ Terkait Rancangan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Hayati Laut (BMKT/Pasir): Ranperpres tentang Pengelolaan BMKT dalam pembahasan lingkup internal KKP dan akan dilakukan Pembahasan Antar Kementerian (PAK); dan pertemuan antara Kemenkomarves dan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dikoordinasikan dan di fasilitasi oleh Sekretaris Ditjen PRL – KKP;
- ❖ Rancangan Pengelolaan Sumber Daya Ikan; dilaksanakan Rakor Teknis Pilot Project PLTAL;
- ❖ Koordinasi dengan K/L teknis terkait penetapan rekomendasi atas Peningkatan Industri dan Investasi Perikanan Tangkap.



- ❖ Koordinasi Teknis terkait Penanggulangan Kasus Penolakan Produk Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh GACC.

Dalam pencapaian IKU ini beberapa faktor pendukung diantaranya adalah:

- ❖ Koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L terjalin sangat baik dalam pengawalan proyek-proyek strategis pemerintah dan juga proyek prioritas
- ❖ Koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L terjalin sangat baik dalam pembuatan rekomendasi kebijakan ataupun pengendalian kebijakan guna mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Selain itu ada juga faktor Penghambat atas pencapaian IKU dimaksud, diantaranya: Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dan medan geografis yang sulit aksesnya; Distribusi penduduk yang tidak merata; adanya pandemic covid-19; serta regulasi yang rumit.



Maksud dari SS.10, adalah terlaksananya pengendalian pelaksanaan kebijakan kemaritiman di K/L di bawah koordinasi Kemenko Marves. SS10 memiliki 1 IKU yaitu persentase (%) Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti.

Tahun 2021, hasil pengendalian yang ditindaklanjuti Kemenko Marves berjumlah 7, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rancangan Rekomendasi Kebijakan pengendalian penetapan penambahan luas landas kontinen Indonesia di luar 200 NM pada komisi Batas Landas Kontinen PBB
2. Rancangan Rekomendasi Kebijakan pengendalian Penanganan Pembongkaran (Decommissioning) Anjungan Minyak dan Gas Tidak Terpakai
3. Rancangan Rekomendasi Peningkatan Industri dan Investasi Perikanan Tangkap
4. Rancangan Rekomendasi Kebijakan Dukungan Infrastruktur Logistik Sentra Kelautan dan Perikanan
5. Rancangan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6. Rancangan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Pemasaran Luar Negeri Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing
7. Rancangan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Pergaraman Nasional.

IKU % Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti dihitung dengan menggunakan formula:

$$\frac{\text{Jumlah Hasil Pengendalian ditindaklanjuti}}{\text{Total pengendalian yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Realisasi dari IKU ini adalah:

Tabel 46. Capaian Kinerja SS.10 TW III

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW III	Capaian
13	% Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti	3,90	n/a	n/a	n/a
Capaian Kinerja SS 10					n/a

Capaian terhadap IKU 13 pada triwulan III tahun 2021 belum disajikan, hal ini karena IKU ini ditargetkan tercapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021). Adapun upaya yang telah dilakukan sampai dengan triwulan III, sebagai berikut:

1. FGD kondisi dan potensi geologi selatan Jawa-Nusa Tenggara sebagai area of interest Submisi Landas Kontinen di Luar 200 NM Indonesia
2. Koordinasi Tingkat Menteri terkait Percepatan KPBU Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru dan Program M-Lin serta Rapat Koordinasi Teknis terkait Perkembangan Pembahasan Penugasan K/L dan Pemerintah Daerah dalam Percepatan Program Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru dan M-Lin.
3. Pendataan Kebutuhan Listrik dan Sistem Rantai Pasok Dingin;
4. Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan terkait fasilitasi uji bebas covid-19 pada produk kelautan dan Perikanan;
5. Koordinasi teknis persiapan negosiasi dengan *Main Line Operator* (MLO) International;
6. Koordinasi monitoring progres penetapan tanah terlantar pada Kabupaten Sumbawa NTB dan rencana pemanfaatan untuk program ekstensifikasi pergaraman serta koordinasi monitoring progress rencana ekstensifikasi lahan pergaraman melalui pemanfaatan HGU terindikasi tanah terlantar pada Kabupaten Aceh Timur.

Pada indikator 13 capaian sampai triwulan III tahun 2021 belum ditargetkan, begitu juga capaian atas triwulan III tahun 2020 belum ditargetkan, dan target sampai akhir tahun 2021 100%, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 47. Perbandingan Capaian dan Target Indikator 13

No	IKU	Realisasi TW III 2020	Realisasi TW III 2021	Target 2021	Target 2024
13	% Hasil pengendalian yang ditindaklanjuti	n/a	n/a	100	100

Sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian yang sangat penting dari proses dan tujuan dalam pencapaian kinerja Kemenko Marves. SDM merupakan faktor kunci dalam penyelenggaraan birokrasi. Kemenko Marves sangat memerlukan dukungan SDM yang profesional dan kompeten yang berkualitas guna memenuhi tugas dan fungsinya karena SDM merupakan faktor kunci dalam penyelenggaraan birokrasi. Kemenko Marves terus berupaya menyediakan SDM yang professional untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas lingkup Kemenko Marves.



Maksud dari SS.11, adalah terwujudnya Pengelolaan ASN di Kemenko Marves yang berkarakter melalui sikap dan perilaku yang menghasilkan ouput kerja yang unggul. IKU dari SS ini yaitu Indeks Profesionalitas ASN. Tujuannya untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN serta sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Capaian tahun 2021 IKU dimaksud sampai dengan triwulan III belum ditargetkan (n/a), hal ini karena capaian atas IKU ini pada triwulan IV (akhir tahun 2021), target tahun 2021 berdasarkan hasil penilaian dari BKN akan diketahui pada akhir tahun 2021 sehingga akan dilaporkan dalam laporan kinerja (capaian) 2021 di tahun 2022. Adapun tabel berikut menampilkan capaian atas IKU 14, sebagai berikut:

Tabel 48. Capaian Kinerja SS.11 TW III

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW III	Capaian
14	Indeks Profesionalitas ASN	7,14	n/a	n/a	n/a
Capaian Kinerja SS 11					n/a

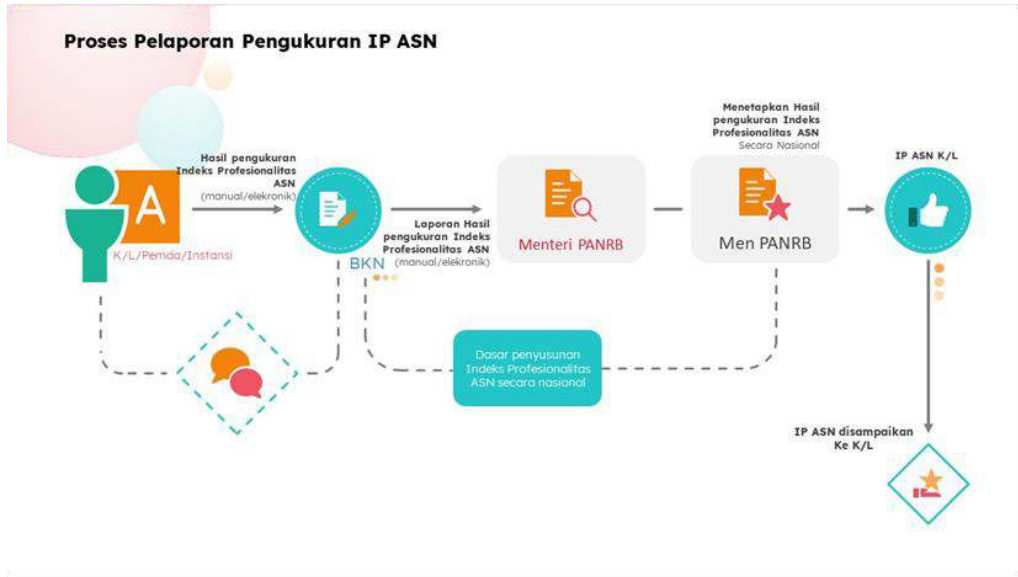
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Dasar hukum pengukuran adalah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja, dan dimensi disiplin.

Instrumen Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tingkat profesionalitas pegawai ASN yang terdiri atas identitas pegawai, dimensi, deskripsi, dan indikator beserta petunjuk pengisiannya.

Rumus pengukuran indeks profesionalitas ASN yaitu:

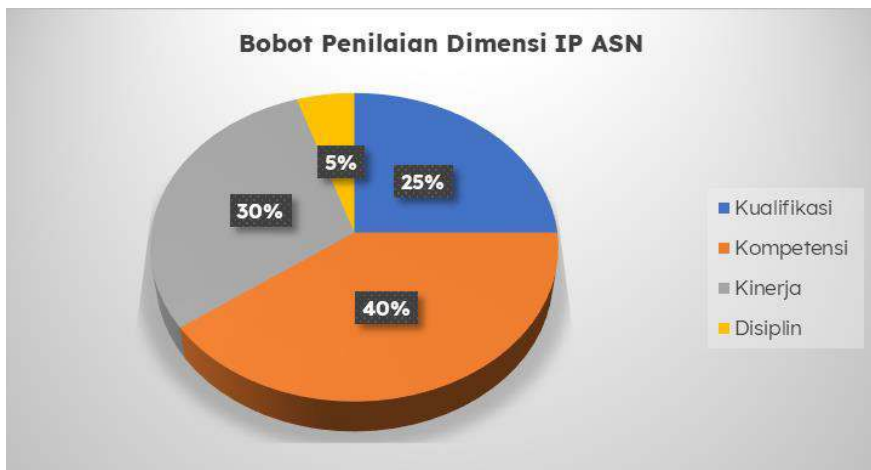
Jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator.

Alur dari pengajuan IP ASN seperti yang tertuang dalam PermenPANRB No 38 Tahun 2018 seperti pada gambar berikut:



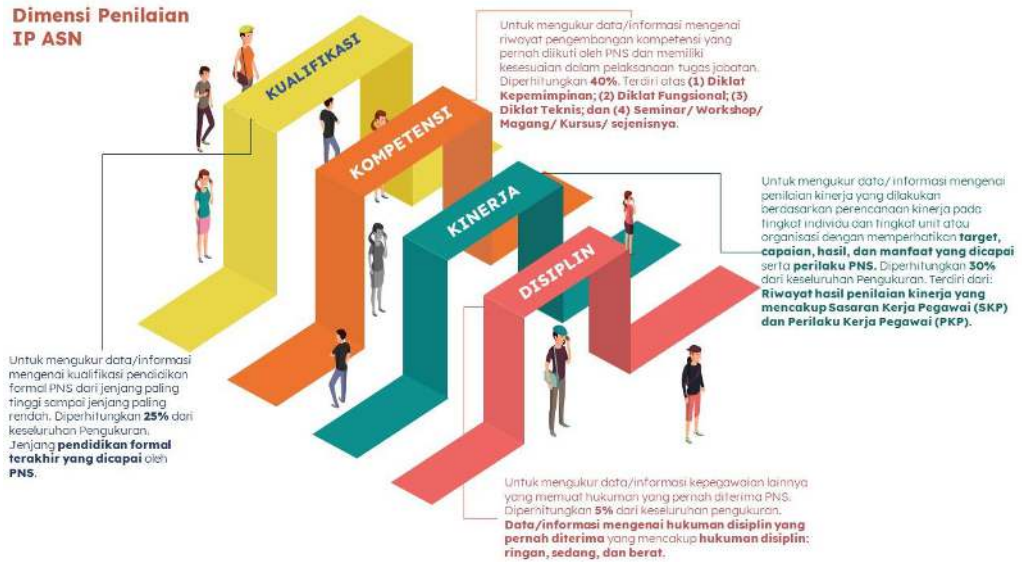
Gambar 12. Alur Pengajuan IP ASN

Adapun pembobotan atas dimensi yaitu sebagai berikut:



Grafik 16. Bobot Penilaian Dimensi IP ASN

Dimensi Penilaian IP ASN



Gambar 13. Rincian Dimensi Penilaian IP ASN



Gambar 14. Penilaian IP ASN

Pada Tahun 2020 lalu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN untuk tahun 2019 sebesar 82.00. Proses penghitungan Indeks Profesionalitas ASN tersebut dapat juga dilihat melalui aplikasi <https://ip-jasn.bkn.go.id>. Indeks profesionalitas ASN tahun 2021 hasil penilaian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum keluar, sehingga capaian sampai dengan triwulan III 2021 belum dapat diperoleh. Namun demikian sampai dengan TW III, bagian kepegawaian telah dibuat Nota Dinas yang ditujukan ke masing-masing unit kerja perihal permintaan dokumen kepegawaian yang dibutuhkan bagi penilaian indeks profesionalitas ASN. Bagian Kepegawaian telah melakukan proses unggah data yang menjadi indikator penilaian indeks profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin) di dalam aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Pada tahun 2021, Kemenko Marves menargetkan nilai IKU Indeks Profesionalitas ASN sebesar 85.00 yang akan dicapai pada TW IV.

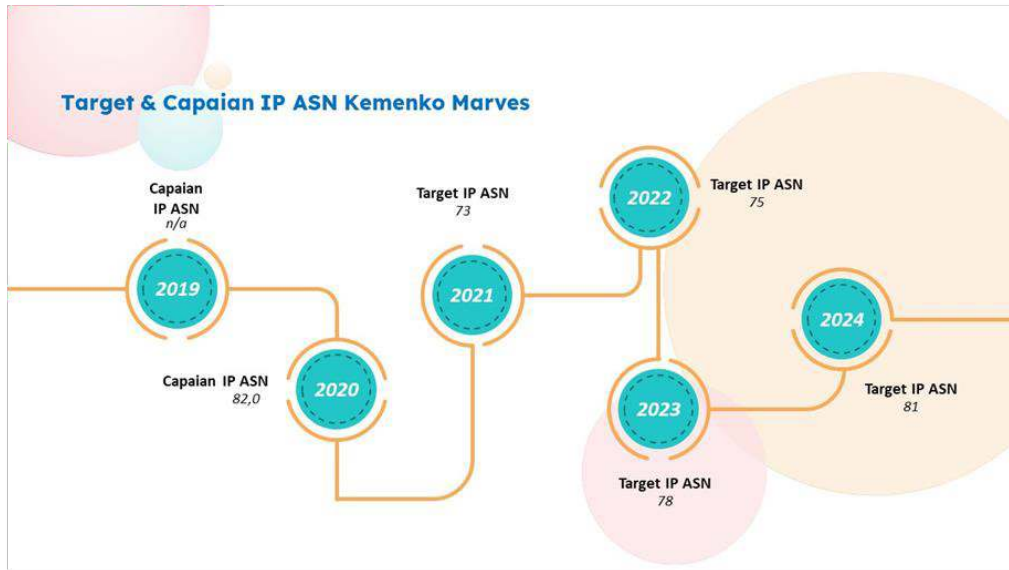
Dalam penilaian indeks profesionalitas ASN terdapat indikator penilaian kompetensi yang dimana dibutuhkan anggaran yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai. Namun karena keterbatasan anggaran yang ada, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai mengalami hambatan sehingga mempengaruhi pembobotan nilai dari dimensi kompetensi.

Selain permasalahan anggaran di atas, tahun 2021 hampir seluruh K/L mengalami hal yang sama dalam capaian atas IP ASN sampai akhir tahun ada penurunan pencapaian dari target pembobotan nilai dimensi kompetensi, hal ini disebabkan adanya kebijakan Presiden untuk beralih dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional Tertentu. Akan tetapi, progres pengisian dan unggah dokumen telah berjalan dan telah diinput ke dalam aplikasi SAPK.

Perbandingan atas capaian dan target untuk IKU ini dari tahun 2019 s.d 2024 seperti terlihat pada gambar berikut ini:

Tabel 49. Perbandingan Capaian dan Target Indikator 14

No	IKU	Realisasi TW III 2020	Realisasi TW III 2021	Target 2021	Target 2024
14	Indeks Profesionalitas ASN	n/a	n/a	73	81



Success story

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kemenko Marves Tahun 2020 adalah sebesar 82 dengan kategori tinggi. Pencapaian ini melampaui target sebesar 71. Berdasarkan Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020, dari 35 Kementerian Lembaga yang diukur Indeks Profesionalitas ASN, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapat urutan nomor 3 tertinggi dengan kategori tinggi. Jika dianalisa, pencapaian ini didukung dengan peran aktif dari seluruh ASN Kemenko Marves terhadap pemenuhan indikator dalam Indeks Profesionalitas ASN.

Selain itu Kemenko Marves sampai pada Triwulan III tahun 2021 mendapat penghargaan BKN Award 2021 atas capaian dalam perencanaan kebutuhan, pelayanan Pengadaan, kepengkatan dan pensiun dari BKN, yang diberikan pada bulan Juni 2021.

Untuk mencapai indeks dimaksud Kemenko Marves terus memaksimalkan pengumpulan SKP seluruh pegawai dengan cara berkoordinasi dengan bagian TU di masing-masing unit kerja, pengiriman pegawai untuk mengikuti kegiatan diklat, dan pengembangan kompetensi lainnya serta mengintegrasikan kinerja pegawai melalui eSKP bekerjasama dengan unit kerja di lingkup Setmenko Marves.



Maksud dari SS12, yaitu untuk mewujudkan Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik dengan terlaksananya peningkatan akuntabilitas, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan di Kemenko Marves. IKU yang digunakan yakni Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves dengan realisasi triwulan III, hasil penilaian KemenPAN & RB tahun 2021 atas IKU ini dikeluarkan pada bulan Maret 2021, namun sampai dengan laporan kinerja triwulan III disusun Kemenko Marves belum menerima hasil penilaian atas IKU ini, sehingga capaian IKU ini akan dilaporkan dalam laporan kinerja (capaian) 2021 pada laporan kinerja triwulan III tahun 2021. Capaian triwulan III seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 50. Capaian Kinerja SS.12 TW III

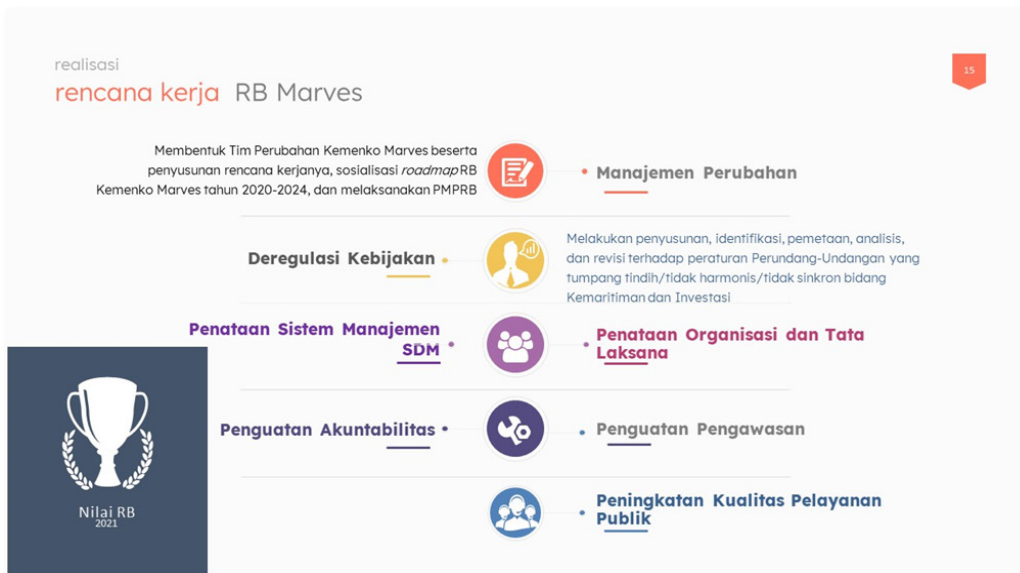
No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW III	Capaian
15	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	7,14	80	75,18	93,98
Capaian Kinerja SS 12					93,98

*) Realisasi berdasarkan Surat Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB dari Kementerian PANRB.

Persentase ini adalah nilai implementasi pengelolaan RB pada 8 area perubahan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu: a) Manajemen perubahan; b) Penataan peraturan perundang-undangan; c) Penataan dan penguatan organisasi; d) Penataan tatalaksana; e) Penataan sistem manajemen; f) Penguatan akuntabilitas; g) Penguatan pengawasan; dan h) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Capaian

Target Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves di tahun 2021 sebesar 80 menjadi target realistis menurut Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam rangka mencapai target tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada TW III 2021 sesuai dengan realisasi rencana kerja reformasi birokrasi Kemenko Marves sebagai berikut:



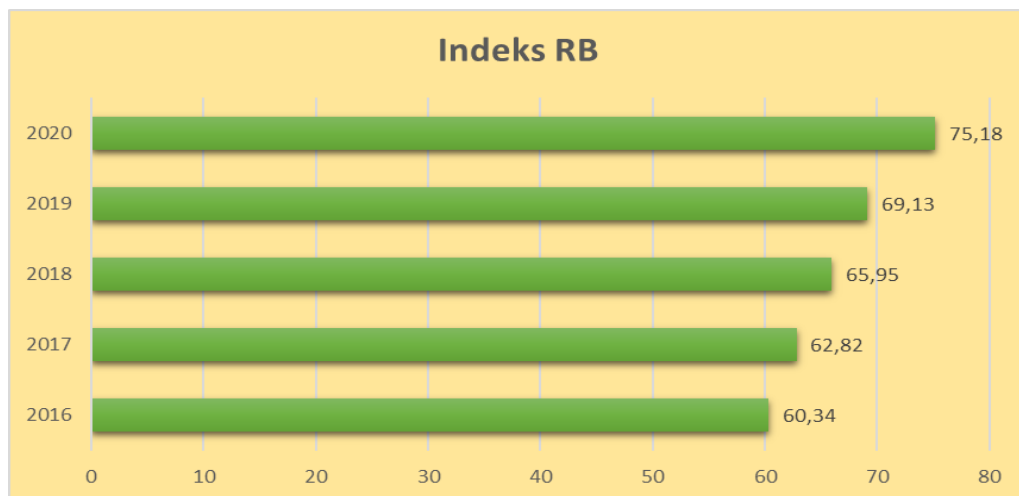
Dukungan dan keterlibatan pimpinan yang konsisten serta adanya koordinasi yang baik antar Unit Kerja dalam rapat RB, Unit kerja proaktif dalam penyusunan renja dan RB, serta Unit kerja proaktif dalam penyusunan renja dan RB merupakan beberapa faktor yang mendukung tercapainya target pada IKU ini. Sementara itu, faktor pendukung lainnya yang telah dilaksanakan yakni melalui program/kegiatan FGD standar pelayanan, Rancangan Permenko tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Marves, Standar Kompetensi Jabatan SOTK 6 Deputi yang telah mendapat persetujuan KemenPANRB, serta penyusunan Peta Jabatan Pasca PB Kemenko Marves Tahun 2021.

Kondisi Pandemi Covid-19 yang sempat mengalami peningkatan mengakibatkan adanya refocusing anggaran pada setiap unit kerja. Dengan adanya refocusing anggaran, ada beberapa kegiatan inovasi yang tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi fokus utama target kinerja dapat tercapai.

Sesuai Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, secara interpretasi suatu instansi telah mendapatkan indeks Reformasi Birokrasi >80-90 telah memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja. Namun Kemenko Marves belum dapat memenuhi kriteria tersebut dikarenakan pembayaran tunjangan kinerja yang masih berbasis absen.

Indikator lainnya terkendala oleh Pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa agenda tidak telaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengelolaan bukti dukung Reformasi Birokrasi menjadi hal yang sangat penting mengingat segala capaian di 8 area perubahan Reformasi Birokrasi harus didokumentasikan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, Kemenko Marves melakukan inovasi berupa penggunaan aplikasi E-Reformasi Birokrasi (E-RB) untuk mengumpulkan bukti dukung secara elektronik di Kemenko Marves yang memudahkan pengguna. Aplikasi E-RB ini juga telah direkomendasikan oleh Kementerian PANRB untuk dijadikan benchmarking bagi instansi lain.

Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves dari tahun 2016-2020 nilainya meningkat sebagaimana pada tabel dan masuk dalam kategori baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pada tahun 2020, sesuai surat MenPANRB Nomor B/34/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 Kemenko Marves mendapatkan nilai indeks RB sebesar 75.18 dengan kategori BB dan berhak mengajukan penyesuaian tunjangan kinerja menjadi sebesar 80%.



Grafik 3. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves Tahun 2016-2020

Adapun perbandingan capaian indikator 15 triwulan III tahun 2021 dan triwulan III 2020 serta target akhir tahun 2021 seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 51. Perbandingan Capaian dan Target Indikator 15

No	IKU	Realisasi TW III 2020	Realisasi TW III 2021	Target 2021	Target 2024
15	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	69.13	75.18	80	95

SS

13

Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang Terintegrasi



Tujuan dari SS.13 adalah 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel; 2) Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; serta 3) Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Sedangkan maksud dari Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang terintegrasi adalah rangkaian proses yang menghubungkan beberapa sistem-sistem komputerisasi dan software aplikasi baik secara fisik maupun secara fungsional lingkup Kemenko Marves. SS13 memiliki 1 buah IKU yaitu Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah nilai yang menggambarkan tingkat kematangan dari pelaksanaan SPBE yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan. Dasar hukum SPBE adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Untuk capaian atas IKU ini, sampai dengan TW III belum dapat disajikan (n/a), karena nilai penyelenggaraan SPBE dari KemenPANRB baru dirilis pada akhir tahun 2021. Beberapa langkah strategis yang dilaksanakan dalam rangka mendongkrak indeks SPBE sampai dengan Triwulan III antara lain telah dibentuk Tim Koordinator dan Tim Assesor yang ditandatangani oleh Sekeretaris Kementerian Koordinator atas nama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Hal ini diperlukan dalam rangka melakukan pemantapan internalisasi maupun dalam pemenuhan evidence untuk 47 indikator SPBE, indikator-indikator tersebut memiliki nilai interval terendah 1 (satu) dan tertinggi bernilai 5 (lima). Beberapa langkah telah dilakukan dalam upaya meningkatkan nilai indikator-indikator tersebut, antara lain:



IKU Nilai SPBE dihitung dengan formula:

Berikut adalah Nilai Indeks Sementara SPBE Tahun 2021, yang telah dilaksanakan oleh tim assesor dari KemenPANRB pada awal bulan September 2021:

Tabel 52. Nilai Indeks Sementara SPBE Tahun 2021

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	
K/L/D	: Kementerian
Indeks SPBE	: 3.21
Predikat SPBE	: Baik
Domain Kebijakan SPBE	: 5.00
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 5.00
Domain Tata Kelola SPBE	: 3.00
Perencanaan Strategis SPBE	: 3.00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 2.75
Penyelenggara SPBE	: 3.50
Domain Manajemen SPBE	: 2.18
Penerapan Manajemen SPBE	: 1.88
Audit TIK	: 3.00
Domain Layanan SPBE	: 3.18
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 3.30
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 3.00

Hasil penilaian dari KemenPANRB yang disampaikan pada akhir tahun 2021

Tahap selanjutnya dalam penilaian Indeks SPBE yaitu penilaian interviu yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli-23 Agustus 2021, kemudian dilakukan tahapan harmonisasi yang akan menentukan nilai akhir indeks SPBE dari tiap Kementerian/Lembaga.

Capaian atas IKU ini sampai dengan triwulan III yang ditampilkan berdasarkan nilai sementara hasil assesor tim KemenPANRB (penilaian berdasarkan PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020), sedangkan target Nilai SPBE yang tercantum dalam Renstra Kemenko Marves 2020 – 2024 dan yang dicantumkan dalam Laporan Kinerja ini masih berpedoman pada PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sehingga adanya perbedaan dalam sistem penilaian SPBE tahun 2021 dari tim assesor KemenPANRB. Adapun nilai sementara atas capaian SPBE adalah sebagai berikut :

Tabel 53. Capaian Kinerja SS.13 TW III

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW III	Capaian (%)
16	Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	7,14	3,3	3,21*	97,27
Capaian Kinerja SS 13					97,27

*) nilai sementara hasil assessor tim KemenPANRByang dilaksanakan pada bulan Sept 2021

Capaian atas IKU ini adalah 97,27%, hal ini didapat atas realisasi (berdasarkan nilai sementara) hasil penghitungan tim assesor KemenPANRB dibagi atas target Nilai SPBE pada tahun 2021 ($(3,21/3,3) \times 100\%$). Penilaian ini dilaksanakan pada awal bulan September 2021 sebagai langkah awal untuk mengetahui kelengkapan data dukung atas Nilai SPBE.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE. Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka

kerja untuk mengukur derajat kematangan penyerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level. Masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5, 0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik *)
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (Indeks minimal 2,6)

Tabel 54. Perbandingan Capaian dan Target Indikator 16

No	IKU	Realisasi TW III 2020	Realisasi TW III 2021	Target 2021	Target 2024
16	Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	n/a	3,21*	3,3	4,0

*) nilai sementara hasil assessor tim KemenPANRByang dilaksanakan pada bulan Sept 2021



Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan IKU dari SS.14. Maksud dari SS ini adalah pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Kemenko Marves yang didasarkan pada empat kriteria, yakni: 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 4) Efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK yang menjadi sasaran target pada TA. 2021 adalah opini BPK hasil pelaksanaan penggunaan anggaran pada TA. 2020. Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 memperoleh hasil WTP (LHP Nomor: 26b/LHP/XV/05/2021 tanggal 31 Mei 2021). Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan secara virtual oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK pada tanggal 12 Agustus 2021. Capaian ini merupakan kali kelima bagi Kemenko Marves yang berhasil mempertahankan opini WTP secara berturut-turut sejak laporan keuangan tahun 2016.

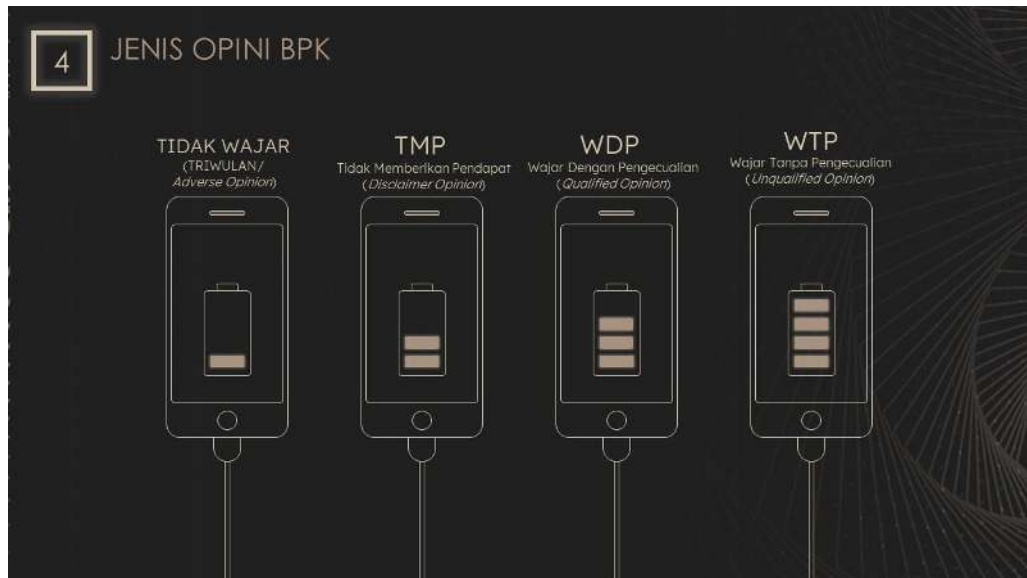
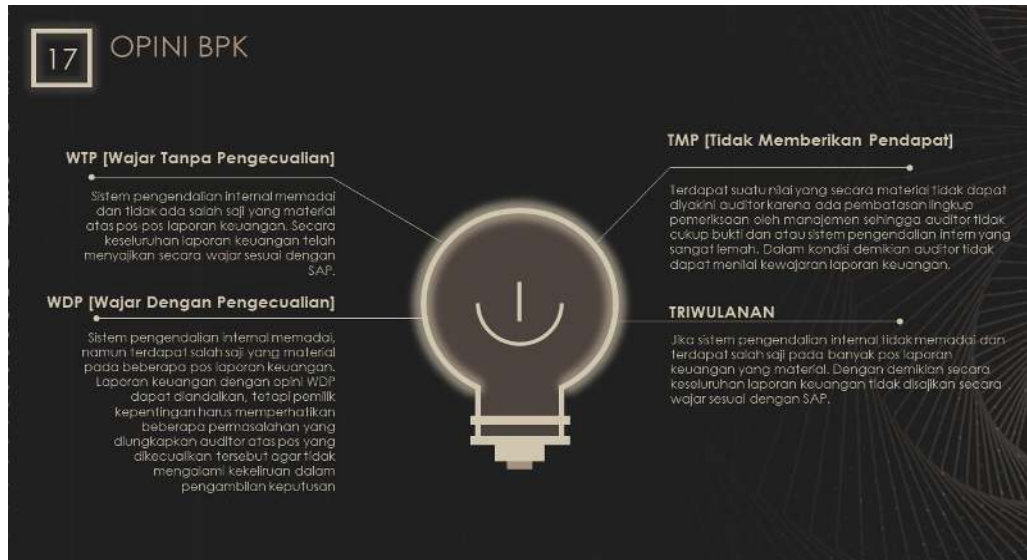
Pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang setiap tahun dilakukan oleh BPK bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan kementerian/ lembaga. BPK memiliki standar yang digunakan secara ketat dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Adapun kriteria penilaian opini yang mengacu pada SPKN adalah dengan menilai kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi dan laporan keuangan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Adapun realisasi atas IKU tersebut, tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 55. Capaian Kinerja SS.14 TW III

No	IKU	Bobot	Target	Realisasi TW III	Capaian (%)
17	Opini BPK	7,14	WTP	WTP	100
Capaian Kinerja SS 14					100

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPK setiap tahun selalu melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan K/L untuk tahun anggaran sebelumnya. Tujuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan empat kriteria, antara lain kesesuaian laporan keuangan yang diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan yang diperiksa sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Jadi, Opini merupakan

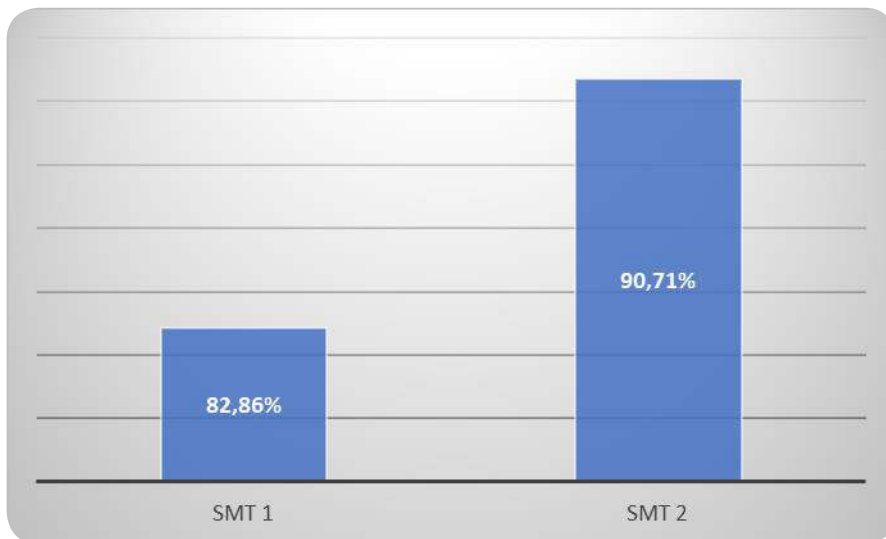
pernyataan profesional sebagai kesimpulan BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Kementerian/ Lembaga. Selain itu, opini menunjukkan pula kualitas tata kelola keuangan pada Kementerian/ Lembaga tersebut. BPK dapat memberikan empat jenis opini, seperti pada gambar berikut:



Di Tahun 2021, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menargetkan kembali untuk meraih hasil pemeriksaan dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Pada TRIWULAN I, BPK melaksanakan entry meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKLL) Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan secara virtual. Pemeriksaan berlangsung selama 90 hari dilaksanakan dengan mengutamakan prosedur pemeriksaan secara virtual.

BPK sudah menyampaikan daftar temuan hasil pemeriksaan sementara dari data permintaan berkas 2020 yang dilakukan secara bertahap. Kemenko Marves sudah melakukan pembahasan secara internal dan menindaklanjuti hasil temuan BPK berupa tanggapan tertulis atas konsep temuan BPK. Kemenko Marves juga menyiapkan draft action plan terkait rencana Kemenko Marves dalam mengatasi hasil temuan BPK tahun 2020.

Pada Semester 1 sudah ada beberapa temuan BPK yang sudah selesai untuk ditindaklanjuti. BPK juga memantau pelaksanaan dari action plan yang telah dibuat oleh Kemenko Marves. Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 milik Kemenko Marves menunjukkan bahwa Kemenko Marves memperoleh hasil WTP. Ini merupakan pencapaian WTP lima kali berturut-turut sejak tahun 2016. Pada tanggal 12 Agustus 2021, telah dilakukan serah terima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara virtual oleh Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara IV BPK dan diterima oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.



Grafik 17. Hasil Pemantauan BPK

Berdasarkan hasil pemantauan diperoleh data bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Kemenko Marves mengalami peningkatan dari semester sebelumnya. Tim BPK telah melakukan penelaahan atas bukti tindak lanjut yang telah selesai yaitu (status 1 dan 4) pada semester II tahun 2020 sebesar 90,71% atau telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 127 rekomendasi dari total 140 rekomendasi. Hal tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tindak lanjut yang telah selesai pada Semester I tahun 2020 yakni sebesar 82,86%.

Kedepannya Kemenko Marves berupaya untuk mempertahankan opini BPK berupa WTP dengan melakukan pengelolaan keuangan yang lengkap, tertib, dan akuntabel. Di samping itu, Opini WTP ini dapat tercapai karena kerja keras dan kerjasama yang dilakukan oleh setiap unit kerja untuk melaksanakan realisasi anggaran dan pelaksanaan keuangan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Success story

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berturut-turut setiap tahun mendapatkan opini WTP dari BPK (sejak tahun 2016 s.d 2021). Opini WTP ini dapat tercapai karena kerja keras dan kerjasama yang dilakukan oleh setiap unit kerja untuk melaksanakan realisasi anggaran dan pelaksanaan keuangan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.



Perbandingan capaian triwulan III 2021 dan triwulan III 2020 serta target tahun 2021 indikator Opini BPK sebagai berikut:

Tabel 56. Perbandingan Capaian dan Target Indikator 17

No	IKU	Realisasi TW III 2020	Realisasi TW III 2021	Target 2021	Target 2024
17	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP

3.4. Capaian Kinerja Lainnya

Kemenko Marves sebagai kementerian yang memiliki tugas sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian atas 7 K/L teknis di bawah koordinasi Kemenko Marves (KKP, Kemen ESDM, Kemenhub, KLHK, Kemen PUPR, Kemenparekraf, Kemen Investasi/BKPM) sepanjang tahun 2021 telah mendorong dan melaksanakan beberapa program dan kegiatan major project dan yang ditugaskan langsung oleh Presiden RI sampai dengan triwulan III, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberantasan Pungutan Liar di Pelabuhan, Kemenko Marves memberikan arahan untuk memasang formulir pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk melaporkan kasus pungutan liar yang terjadi disegala jenis pelabuhan di Indonesia. Formulir pengaduan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai terjadinya praktik pungutan liar di pelabuhan dari masyarakat secara langsung, agar dapat ditindaklanjuti oleh Kemenko Marves yang kemudian akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan terkait, seperti Polri, Kejaksaan, Satgas Saber Pungli, dan Otoritas Pelabuhan.



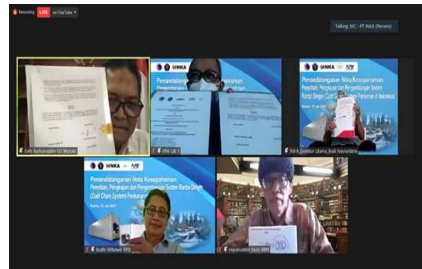
2. Akselerasi Ekspor Industri Perikanan dan Kelautan Indonesia

- Mendorong adanya infrastruktur sarana dan prasarana seperti yang sudah dan masih terus diupayakan seperti cold storage, unit pengelola ikan (UPI), pelabuhan, dan bandara. Untuk Kabupaten Biak Numfor sudah terselesaikan seluruh infrastruktur pendukung ekspor dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) seperti cold storage, UPI, hingga investor yang sudah siap menanamkan investasinya.
- Sistem integrasi pengawasan dan keamanan secara terpusat juga sedang dikembangkan secara bersamaan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupa satelit fishing bersama dengan instansi terkait.
- Memerintahkan adanya pengawasan dan pengamanan dari Kepala Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL).
- Mendorong regulasi yang perlu segera ditetapkan terkait pengadaan kapal ikan, perizinan, alat tangkap, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).



- Mendorong untuk dibuatkan pokja mengenai proses bisnis, hingga pada tahap pengawasan dan pengamanan dari adanya ekspor di kedua WPPNRI.

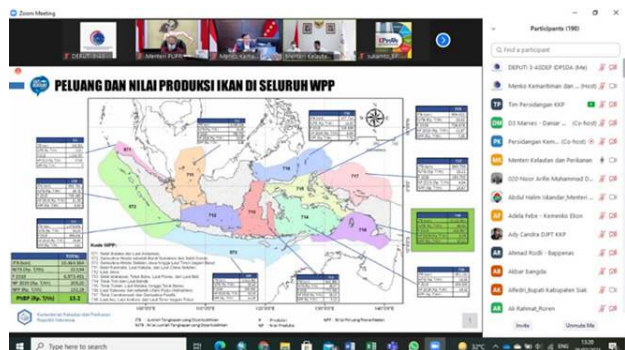
3. **Memperkuat hilirisasi industri Perikanan**, telah dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Sistem Rantai Dingin atau *Cold Chain System* Industri perikanan Indonesia secara daring pada tanggal 15 Juli 2021. Tujuan nya adalah guna mendorong kemajuan industri perikanan di Indonesia melalui berbagai inovasi dan teknologi, kajian yang komprehensif dari kalangan profesional dan nantinya mampu dibuat sebuah prototipe yang dapat digunakan dalam industri perikanan, khususnya terkait penyimpanan berpendingin yang statis ataupun dapat dipindahkan sesuai kebutuhan pasar.



- Kemenko Marves selaku pihak pemerintah;
- PT Inka Persero yang akan memproduksi reefer container buatan dalam negeri;
- Universitas Brawijaya selaku perwakilan dari institusi pendidikan yang nantinya mampu mengembangkan berbagai jenis teknologi dan inovasi untuk sistem rantai dingin Indonesia; serta
- Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), dan terakhir dari Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI).

4. **Dukungan atas pembangunan Integrated Fishing Port & International Fish Market di Kota Bagansiapiapi**

Berdasarkan hasil kajian, KKP menilai Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 yang meliputi Perairan Laut Andaman dan Selat Malaka. Provinsi Riau masuk ke dalam zona merah (overfishing), sehingga langkah strategis



yang akan ditempuh oleh KKP adalah menggeser wilayah penangkapan ke WPP 572 (meliputi Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda) dan WPP 711 (meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Natuna Utara). Studi kelayakan akan dilakukan pada awal tahun 2022 karena pada saat ini kondisi pandemi Covid-19 masih cukup tinggi di Indonesia, diharapkan studi kelayakan dapat dipercepat sehingga proses pembangunan Integrated Fishing Port & International Fish Market dapat segera dilaksanakan.

5. Dukungan terhadap lintas kapal Ro-Ro Dumai-Malaka

Kementerian Perhubungan memberikan dukungan terhadap lintas kapal Ro-Ro Dumai-Malaka dengan memastikan kesiapan fasilitas Pelabuhan Bandar Sri Junjungan dan KMP. Belanak untuk melayani lintas Dumai-Malaka, Kemenhub akan mengharmonisasikan SOP dan simulasi dalam mekanisme pengangkutan barang, bea cukai, imigrasi, karantina, operasional jalan, jangkauan wilayah operasi kendaraan dan SIM internasional. Pelabuhan Bandar Sri Junjungan pada sisi perairan Pemerintah Provinsi Dumai telah melaksanakan pembangunan fisik peningkatan kapasitas sandar dermaga dan perbaikan jalan akses ke dermaga sedangkan untuk sisi darat akan dilaksanakan rehap pada tahun 2022 setelah proses serah terima aset dari Pemerintah Kota Dumai ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, namun diharapkan sebelum proses perbaikan tersebut agar dipastikan terlebih dahulu komoditi yang akan diangkut dan jangkauan wilayah operasi kendaraan yang akan melayani lintai Dumai-Malaka sehingga tidak terdapat perbedaan antara wilayah negara Indonesia dan Malaysia.



6. Pelaksanaan *Major Project* Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan

Pelaksanaan pembangunan jalan trans 3T sesuai dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 (Lampiran Major Project), dari 41 major project, nomor 30 adalah Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan dan fokusnya sudah dijabarkan nama 18 pulau dengan tujuan meningkatkan konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menurunkan harga komoditas.



Aru, Babar, Buru, Seram, Kei Besar, Selaru, Moa, Wetar, Morotai dan Biak).

Berdasarkan sebaran pembangunan jalan Trans 18 pulau 3T lima diantaranya terdapat di wilayah barat Indonesia (Pulau Simeulue, Pulau Nias, Pulau Mentawai, Pulau Enggano, dan Pulau Natuna) dan 13 berada di wilayah Timur Indonesia (Sumba, Muna, Buton,

Update Progress Pulau Natuna

Prov. Kepulauan Riau (Pulau Natuna)

Deskripsi	Indikasi Target	Total Dana	Instansi Pelaksana
1. Jalan Akses Pusat Pertahanan Natuna	2020 : 2 Km 2021 : 14,9 Km 2022 : 14,9 Km 2023 : 8 Km 2024 : 8 Km	1.099 M	Kemen PUPR
2. Pembangunan Jalan Selat Lampa-Teluk Depih-Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC)	2020 : 18, 14 M 2021 : 41,78 M 2022 : 8, 23 M	68,15 M	Kemen PUPR
3. Jembatan Klarik Cs	2020 Dari SYc menjadi Myc (Terdampak Refocusing)	107,3 M	Kemen PUPR




Gambar 1. Penanganan Jalan di Pulau Natuna

Progress pembangunan jalan trans di Mentawai pada periode sebelumnya tahun 2020 dan dilanjutkan tahun 2021. Jalan di Mentawai ini sudah ditangani oleh Kemenko Marves sebelum ada istilah major project (Lampiran RPJMN 2020-2024) dan atas dukungan Kementerian PUPR

melalui Balai Pengelola Jalan Nasional yang bekerja bersama TNI sehingga bisa membangun jalan yang lebih panjang dari target. Progress tahun 2021 antara lain preservasi jalan sepanjang 90,05 km dan preservasi jembatan sepanjang 371,70 m.

Progress pembangunan jalan trans di Natuna terbagi menjadi pembangunan jalan akses pusat pertahanan Natuna dengan indikasi target tahun 2021 adalah 19,9 km, pembangunan jalan selat Lampa-Teluk Depih-Sp. Sekunyam (Pengalihan trase) (UMYC) dengan target pembangunan di tahun 2021 adalah 41,78 km, dan pembangunan jembatan Klarik Cs dengan target tahun 2020 dari SYc menjadi Myc namun terhambat karena terdampak refocusing.

Tindak lanjut dalam rangka percepatan pembangunan jalan trans Pulau Enggano apakah memungkinkan atau tidak untuk masuk dalam program padat karya (PEN), kemudian percepatan revitalisasi jalan dan jembatan serta rencana penanganan oleh Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2022-2024.

7. Pengembangan *Food Estate* dan Taman Sains serta Teknologi Herbal (TSTH)

Memfasilitasi kerjasama antara kelompok tani Maju dengan PT Indofood untuk kentang: bawang putih dengan Parna Raya, dan komoditas bawang merah oleh EWINDO dan Eden Farm dengan lahan food estate seluas 215 Ha dan pembukaan lahan baru di 785 Ha, beberapa offtaker saat ini sedang melaksanakan demplot nantinya akan dikembangkan di lahan yang lebih luas. Sedangkan pengembangan Taman Sains serta Teknologi Herbal (TSTH) oleh Institut Teknologi (IT) Del.



8. Pengembangan Desa Wisata di Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Dukungan pengembangan Desa Wisata dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dengan K/L teknis pelaksana dari pengembangan Desa Wisata.

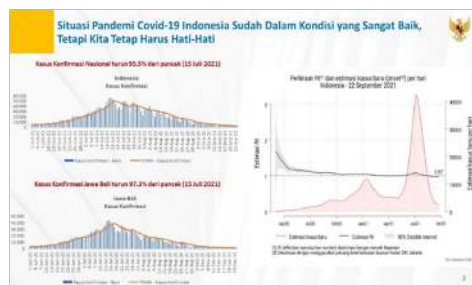
9. Mobil Listrik

Fasilitasi dan dukungan terhadap pengembangan mobil listrik, dengan mendatangkan investor untuk pengembangan mobil listrik. Kerjasama antara Korea dan Indonesia adalah terkait *Electric Vehicle* dan Baterai.

Capaian kinerja lainnya secara lengkap dalam laporan bulanan Kemenko Marvestahun 2021 pada link: https://drive.google.com/drive/folders/1PFmO3JgulaLYlwSwgrhrwzU3r5p0_R?usp=sharing

10. Ketua Satgas PPKM Wilayah Jawa – Bali

- Kondisi pandemi Covid-19 yang sudah baik harus terus dipertahankan pada tingkat yang rendah selama mungkin, terutama untuk mengantisipasi gelombang baru. Di satu sisi, berkaca dari pengalaman negara lain, pembukaan sekolah bisa menjadi potensi bagi peningkatan kasus jika kita tidak hati-hati. Namun di sisi lain, kembali menutup sekolah juga bukan pilihan, terutama mempertimbangkan dampak yang besar bagi sumber daya manusia Indonesia.
- Kemenkes, Kemendikbudristek bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan langkah-langkah pengamanan dan perlindungan kepada siswa sekolah agar tidak terjadi kluster sekolah. Langkah-langkah seperti testing rutin di sekolah dapat dipertimbangkan untuk dilakukan.
- Sama halnya dengan pembukaan sektor publik lainnya, adanya evaluasi terhadap pelaksanaan PTM sekolah dilakukan dengan ketat, berbasis data, dan dilaporkan secara rutin.
- Kemenkes, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi di daerah-daerah yang tingkat vaksinasinya masih rendah. Belajar dari pengalaman Amerika Serikat, tingkat vaksinasi yang tinggi akan melindungi anak-anak dan menahan laju peningkatan kasus, meski sekolah dibuka.

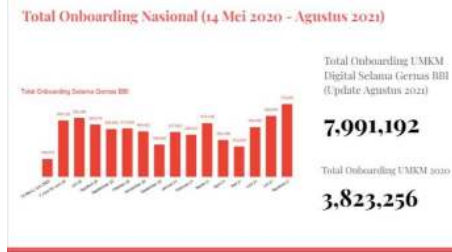


11. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Melaksanakan dukungan melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kegiatan pencapaian target Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Gernas BBI meliputi:

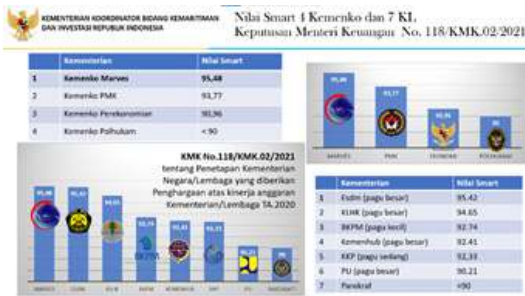
- Peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/Industri Kecil dan Menengah termasuk Pelaku Ekonomi Kreatif yang masuk dalam ekosistem digital;
- Peningkatan jumlah penjualan atau transaksi pembelian produk lokal;

- Peningkatan daya beli masyarakat, perluasan pasar, akses permodalan, pelatihan, pendataan, dan percepatan siklus ekonomi lokal melalui belanja produk lokal; dan
- Stimulus ekonomi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/Industri Kecil dan Menengah termasuk Pelaku Ekonomi Kreatif Gernas BBI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Peningkatan UMKM *onboarding* (masuk) ke *platform* digital secara nasional selama Gernas BBI dari 3.823.256 (2020) meningkat sebesar 7.991.192 (s.d Agustus 2021) dan tidak menutup kemungkinan s.d akhir tahun 2021 akan terus meningkat onboarding UMKM ini, target nasional sampai dengan akhir tahun 2023 berjumlah 30 Juta UMKM *onboarding* digital.



3.5. Prestasi sampai dengan TW III 2021:

1. Penghargaan Kemenkeu Tahun 2021 Atas Capaian Kinerja Anggaran TA 2020 dengan Capaian “Sangat Baik”.



2. Penghargaan Dari Kemenkeu Sebagai Kementerian Dengan Pengelola Anggaran Terbaik Ke-2 Dengan Kategori K/L Paga Anggaran Kecil.



3. Penghargaan sebagai institusi yang memiliki program inovatif selama masa Pandemi Covid 19. Terpopuler Di Media Cetak 2020” pada ajang *Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2021*, yang diumumkan melalui live streaming di kanal Youtube PR Indonesia pada hari tanggal 31-03-2021.



4. Penghargaan BKN Award 2021 atas capaian dalam perencanaan kebutuhan, pelayanan Pengadaan, kepengkatan dan pensiun dari BKN, yang diberikan pada bulan Juni 2021.



5. Kemenko Marves mendapat Penghargaan WTP tahun 2020 dan Penghargaan atas 5 kali WTP



6. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (TLHP BPK) Kemenko Marves Tahun 2020 sangat baik mencapai 98,3%. Yang disampaikan oleh BPK tgl 28 September 2021.



7. Apresiasi dalam Merdeka Award 2021 yang diterima pada tanggal 2 April 2021, untuk Program Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI). Program ini dilanjutkan ke tahun 2021. Dengan tujuan mendorong national branding produk lokal unggulan, sehingga dapat menciptakan industri baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu Kemenko Marves juga selalu aktif dalam sosialisasi gerakan Bangga Buatan Indonesia ini.



©2021 Merdeka.com

8. Penghargaan atas Program Inovatif Kementerian saat pandemic covid 19 pada Anugerah Merdeka Award 2021.



3.6. Inovasi

1. Ditepresrasitapkannya Permenko Marves Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Kemenko Bidang Kematiriman Dan Investasi Yang Merupakan Penyempurnaan Dari Permenko Nomor 6 Tahun 2017. *(Mengatur secara rinci tentang pelaksanaan SAKIP di lingkup Kemenko Marves)



2. Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kinerja di lingkup Kemenko Marves.

KOMITMEN PIMPINAN



Penandatanganan Perjanjian Kinerja Menko 2021 bersama Pejabat Eselon I



Menko bersama Pejabat Eselon I saat Penandatanganan PK 2021



Arahan Menko saat Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2021

Hadirin yang berbahagia,

Pertemuan hari ini merupakan sebuah bentuk komitmen kita bersama sebagai ASN untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja yang optimal. Penandatanganan Perjanjian kinerja juga merupakan sebuah bentuk komitmen bawahan terhadap atasannya untuk menjalankan tugas

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi serta tugas layanan sebagaimana tertera dalam Perpres 92 Tahun 2019, sehingga terwujud kinerja yang terukur.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja hari ini, akan dilanjutkan oleh masing-masing unit kerja dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon II sampai dengan level staf.

Saudara sekalian yang saya hormati,

3. Pelaksanaan pemantauan kinerja secara berkala setiap triwulan melalui kegiatan *updating* & klarifikasi data kinerja & setiap bulan memberikan *update* kegiatan melalui aplikasi pengelolaan kinerja yaitu SIK-Marves. Pemantauan dilakukan terhadap kinerja sampai level unit eselon.



Triwulan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Triwulan I	834.750.000	205.622.32	25%
Triwulan II	811.800.000	125.780.825	16%
Triwulan III	820.800.000	127.670.522	16%



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA

RENTA ACARA
HASIL VALIDASI KINERJA BIRO KOMUNIKASI
TRIWULAN I TA 2021
 Nomor BA-08/VALUAKORRENSI/MARVES/VI/2021

Pada hari Rabu, 9 Mei 2021 telah ditetapkan Hasil Validasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021 Biro Komunikasi berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-196/MAR/ES/SE/SEMENKORD/ND/2021 tanggal 30 Maret 2021, yang adalah sebagai berikut:

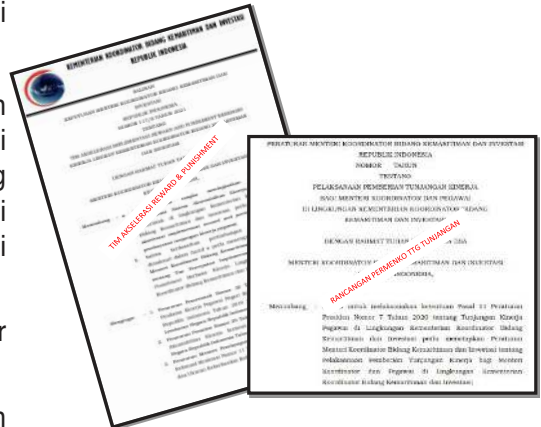
- Biro Perencanaan:**
 - Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja
 - Kepala Bagian Program dan Anggaran
 - Kepala Subbagian Penyelenggaraan Program
 - Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran
 - Kepala Subbagian Pengendalian dan Pengukuran Kinerja
 - Kepala Subbagian Pelaporan Kinerja
 - Kepala Subbagian Dukungan Sistem Akuntabilitas Kinerja
- Biro Komunikasi:**
 - Kepala Subbagian Tata Usaha pada Bagian Hubungan Masyarakat, Biro Komunikasi

Dengan penjelasan sebagai berikut:

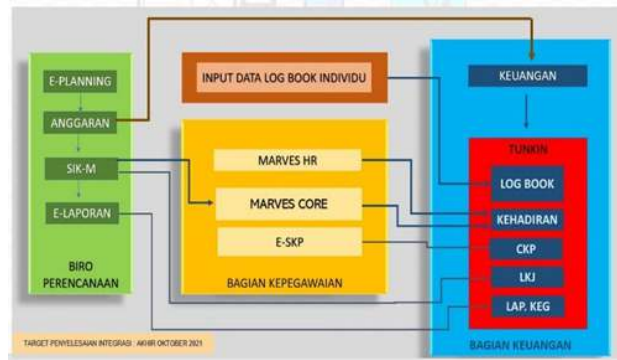
- Dasar Hukum Pelaksanaan Updating dan Klarifikasi Data Kinerja Lingkup Kemenko Marves Tahun 2021
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Permen PAN & RB No. 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rincun atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Permenko Marlin Nomor 12 Tahun 2016 tentang Standar Kebijakan Kebijakan Kementerian
- Permenko Marlin dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

4. *Reward dan Punishment*, melalui pembayaran tunjkin berbasis kinerja.

- Penghitungan tunjkin menggunakan alat bantu berupa aplikasi pembayaran tunjangan kinerja yang terintegrasi dengan sistem informasi kinerja, marves core, aplikasi pelaporan dan aplikasi keuangan.
- Peraturan menteri koordinator sedang dalam proses
- Implementasi penuh dilaksanakan segera setelah permenko terbit



5. Integrasi Aplikasi Perencanaan, Anggaran, Kinerja Organisasi, Pelaporan, Kinerja Individu, dan Tunjangan Kinerja



6. Peningkatan SDM SAKIP Kemenko Marves (Bimtek Penyusunan Pohon Kinerja; Bimtek Emonev Bappenas; Bimtek Penyusunan Kebijakan; Bimtek Penyusunan Pelaporan Kinerja; *Workshop Knowledge Sharing System Thinking & System Dynamic*; Bimtek Penginputan Datya Kinerja; Bimtek Penginputan RKAKL ke Aplikasi SAKTI).



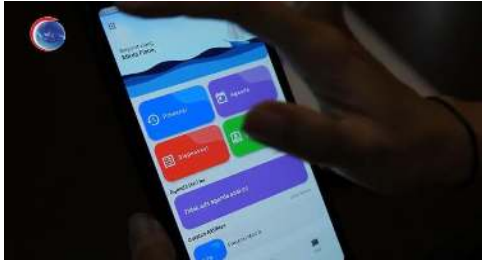
- 7. Marves Award 2021 Lingkup Kemenko Marves, apresiasi dan penghargaan bagi unit kerja terbaik di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;



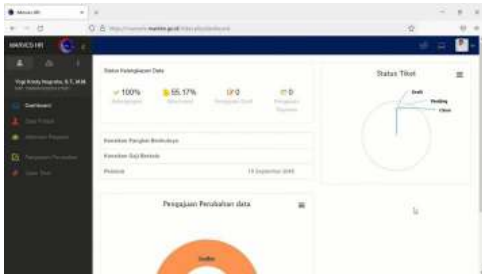
** (daftar penerima penghargaan secara lengkap pada lampiran LKj ini).

- 8. Beberapa inovasi yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai IKU indeks SPBE melalui langkah sebagai berikut:

- Pembentukan SK Koordinator dan SK Tim assesor SPBE; Penyusunan kebijakan tata Kelola SPBE (dalam proses drafting); Pembuatan Surat Edaran Sesmenko terkait kebijakan tata Kelola SPBE; Pemenuhan seluruh evidence terkait 47 indikator SPBE, antara lain video yang berisi komitmen Menko Marves dan Sesmenko dalam melaksanakan SPBE di lingkup kemenko Karves, serta video produk unggulan terkait layanan administrasi berbasis digital yaitu marvescore, marves HR, JDIH, PPID, layanan e Lapor, dan marves dalam angka (MDA) berbasiskan dashboard website berisi informasi untuk mendukung Kedeputusan terkait informasi 7 (tujuh) K/L dibawah Kemenko Marves.



Marvescore



Marves HR



Covid Tracker



JDIH Kemenko Marves



website maritim.go.id atau maritim.go.id/kontak



eLapor



website <https://e-ppid.maritim.go.id/>

PPID

https://drive.google.com/drive/folders/1ajqoDnn_aqomTxxoAcmps-BM1rJQ7E6H

Aplikasi Sistem Informasi Kinerja-Maritim (SIK-Maritim), yang dikembangkan oleh Biro Perencanaan Kemenko Marves; Secara lengkap inovasi terhadap pengembangan aplikasi dalam vidiografis dapat dilihat pada link berikut ini:

https://drive.google.com/drive/folders/1ajqoDnn_aqomTxxoAcmps-BM1rJQ7E6H



11. Inovasi untuk pencapaian Temuan Finansial BPK, diantaranya:

- Membuat aturan internal tentang perhitungan perjalanan dinas luar negeri;
- Melakukan audit perjalanan dinas oleh Inspektorat sebelum audit BPK dan semua Mitra Inspektorat menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Inspektorat;
- Penganggaran belanja honor operasional satuan kerja untuk pembayaran uang saku pelaksanaan reviu dan audit internal sudah sesuai dengan ketentuan;
- Pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sudah sesuai ketentuan;
- Kemenko Marves telah merevisi Surat Keputusan Kemenko Maritim tentang kelas jabatan dan merealisasikan pembayaran tunjangan kinerja untuk jabatan yang tidak ditetapkan dalam Sk Kemenko Maritim dan/atau dalam persetujuan Kemen PAN & RB;



- Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas sudah didukung dengan bukti yang lengkap;
 - Sudah tidak ada kekurangan volume pekerjaan pengadaan dan instalasi cooling tower tambahan;
 - Pekerjaan serupa dilaksanakan sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018.
12. Formulir pengaduan, bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai terjadinya praktik pungutan liar di pelabuhan dari masyarakat secara langsung, agar dapat ditindaklanjuti oleh Kemenko Marves yang kemudian akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan terkait, seperti Polri, Kejaksaan, Satgas Saber Pungli, dan Otoritas Pelabuhan;

13. Gis Maritim adalah untuk dapat mengenali dan membedakan obyek dan fenomena pada, atas dan bawah permukaan bumi secara cepat, tepat dan akurat. GIS Maritim digagas oleh Deputi Koordinasi Bidang Sumberdaya Maritim. (alamat website: <http://gis.maritim.go.id/portal>)



Aplikasi Gis Maritim

Secara lengkap inovasi terhadap pengembangan aplikasi dalam vidiografis dapat dilihat pada link berikut ini:

https://drive.google.com/drive/folders/1ajqoDnn_aqomTxxoAcmps-BM1rJQ7E6H

14. Sistem Penatausahaan Anggaran Terpadu (SatuGarpu), adalah aplikasi untuk pengelolaan keuangan secara terpadu seluruh kegiatan yang berdampingan dengan penggunaan anggaran yang digagas oleh Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan. (alamat link: marves.info/satugarpu)

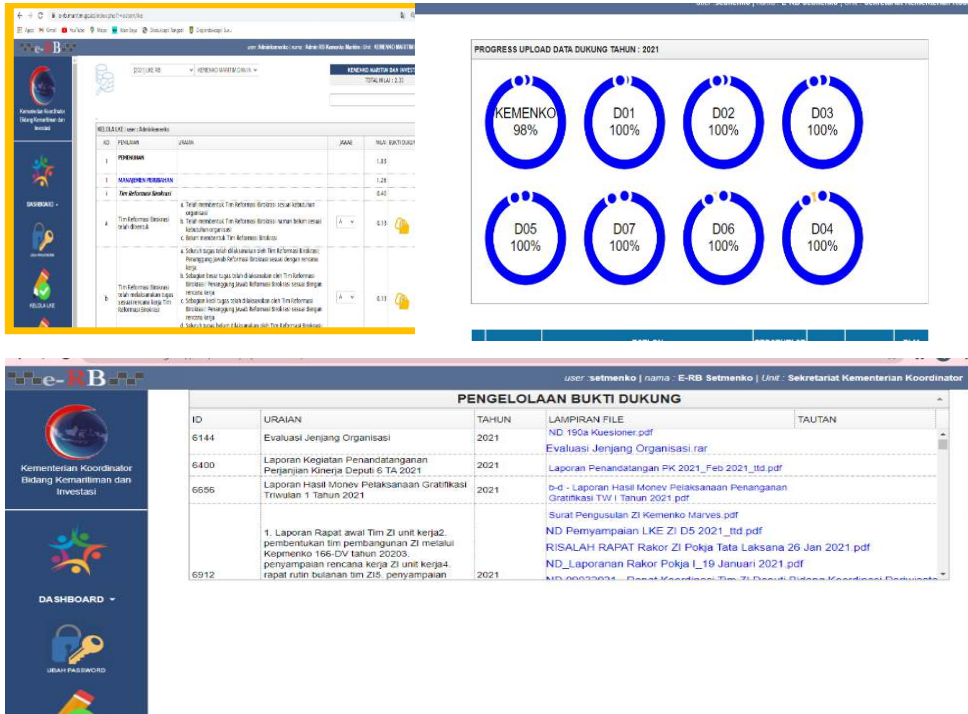


SatuGarpu

Secara lengkap inovasi terhadap pengembangan aplikasi dalam vidiografis dapat dilihat pada link berikut ini:

https://drive.google.com/drive/folders/1ajqoDnn_aqomTxxoAcmps-BM1rJQ7E6H

15. Aplikasi E-Reformasi Birokrasi (E-RB) (e-rb.maritim.go.id) telah menjadi suatu alat untuk pengumpulan bukti dukung Reformasi Birokrasi secara elektronik di Kemenko Marves, aplikasi telah direkomendasikan oleh Kementerian PAN dan RB untuk dijadikan *benchmarking* bagi instansi lain.



ID	URAIAN	TAHUN	LAMPIRAN FILE	TAUTAN
6144	Evaluasi Jejaring Organisasi	2021	ND 150a Kuesioner.pdf Evaluasi Jejaring Organisasi rar	
6400	Laporan Kegiatan Penandatangan Perjanjian Kinerja Deputy 6 TA 2021	2021	Laporan Penandatangan PK 2021_Feb 2021_ttd.pdf	
6656	Laporan Hasil Monv Perencanaan Gratifikasi Triwulan 1 Tahun 2021	2021	b-d - Laporan Hasil Monv Pelaksanaan Penanganan Gratifikasi 1TW1 Tahun 2021.pdf Surat Pengusutan ZI Kemenko Marves.pdf ND Penyampian LKE ZI D5 2021_ttd.pdf	
6912	1. Laporan Rapat awal Tim ZI unit kerja2, pembentukan tim pembangunan ZI melalui Kepmenko 166-DV tahun 20203, penyampaian rencana kerja ZI unit kerja4, rapat rutin butanan tim ZIS, penyampaian	2021	RISALAH RAPAT Rakor ZI Pokja Tata Laksana 26 Jan 2021.pdf ND_Laporan Rakor Pokja L19 Januari 2021.pdf ND 202104 - Desk Kesenjangan ZI Desk Bidang Koordinasi, Edukasi,	

16. Membangun *Digital Signature* bekerjasama dengan Badan Siber Sandi Negara.



17. Membangun Forum Koordinasi Hukum 7 K/L di bawah Kemenko Marves.

- 18. Sistem Informasi SOP yang memudahkan dalam memonitor proses penyusunan SOP.

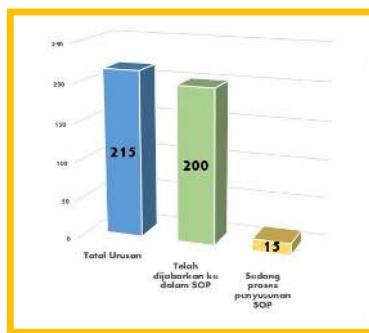
PEMANTAUAN PERKEMBANGAN PENYUSUNAN SOP MENGGUNAKAN GOOGLE SITE

No	UNTUK KEMENKA	JUMLAH KEMENTERIAN SOP	TOTAL PENYUSUNAN	PERSENTASE RABOT DI UNIT KERJA	KEBERHASILAN RABOT DI UNIT KERJA	SISWA YANG MELAKUKAKAN RABOT DI UNIT KERJA	SISWA YANG MELAKUKAKAN RABOT DI UNIT KERJA	BELUM PENYUSUNAN		
								PERFORMANSI RABOT DI UNIT KERJA	PERFORMANSI RABOT DI UNIT KERJA	PERFORMANSI RABOT DI UNIT KERJA
Sekretariat Kemendikbud										
1	Unit Perencanaan dan Manajemen	42	29	0	0	0	0	0	0	0
2	Unit Visi dan Misi	126	119	0	0	0	0	0	0	0
3	Unit Hukum	60	29	25	0	16	0	0	0	0
4	Departemen	28	29	0	18	0	0	0	0	0
Departemen Koordinator Keadilan Berkeadilan										
5	Sekretariat Departemen	28	15	0	15	0	0	0	0	0
6	Parteien Departemen	27	12	0	15	0	0	0	0	0
Departemen Koordinator SDA dan Lingkungan										
7	Sekretariat Departemen	65	33	0	22	0	0	0	0	0
8	Parteien Departemen	22	2	0	20	0	0	0	0	0
Departemen Koordinator Infrastruktur										
9	Sekretariat Departemen	45	6	0	20	0	0	0	0	0
10	Parteien Departemen	7	4	0	2	0	0	0	0	0
Departemen Koordinator SDA, PPTA, dan Kelautan Maritim										
11	Sekretariat Departemen	27	11	0	15	0	0	0	0	0
12	Parteien Departemen	12	8	0	12	0	0	0	0	0
JUMLAH		502	280	25	162	26	0	0	0	0

- 19. Pembangunan micro ship pelayaran rakyat
- 20. Survei kualitas pelayanan SOP secara berkala.

- Kuesioner/Survei untuk Pegawai Kemenko Marves
Tautan survei ini mohon disampaikan untuk diisi oleh pegawai Kemenko Marves pada masing-masing unit kerja:
(https://s.id/monevSOP2021_pegawai)
- Kuesioner/Survei untuk Stakeholder (Internal/Eksternal) Kemenko Marves
Tautan survei ini mohon disampaikan untuk diisi oleh stakeholder/pengguna layanan masing-masing unit kerja, baik pengguna layanan dari internal maupun eksternal Kemenko Marves:
(https://s.id/monevSOP2021_stakeholder)

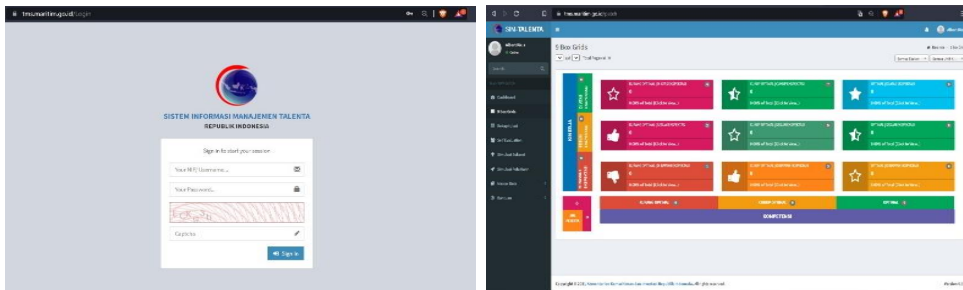
- 21. Penyusunan Peta Proses Bisnis yang telah di tuangkan dalam SOP.



22. Integrasi Sistem HR dan Ortala.



23. Menyusun manajemen *talent pool*.



24. Menyusun standar pelayanan Kemenko Marves

		
1. PELAYANAN PEMBERIAN KONSULTASI	2. PELAYANAN PEMBERIAN AUDIENSI	3. PELAYANAN PENYEDIAAN NARASUMBER/ PEMBICARA/KEYNOTE SPEAKER
		
4. PELAYANAN RAPAT KOORDINASI PENYELESAIAN ISU BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	5. PELAYANAN ASISTENSI PENYELESAIAN ISU BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	6. PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
		
7. PELAYANAN PELAYANAN PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK	8. PELAYANAN PENYEDIAAN BAHAN, REKAMAN, DAN RISALAH RAPAT KOORDINASI	9. PELAYANAN PENYEDIAAN INFORMASI PROGRESS PERMOHONAN PARAF MENTERI KOORDINATOR PADA RANCANGAN PERATURAN



D. Jangka Waktu Pelayanan:

- 1. Permohonan melalui elektronik/email:** Pengguna layanan menerima informasi/jawaban terkait pelaksanaan rapat koordinasi maksimal 5 (lima) hari sejak surat permohonan diterima oleh Kemenko Marves.
- 2. Datang langsung:** Pengguna layanan menerima informasi/jawaban terkait pelaksanaan rapat koordinasi maksimal 2 (dua) jam sejak permohonan disampaikan.



25. Setiap unit kerja menyusun membuat maklumat pelayanan yang disampaikan pada website Maritim (<https://maritim.go.id/maklumat-pelayanan-biro-hukum-kemenko-marves/>)



26. Sistem pengaduan dan ditindaklanjuti serta di monev setiap triwulan, (beberapa contoh tampilan dalam aplikasi):

A. Permohonan Selesai di Proses

No	Nama	Status	Detail	Aksi
3	Horangi	Permohonan	Permohonan sedang direvisi	PROSES, LEMIT
4	choifahatus sera	Permohonan	Permohonan selesai di proses	
5	choifahatus sera	Permohonan	Permohonan selesai di proses	
6	choifahatus sera	Permohonan	Permohonan selesai di proses	
7	choifahatus sera	Permohonan	Permohonan selesai di proses	
8	choifahatus sera	Permohonan	Permohonan selesai di proses	
9	choifahatus sera	Permohonan	Permohonan selesai di proses	
10	choifahatus sera	Permohonan	Permohonan selesai di proses	
11	choifahatus sera	Permohonan	Permohonan selesai di proses	
12	choifahatus sera	Permohonan	Permohonan selesai di proses	
13	choifahatus sera	Permohonan	Permohonan selesai di proses	
14	choifahatus sera	Permohonan	Permohonan selesai di proses	
15	choifahatus sera	Permohonan	Permohonan selesai di proses	
16	choifahatus sera	Permohonan	Permohonan selesai di proses	
17	choifahatus sera	Permohonan	Permohonan selesai di proses	
18	choifahatus sera	Permohonan	Permohonan selesai di proses	
19	choifahatus sera	Permohonan	Permohonan selesai di proses	
20	choifahatus sera	Permohonan	Permohonan selesai di proses	
21	choifahatus sera	Permohonan	Permohonan selesai di proses	
22	choifahatus sera	Permohonan	Permohonan selesai di proses	
23	choifahatus sera	Permohonan	Permohonan selesai di proses	

B. Permohonan Sedang di Proses

- Melengkapi Data dari Sumber yang Terpercaya Guna Menyusun Penelitian Skripsi (13 september 2021)

Permohonan

Status Permohonan: Permohonan Sedang Diproses

Nama Pemohon: WNI

Dasar WNI Perancangan

Nama Instansi:

Kategori Informasi yang diminta: LAINNYA

Cara Pengiriman: Diemail

Relevansi Informasi: Softcopy

Tanggal Ajukan Permohonan: Monday, 13 September 2021 14:07

Alasan Permohonan Informasi: Untuk memenuhi tugas akhir (Skripsi)

Tujuan/Anggaran Permohonan Informasi: melengkapi data dari sumber yang terpercaya guna menyusun penelitian

Search:

NO	DOCUMENT NAME	FILE
1	XTP	File
2	KTR	File

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous Next

PPID MARVES © 2021

- Tujuan Permohonan Tidak Jelas (22 September 2021)

Permohonan

Status Permohonan: Permohonan Sedang Diproses

Nama Pemohon: WNI

Dasar WNI Perancangan

Nama Instansi:

Kategori Informasi yang diminta: BIA

Cara Pengiriman: Diemail

Relevansi Informasi: Softcopy

Tanggal Ajukan Permohonan: Wednesday, 22 September 2021 14:07

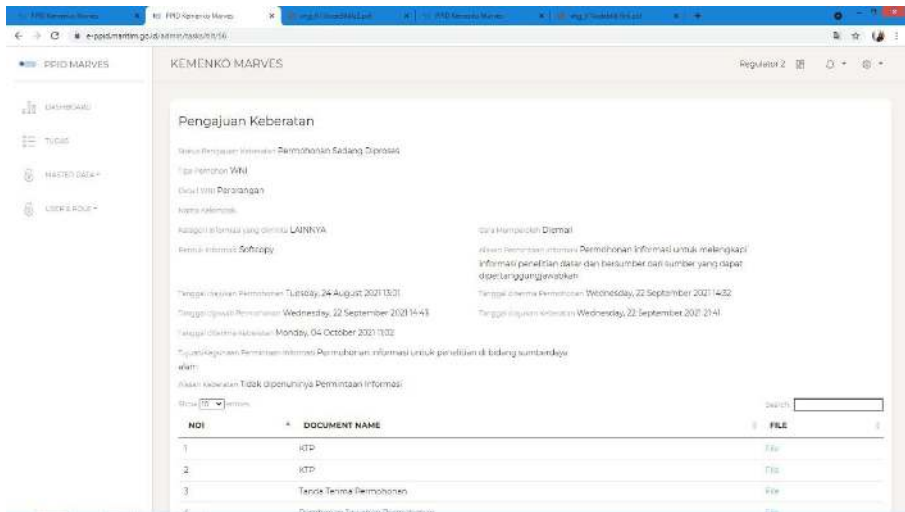
Alasan Permohonan Informasi: Perangai

Tujuan/Anggaran Permohonan Informasi: Perangai

Search:

NO	DOCUMENT NAME	FILE
1	KTR	File
2		File
3		File
4		File
5		File
6	hoang23	File
7	hoang23	File
8	hoang23	File

- Pengajuan Keberatan Karena Tidak Dipenuhinya Permintaan Informasi (22 September 2021)



Pengajuan Keberatan

Status Permohonan: **Permohonan Sedang Diproses**

Tipe Permohonan: **WNI**

Dokumen Perihal:

Nama Informan:

Aspek Informasi yang diminta: **LAINNYA**

Basis Informasi: **Softcopy**

Apakah Permintaan Informasi Dapat Diterima? **Ya**

Apakah Permintaan Informasi Dapat Diterima? **Tidak**

Apakah Permintaan Informasi Dapat Diterima? **Ya**

Apakah Permintaan Informasi Dapat Diterima? **Tidak**

Apakah Permintaan Informasi Dapat Diterima? **Ya**

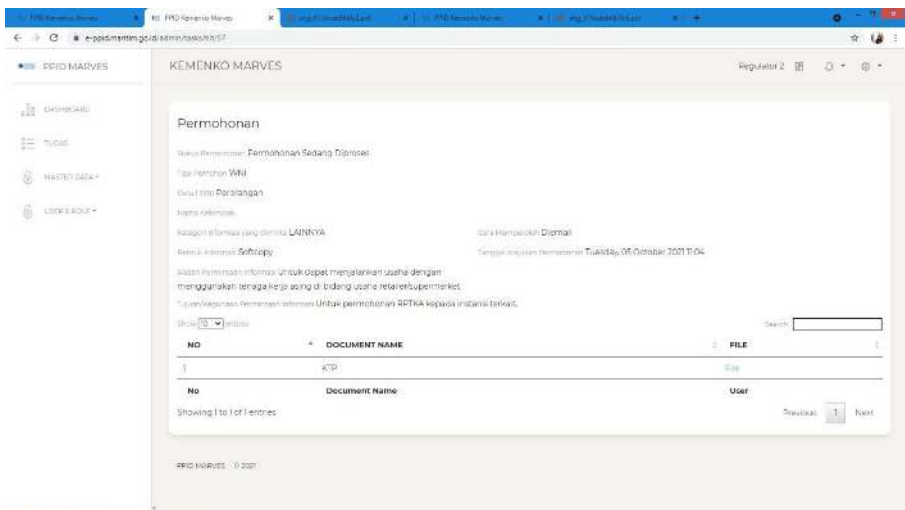
Apakah Permintaan Informasi Dapat Diterima? **Tidak**

Apakah Permintaan Informasi Dapat Diterima? **Ya**

Apakah Permintaan Informasi Dapat Diterima? **Tidak**

NO	DOCUMENT NAME	FILE
1	KTP	File
2	KTP	File
3	Tanda Teknik Permohonan	File

- Menjalankan Usaha dengan Menggunakan Tenaga Kerja Asing di Bidang Usaha Retailer (Supermarket) Tujuan dan Kegunaan Informasi Untuk Permohonan RPTKA Kepada Instansi Terkait (5 Oktober 2021)



Permohonan

Status Permohonan: **Permohonan Sedang Diproses**

Tipe Permohonan: **WNI**

Dokumen Perihal:

Nama Informan:

Aspek Informasi yang diminta: **LAINNYA**

Basis Informasi: **Softcopy**

Apakah Permintaan Informasi Dapat Diterima? **Ya**

Apakah Permintaan Informasi Dapat Diterima? **Tidak**

Apakah Permintaan Informasi Dapat Diterima? **Ya**

Apakah Permintaan Informasi Dapat Diterima? **Tidak**

Apakah Permintaan Informasi Dapat Diterima? **Ya**

Apakah Permintaan Informasi Dapat Diterima? **Tidak**

Apakah Permintaan Informasi Dapat Diterima? **Ya**

Apakah Permintaan Informasi Dapat Diterima? **Tidak**

NO	DOCUMENT NAME	FILE
1	KTP	File

Showing 1 of 1 entries

Previous 1 Next

27. Layanan Aduan & masukan masyarakat P3DN (<http://maritim.go.id/pengaduan-p3dn>)

The screenshot shows the 'Formulir Pengaduan P3DN' (P3DN Complaint Form) on the website maritim.go.id/pengaduan-p3dn. The page header includes the logo of the 'KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI' (Ministry of Maritime Affairs and Fisheries) and the text 'Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI'. The form itself is titled 'Formulir Pengaduan P3DN' and includes a note: 'Mohon mengisi data-data yang akurat sesuai yang diperlukan. Data yang Anda kirimkan akan kami rahasiakan sepenuhnya.' (Please fill in accurate data as required. The data you submit will be kept confidential.)

The form fields are as follows:

- Nama *** (Name): A text input field.
- Alamat Email *** (Email Address): A text input field.
- Monor masukkan alamat Email yang valid agar kami dapat melakukan korespondensi dengan Anda. Terima kasih.** (Please provide a valid email address so we can communicate with you. Thank you.)
- Nama Perusahaan *** (Company Name): A text input field.
- Nomor Telepon Seluler *** (Mobile Phone Number): A text input field.
- Subyek *** (Subject): A text input field.
- Pesan *** (Message): A large text area for the complaint details.

28. Layanan Aduan & masukan masyarakat Pelayaran Rakyat (Pelra) (<https://pelra.maritim.go.id/form-aduan-masukan>)

The screenshot shows the 'Form Aduan Masukan' (Complaint Form) on the website <https://pelra.maritim.go.id/form-aduan-masukan/>. The page header includes the text 'Punya Pertanyaan atau Keluhan Silahkan Hubungi Kami Melalui Email atau Form Aduan' (Have questions or complaints? Please contact us via email or complaint form).

The form fields are as follows:

- Nama *** (Name): A text input field.
- First** and **Last** (First and Last Name): Two text input fields.
- Email *** (Email): A text input field.
- No Telpn** (Phone Number): A text input field.
- Alamat Rumah** (Home Address): A text input field.
- Tau Pelra dari** (How do you know Pelra?): A list of checkboxes:
 - Google
 - Yahoo
 - Media Sosial
- Kirim Pesan Aduan** (Send Complaint Message): A button.

On the right side of the form, there is a map of Indonesia with a search bar and a 'Directions' button. The map shows the Indonesian archipelago with labels for various islands and neighboring countries like Vietnam, Cambodia, Malaysia, and Singapore.

29. Survei Eksternal Persepsi Korupsi

(<https://bit.ly/SurveiPersepsiKorupsiBiroKomunikasi>)

**SURVEI EKSTERNAL PERSEPSI KORUPSI
BIRO KOMUNIKASI KEMENKO MARVES**

Kepada yang terhormat, Bapak/Ibu/Saudara(i) Responden,

Dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas di lingkungan Biro Komunikasi Kemenko Marves guna mendukung Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk mengisi kuesioner Survei Eksternal Persepsi Korupsi.

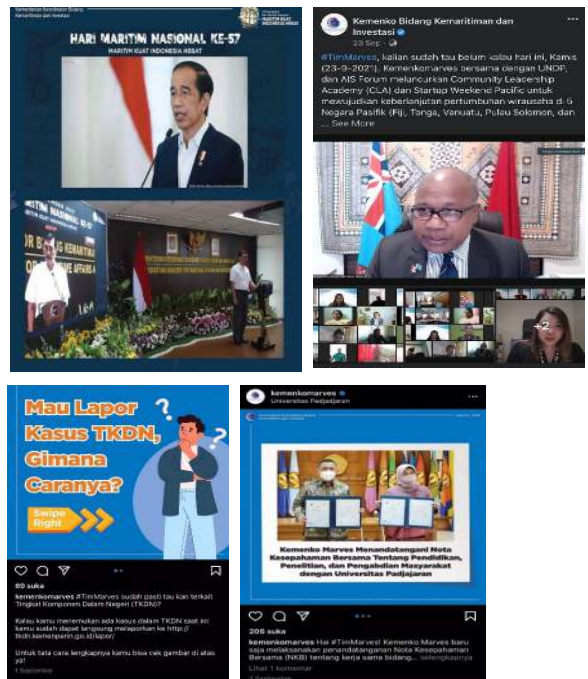
Atas partisipasi dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya.

TIM SURVEI EKSTERNAL PERSEPSI KORUPSI
BIRO KOMUNIKASI KEMENKO MARVES

[Login ke Google](#) untuk menyimpan progres. [Pelajari lebih lanjut](#)

30. Penggunaan kanal sosial media secara aktif dan *update* informasi terbaru, diantaranya sebagai berikut: (Facebook; Instagram; Twitter)

- Pelaporan Kasus TKDN (1 September 2021)
- PPKM Level Jawa Bali Periode 21 Sept - 4 Okt 2021 (2 September 2021)
- CPNS 2021 (3 September 2021)
- Program Citarum Harum (4 September 2021)
- Launching Film Mangi-Mangi (5 September 2021)
- Peresmian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu - 'Sampahku Tanggung Jawabku' (11 September 2021)
- Talkshow "Pesan Benteng Wolio Buton Untuk Anak Bangsa" (20 September 2021)
- Resensi Film "Bude Jo Belajar Kelola Sampah" (20 September 2021)
- Sharing Session "Literasi Bakau Nusantara" (20 September 2021)
- Acara Puncak Hari Maritim Nasional (22 September 2021)



- Peluncuran *Community Leadership Academy (CLA)* dan *Startup Weekend Pacific* (23 September 2021)
 - Susunan Acara *Opening Ceremony PON XX Papua 2021* (3 Oktober 2021)
 - Kemenko Maves Melaksanakan Penandatanganan NKB (2 September 2021)
 - Memperingati Hari Palang Merah Indonesia (3 September 2021)
 - Situasi Perkembangan Covid-19 Jawa-Bali (6 September 2021)
 - Informasi Mengenai Tol Trans Sumatera (13 September 2021)
 - Fakta dan Bukti Sejarah Nenek Moyang Bangsa Indonesia Seorang Pelaut (14 September 2021)
 - Workshop Pemanfaatan Strategi Digital Marketing untuk Optimasi Campaign Melalui Media Sosial (14 September 2021)
 - Mengenang Sejarah Kemaritiman Indonesia (15 September 2021)
31. Menerapkan tata pengelolaan pemerintahan new normal dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan seperti (*Scanner* suhu tubuh, *hand sanitizer*, masker, penerapan jaga jarak di lift dan tombol tanpa sentuh, kebijakan WFH dan WFO bagi pegawai).



Detektor suhu tubuh



Detektor COVID-19 (GeNose C19)



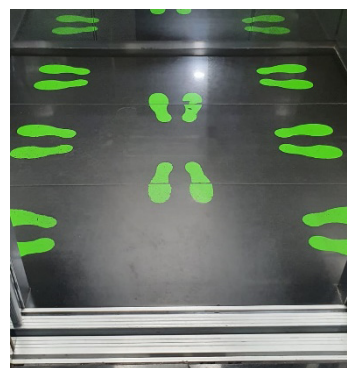
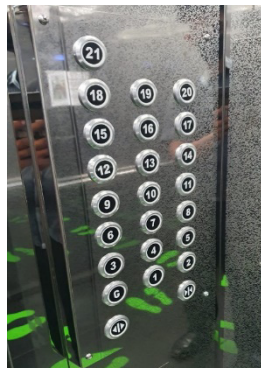
Hand sanitizer dan disinfektant



Masker



Tombol nirsentuh dan penerapan jaga jarak di lift



32. Indeks Merit System sebesar 184,5 masuk katategori 2, atas integrasi sistem HR dan Ortala. Untuk Penilaian Sistem Merit, Kemenko Marves telah mendapatkan nilai 206. Untuk terus meningkatkan nilai tersebut, akan selalu dilakukan *update* bukti dukung di dalam aplikasi tersebut.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI				
No	Indikator	Kategori	Bobot	Nilai
1	1. Dalam hal ini, pada saat ini, telah terdapat 100% (satu ratus persen) dari total jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan.	Ya	2,0	2,0
	2. Dalam hal ini, pada saat ini, telah terdapat 100% (satu ratus persen) dari total jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan.	Ya	2,0	2,0
	3. Dalam hal ini, pada saat ini, telah terdapat 100% (satu ratus persen) dari total jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan.	Ya	2,0	2,0
	4. Dalam hal ini, pada saat ini, telah terdapat 100% (satu ratus persen) dari total jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan.	Ya	2,0	2,0
2	1. Penetapan tujuan dan indikator kinerja yang terdapat dalam rencana strategis yang telah ditetapkan.	Ya	2	4
	2. Penetapan tujuan dan indikator kinerja yang terdapat dalam rencana strategis yang telah ditetapkan.	Ya	2	4
	3. Penetapan tujuan dan indikator kinerja yang terdapat dalam rencana strategis yang telah ditetapkan.	Ya	2	4
	4. Penetapan tujuan dan indikator kinerja yang terdapat dalam rencana strategis yang telah ditetapkan.	Ya	2	4
3	1. Penetapan tujuan dan indikator kinerja yang terdapat dalam rencana strategis yang telah ditetapkan.	Ya	2	4
	2. Penetapan tujuan dan indikator kinerja yang terdapat dalam rencana strategis yang telah ditetapkan.	Ya	2	4
	3. Penetapan tujuan dan indikator kinerja yang terdapat dalam rencana strategis yang telah ditetapkan.	Ya	2	4
	4. Penetapan tujuan dan indikator kinerja yang terdapat dalam rencana strategis yang telah ditetapkan.	Ya	2	4

Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

23 September
Hari Maritim Nasional
MARITIM KUAT
INDONESIA HEBAT

HARI MARITIM NASIONAL KE-57

MARITIM KUAT INDONESIA HEBAT

VISI 2045 TERKAIT KEMARITIMAN



Peran Sektor Maritim

12,3% dari PDB	2045
9,5% dari PDB	2030
6,46% dari PDB	2015

Sektor Cluster Maritim

Perikanan, ESDM, Industri Bioteknologi, Industri maritim, Jasa Maritim, Wisata Bahari, Perekonomian Laut, Bangunan Laut dan Hankam Laut.

Kebijakan Maritim merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Perencanaan Maritim merupakan perencanaan yang berkaitan dengan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

23 SEPTEMBER 2021

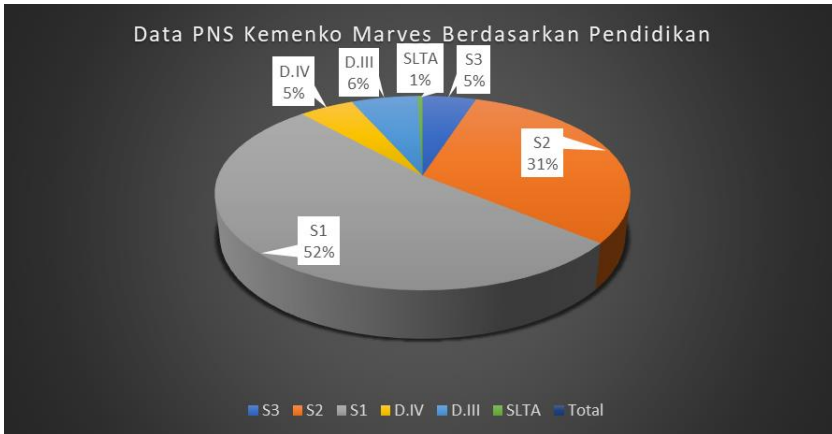
HARI MARITIM NASIONAL KE-57

MARITIM KUAT INDONESIA HEBAT



3.7. Analisa Kondisi Sumber Daya Pegawai

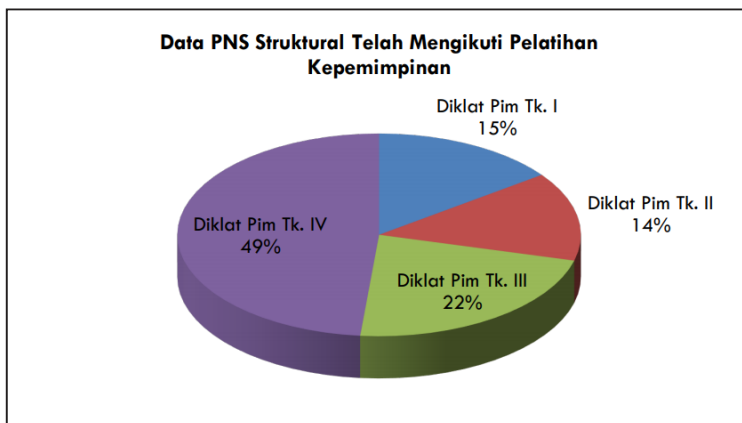
Dari total 426 ASN di lingkungan Kemenko Marves pada tahun 2021, hanya 21 pegawai (5%) yang merupakan lulusan S3, dan 31% (131 pegawai) yang merupakan lulusan S2. Lulusan dengan jumlah tertinggi adalah lulusan S1, yakni mencapai 221 pegawai atau 52 % dari total pegawai. Sisanya merupakan lulusan D.IV sebanyak 25 pegawai (6%), lulusan D.III sebanyak 6% (26 pegawai) dan SLTA 0,46% (2 pegawai). Kemenko Marves ke depan merencanakan peningkatan *grade* calon pegawai dengan menambah formasi ASN dengan gelar S3 dan S2. Data pegawai berdasarkan Pendidikan seperti terlihat pada gambar di bawah ini:



Grafik 18. Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Dari total 11 Pejabat Tinggi Madya, terdapat 2 pejabat yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat I. Dari keseluruhan 39 Pejabat Tinggi Pratama, terdapat 2 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat I. sejumlah 5 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat II, 3 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator dan 2 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas. Dari total 94 pejabat administrator, sejumlah 22 pejabat telah mengikuti pelatihan administrator (Pim Tk. III) dan 29 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas (Pim Tk. IV), serta dari total 54 pejabat pengawas, sejumlah 2 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator (Pim Tk. III) dan 37 pejabat telah mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas (Pim Tk. IV).

Jumlah pegawai yang sudah mengikuti diklat fungsional masih sangat rendah yakni sebanyak 34 orang dan belum ada pegawai yang mengikuti diklat teknis. Namun demikian, jumlah pegawai yang telah mengikuti workshop dan seminar tercatat sebanyak 355 orang dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 19. Jumlah Pegawai Kemenko Marves Mengikuti Diklat

3.8. Analisa Sumber Daya Anggaran

Anggaran Kemenko Marves TA. 2021 telah disahkan pada tanggal 23 November 2020, dimana Kemenko Marves memperoleh alokasi Pagu Anggaran Definitif sebesar Rp. 314.596.417.000 (Tiga Ratus Empat Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah),- yang terbagi dalam 2 program yaitu Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dengan pagu anggaran Rp 120.708.099.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 193.888.318.000,-.

Sampai dengan TW III Kemenko Marves telah melakukan *refocusing* sebanyak 4 kali. Dari hasil pembahasan jumlah pagu anggaran Kemenko Marves menjadi Rp 264.977.466.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), adanya pengurangan sebesar Rp 49.618.951.000,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah). Adapun anggaran per unit kerja eselon I setelah dilakukan *refocusing* sampai dengan Triwulan III sebagai berikut:

Tabel 57. Pagu Anggaran setelah *Refocusing* Tahap 4

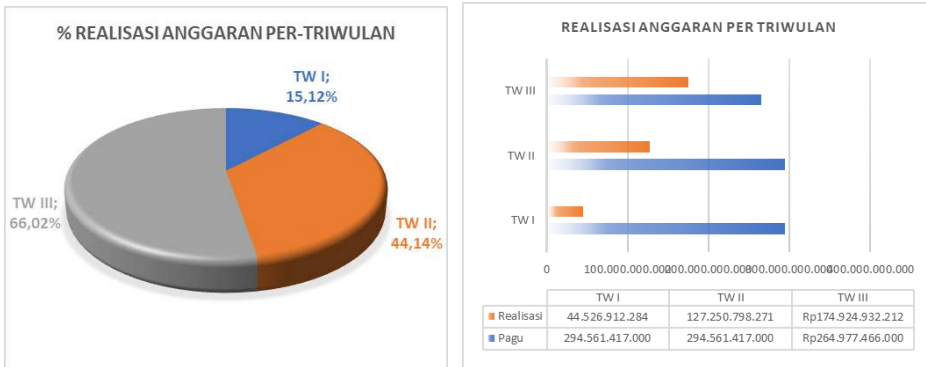
Deskripsi	Pagu	
	Awal (Rp)	Setelah <i>Refocusing</i> tahap 4 (Rp)
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	120.708.099.000	84.708.765.000
Program Dukungan Manajemen	193.888.318.000	180.268.701.000
Total	314.596.417.000	264.977.466.000

Tabel 58. Unit Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

No	Unit Kerja	Pagu (Rp.)
1	Sekretariat Kementerian Koordinator	160.474.711.000
2	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	42.250.666.000
3	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	11.600.000.000
4	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	11.749.999.000
5	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	11.375.000.000
6	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	11.500.000.000
7	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	16.027.090.000
Total Anggaran		264.977.466.000

Kemenko Marves memiliki tingkat penyerapan anggaran sampai triwulan III sebesar Rp 174.924.932.212,- (66,02%). Jika dibandingkan pada triwulan sebelumnya ada peningkatan penyerapan anggaran (triwulan I realisasi anggaran Rp 44.526.912.284,- (15,12%), realisasi triwulan II Rp 127.250.798.271,- (44,14%)), walaupun sampai dengan triwulan III masih dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid 19. Adapun realisasi per triwulan seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 15. Diagram Realisasi Anggaran Pertriwulan tahun 2021



Sumber: SAS, Sept 2021

Dari realisasi anggaran tersebut, capaian kinerja Kemenko Marves sebesar 21,14%, hal ini karena beberapa target kinerja dari IKU direncanakan akan dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021). Adapun penjelasan realisasi anggaran terhadap capai IKU sampai dengan TW III, adalah sebagai berikut:

- *Stakeholder Perspective* capaian sebesar 29,23%, dari 3 SS yang ada capaian kinerja yang dicapai baru dari SS 3: Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur dengan IKU yaitu Indeks Daya Saing Global (IDSG) sebesar 87,69%. Program dan kegiatan untuk mendukung IKU ini adalah Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan dengan 2 kegiatan yaitu Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi dengan jumlah Pagu anggaran Rp 1.825.000.000,- serta Koordinasi Investasi Dan Pertambangan dengan pagu sebesar Rp 1.435.270.000,-. Realisasi atas 2 kegiatan tersebut sampai dengan triwulan III seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian IKU s.d TW III
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan				
1	Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	8.064.542.000	5.609.357.501	87,69%
2	Koordinasi Investasi Dan Pertambangan	10.260.386.000	4.688.245.915	

- *Customer Perspective* terdiri dari 5 (lima) SS, dengan capaian sebesar 8,78%. Target kinerja yang dapat disajikan pada perspektif yaitu IKU 11 (Indeks Kapabilitas Inovasi). Capaian atas IKU ini telah dirilis *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Cornell University dan INSEAD pada bulan September 2021. Target tahun 2021 atas IKU ini adalah 38,6, dengan realisasi 27,1 sehingga capaian nya sebesar 70,21%.

IKU ini didukung oleh kegiatan Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan besar pagu anggaran Rp 6.869.367.000,- dengan realisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp 4.377.191.923,-. Realisasi atas kegiatan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian IKU s.d TW III
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan				
1	Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6.869.367.000	4.377.191.923	70,21%

- Learning and Growth dengan 4 (empat) SS, capaian kinerja yang diperoleh adalah 72,81%, dari 4 SS sampai TW III telah dapat teralisasi 3 IKU, 1 IKU ditargetkan dicapai pada akhir tahun 2021 berdasarkan hasil penilaian dari BKN. Adapun realisasi yaitu sebagai berikut:
 - IKU Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves yaitu dari target 80 realisasi 75,18 (93,98%). IKU ini didukung oleh kegiatan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal dengan pagu sebesar Rp 3.304.838.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.342.537.235,-
 - IKU Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dari target 3,3 pada akhir tahun 2021 telah terealisasi 3,21 (berdasarkan penilaian sementara tim assesor KemenPANRB yang dilaksanakan pada bulan September), capaian atas IKU tersebut adalah 97,27%. KemenPANRB baru akan merilis hasil penilaian secara resmi pada akhir tahun 2021. IKU ini didukung oleh kegiatan Layanan Data dan Informasi dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp.736.560.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.115.851.921,.
 - IKU Opini BPK tercapai 100%, hal ini dibuktikan dengan realisasi WTP dari target yang dicanangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan LHP Nomor: 26b/LHP/XV/05/2021 tanggal 31 Mei 2021). IKU ini didukung oleh kegiatan Layanan Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.736.492.000,-

Realisasi atas kegiatan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian IKU s.d TW III
Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan				
1	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3.304.838.000	2.342.537.235	93,98%
2	Layanan Data dan Informasi	2.736.560.000	1.115.851.921	97,27%
3	Layanan Keuangan	2.736.492.000		100%

Secara keseluruhan capaian atas IKU dengan realisasi sumberdaya anggaran sampai dengan triwulan III masih sesuai dengan target kinerja, yaitu capaian atas kinerja hal ini karena beberapa target kinerja akan dicapai pada akhir tahun 2021. Namun demikian, dengan adanya *refocusing* anggaran karena masih dihadapi dengan kondisi pandemi covid 19 sedikit berpengaruh terhadap capaian kinerja. Seperti telah disampaikan di atas bahwa capaian kinerja s.d TW III sebesar 21,14%, dengan tingkat serapan anggaran mencapai 66,02%. Beberapa kegiatan masih dilakukan secara virtual, sehingga penyerapan anggaran agak terhambat. Seluruh *stakeholder* di Kemenko Marves optimis sampai dengan akhir tahun 2021 target dari capaian kinerja dan realisasi anggaran dapat tercapai dengan maksimal.

Penutup

04

4.1 Kesimpulan

- a. Secara umum, angka capaian kinerja Kemenko Marves tercapai sebagaimana yang diperjanjikan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Indikator kinerja yang digunakan pada tahun 2021 masih sama dengan tahun 2020 (tidak mengalami perubahan), hal ini merupakan kelanjutan atas pelaksanaan Renstra Kemenko Marves Tahun 2020-2024 pada tahun kedua.
- b. Laporan kinerja Kemenko Marves sampai dengan triwulan III Tahun 2021 belum dapat menyajikan secara keseluruhan atas capaian dari target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kemenko Marves tahun 2021, dari 17 IKU yang diperjanjikan, sampai dengan triwulan III sebesar 21,14%, beberapa target kinerja dari IKU direncanakan akan dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021), dan akan disajikan pada laporan kinerja tahunan. Adapun rincian capaian sebagai berikut:
 - ❖ *Stakeholder Perspective* capaian sebesar 29,23%, capaian ini didapat dari SS 3: Menguatnya Jatidiri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Berkepribadian Luhur dengan IKU yaitu Indeks Daya Saing Global (IDSG) sebesar 87,69%, dari target tahun 2021 sebesar 65 dengan realisasi 57. Capaian yang disajikan merupakan hasil dari Survei *World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021* yang dilakukan oleh *Institute Management Development (IMD)* menempatkan daya saing Indonesia pada peringkat 37 dari total 64 negara yang didata. Hasil penilaian atas IKU ini akan dirilis oleh *World Economic Forum* pada akhir tahun 2021. Sedangkan 2 IKU lainnya capaian kinerja ditargetkan dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021).
 - ❖ Untuk *Customer Perspective* terdiri dari 5 (lima) SS sampai dengan Triwulan III capaian atas perspektif ini sebesar 8,78%, target kinerja yang dapat disajikan pada perspektif yaitu IKU 11 (Indeks Kapabilitas Inovasi). Capaian atas IKU ini telah dirilis *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, *Cornell University* dan *INSEAD* pada bulan September 2021. Target tahun 2021 atas IKU ini adalah 38,6, dengan realisasi tercapai 27,1 sehingga capaian nya sebesar 70,21%. Sedangkan capaian kinerja lainnya ditargetkan dicapai pada triwulan IV (akhir tahun 2021).

- ❖ *Internal Business Process Perspektif* terdiri dari 2 (dua) SS sampai dengan triwulan III belum dapat disajikan, karena target atas IKU nya akan dicapai pada akhir tahun 2021.
 - ❖ *Learning and Growth Perspektif* dengan 4 (empat) SS, pada triwulan III target atau capaian kinerja yang diperoleh adalah 72,81%, dari 4 SS sampai TW III telah dapat teralisasi 3 IKU, 1 IKU ditargetkan dicapai pada akhir tahun 2021 berdasarkan hasil penilaian dari BKN. Adapun realisasi yaitu sebagai berikut:
 - IKU Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kemenko Marves yaitu dari target 80 realisasi 75,18 (93,98%). Namun demikian Kemenko Marves berhak mengajukan penyesuaian tunjangan kinerja menjadi sebesar 80%.
 - IKU Nilai Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dari target 3,3 pada akhir tahun 2021 telah terealisasi 3,21 (berdasarkan penilaian sementara tim assesor KemenPANRB yang dilaksanakan pada bulan September), capaian atas IKU tersebut adalah 97,27%. KemenPANRB baru akan merilis hasil penilaian secara resmi pada akhir tahun 2021.
 - IKU Opini BPK tercapai 100%, hal ini dibuktikan dengan realisasi WTP dari target yang dicanangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021.
- c. Jumlah Pagu Anggaran Kemenko Marves setelah dilakukan 4 kali refocusing, dari pagu awal sebesar Rp 314.596.417.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) menjadi Rp 264.977.466.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), adanya pengurangan sebesar Rp 49.618.951.000,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
- Tingkat penyerapan anggaran sampai triwulan III 2021 yaitu sebesar 66,02% dengan nilai Rp 174.924.932.212,- (Seratus Tujuh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah). Realisasi belanja anggaran unit kerja eselon I terbesar yaitu Sekretariat Kemenko dari pagu Rp. 160.474.711.000,- realisasi Rp. 123.951.851.076,- (77,24%), sedangkan realisasi terkecil adalah Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (D1) dari pagu sebesar Rp. 42.250.666.000,- baru teralisasi Rp. 14.216.777.904,- (33,65%)
- d. Dinamika eksternal yang masih dihadapi dengan kondisi menghadapi pandemi Covid-19 dan kebijakan Pemerintah dengan penerapan PPKM Darurat wilayah Jawa-Bali sampai dengan akhir triwulan III tahun 2021 agak mempengaruhi terhadap upaya yang dilakukan Kemenko Marves dalam mencapai target atas capaian kinerja. Beberapa koordinasi tetap dilaksanakan secara daring dengan stakeholders terkait sama seperti tahun sebelumnya (2020), untuk mendorong akselerasi pencapaian target kinerja.

- e. Mulai tumbuhnya kesadaran unit kerja pendukung dalam melaporkan capaian kinerja sampai dengan triwulan III hal ini harus dipertahankan dan ditingkatkan kembali pada triwulan selanjutnya.

4.2. Langkah Perbaikan Kedepan

Untuk perbaikan dimasa mendatang, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan unit kerja untuk mendukung kapasitas pelaporan terus ditingkatkan terutama dalam menyampaikan data dukung serta keberhasilan, kegagalan, inovasi dan success story terhadap pencapaian indikator kinerja Menko Marves yang telah diperjanjikan dalam PK tahun 2021.
- b. Setiap target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra Kemenko Marves tahun 2020 – 2024 maupun dalam Perjanjian Kinerja agar rutin disampaikan unit kerja pelaksana IKU, untuk dapat diketahui dan dilaporkan tingkat perkembangan atas capaian dari target IKU.
- c. Perlu dilakukan peningkatan pemutahiran perencanaan dengan teknologi informasi, pengumpulan data yang lebih andal, pengukuran yang berjenjang dan sistematika analisis yang lebih komprehensif.
- d. Laporan Kinerja Triwulan III agar dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja sepanjang tahun 2021, sehingga target kinerja dapat dicapai dan dihitung capaiannya pada akhir tahun 2021.
- e. Beberapa IKU yang telah diperjanjikan pada PK tahun 2021 dan adanya kemungkinan tidak tercapai sesuai target, agar dilakukan koordinasi dengan K/L yang mengeluarkan hasil penilaian terhadap IKU tersebut, sebagai bukti dukung atas “tidak tercapainya” IKU tersebut.

Harapannya, laporan triwulan III ini dapat menjadi umpan balik dalam proses capaian kinerja pada triwulan selanjutnya, sehingga SAKIP di Kemenko Marves dapat berjalan dengan baik. Melalui pelaksanaan SAKIP yang baik diharapkan Kemenko Marves dapat merealisasikan sasaran dan target kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan. Tujuan akhirnya adalah masyarakat dapat merasakan manfaat yang baik dan signifikan akan keberadaan Kemenko Marves. Semoga...

Lampiran 05

LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
<i>Stakeholders Perspective</i>				
SS.1	Teguhnya Jati Diri Indonesia sebagai Negara Maritim Yang Mandiri dan Berdaulat	1	Efektifitas Kepemimpinan Maritim	>=3
SS.2	Terwujudnya Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Kuat sebagai Penggerak Utama Perekonomian Nasional	2	PDB Maritim	6,63
SS3	Menguatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari Maju dan Bet kepribadian Luhur	3	Indeks Daya Saing Global (IDSG)	65
<i>Customer Perspective</i>				
SS.4	Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Maritim yang Mandiri Mengelola Lautnya serta Aktif di Forum Internasional	4	Tingkat Kedaulatan Maritim	3
SS5	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemaritiman yang Seimbang dan Dinamis	5	Indeks Kinerja Logistik	3,1
		6	Disparitas Ekonomi Antar Wilayah	-0
SS.6	Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia	7	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	75
		8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,33
SS.7	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam	9	PDB dari Sektor Sumber Daya Alam dan Jasa	16.31
		10	Tingkat Komponen Dalam Negeri	45
SS.8	Menguatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara	11	Indeks Kapabilitas Inovasi	38,6
<i>Internal Business Process Perspective</i>				
SS.9	Tersedianya Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	12	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditetapkan	100
SS.10	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman yang Efektif dan Efisien	13	Persentase Hasil Pengendalian yang Ditindaklanjuti	100
<i>Internal Business Process Perspective</i>				
SS.11	Tersedianya SDM Aparatur yang Profesional dan Kompeten	14	Indeks Profesionalitas ASN	85

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
SS.12	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel dan Kapabel di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	15	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	80
SS 13	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik	16	Indeks SPBE	3.3
SS 14	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	17	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	Rp 193.888.318.000
2	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rp 120.708.099.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp 314.596.417.000

Jakarta, Januari 2021
Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi RI



Luhut B. Pandjaitan

LAMPIRAN 2. MARVES AWARD 2021 LINGKUP KEMENKO MARVES

- ❖ **Pelaksanaan RB Terbaik Tahun 2021** berdasarkan pada Indeks PMPRB Tahun 2021. Penerima penghargaan yakni:
 - 1) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada Peringkat I
 - 2) Sekretariat Kementerian Koordinator pada Peringkat II
 - 3) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan pada Peringkat III
- ❖ **Agen Perubahan Teladan Masing-masing Unit Eselon I Lingkungan Kementerian Tahun 2020** berdasarkan pada hasil survei 360 derajat yaitu penilaian dari atasan/pimpinan, rekan sejawat sesama AoC dan/atau bawahan. Penerima penghargaan yakni:
 - 1) Aoc Teladan Unit Deputi 1: Ali Sibro Malisi
 - 2) Aoc Teladan Unit Deputi 2: Sujiat Wati
 - 3) Aoc Teladan Unit Deputi 3: Romi Firman
 - 4) Aoc Teladan Unit Deputi 4: Farida Achmad
 - 5) Aoc Teladan Unit Deputi 5: Meisela Majid
 - 6) Aoc Teladan Unit Deputi 6: Hendra Kusuma Wardana
 - 7) Aoc Teladan Unit Setmenko: J.A. Maulidan
- ❖ Penganugerahan **Keterbukaan Informasi Publik Kategori PPID Unit Kerja Pengelola Informasi Publik Terbaik Tahun 2020** kepada Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
- ❖ Penganugerahan **Keterbukaan Informasi Publik Kategori PPID Unit Kerja Penyedia Informasi Paling Koordinatif Tahun 2020** kepada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
- ❖ Penganugerahan **Keterbukaan Informasi Publik Kategori PPID Unit Kerja Pelayanan Publik Paling Responsif Tahun 2020** kepada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
- ❖ Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Kategori **Pengelolaan Pengaduan Paling Koordinatif Pada Aplikasi PESAN & LAPOR Tahun 2020** kepada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
- ❖ Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Kategori **Pengelolaan Pengaduan Paling Responsif Pada Aplikasi PESAN & LAPOR Tahun 2020** kepada Sekretariat Kementerian Koordinator
- ❖ Penghargaan **Penyampaian Tercepat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun 2020** (Kategori Individu):

- 1) Peringkat I kepada Dr.Ir. Djoko Hartoyo, M.Mar.Sc
 - 2) Peringkat II kepada Drs. Tito Setiawan, M.M
 - 3) Peringkat III kepada Okto Irianto, S.I.P., M.A.
- ❖ Penghargaan **Penyampaian Tercepat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun 2020** (Kategori Unit Kerja):
- 1) Peringkat I kepada Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi
 - 2) Peringkat II kepada Sekretariat Kementerian Koordinator
 - 3) Peringkat III kepada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
- ❖ Penghargaan **Penyampaian Tercepat Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara** (Kategori Individu):
- 1) Peringkat I kepada Ervan Susilowati, S.H., S.I.P., M.M
 - 2) Peringkat II kepada Farida Achmad, S.AP
 - 3) Peringkat III kepada Cahyadi Rasyid, ST., M.Si
- ❖ Penghargaan **Penyampaian Tercepat Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara** (Kategori Unit Kerja):
- 1) Peringkat I kepada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
 - 2) Peringkat II kepada Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 3) Peringkat III kepada Sekretariat Kementerian Koordinator
- ❖ **Penghargaan Inisiatif Usulan Kegiatan Quick Wins Tahun 2021** kepada Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, dan Sekretariat Kementerian Koordinator
- ❖ Penganugerahan **Unit Kerja dengan Capaian Kinerja Terbaik Tahun 2020** kepada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
- ❖ Penganugerahan **Unit Kerja dengan Penyelenggara SAKIP Terbaik Tahun 2021** kepada Sekretariat Kementerian Koordinator
- ❖ Penganugerahan **Unit Kerja Pengelola Keuangan Terbaik Berdasarkan Nilai IKPA** kepada:
- 1) Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan pada Peringkat I
 - 2) Inspektorat pada Peringkat II
 - 3) Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Peringkat III

Tim Penyusun

PENASEHAT

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Luhut Binsar Pandjaitan

PENGARAH

Sekretaris Kementerian Koordinator
Agung Kuswandono

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Perencanaan
Arif Rahman

PENYUSUN

Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja

Yetri Fermila

Kepala Bagian Program Dan Anggaran

Achmad Murman

Kepala Bagian Persidangan

Laode Aulia Rahman Hakim

Kepala Bagian Kebijakan Strategis

Muhammad Ghazali Unus

Kepala Subbagian Pengelolaan Dan Pengukuran
Kinerja

Nuzulia Yuaniva

Kepala Subbagian Dukungan Akuntabilitas Kinerja

Happy Budi Baswara

Kepala Subbagian Pelaporan Kinerja

Indra Nugraha

Sari Dewi Maharani

Andi Juwandi

Sigit Nugroho

Deby Purnama

EDITOR

Kasubbag Pelaporan Kinerja

Indra Nugraha

Pelaksana Subbagian Pelaporan Kinerja

Andini Mey Larasati

Anisa Nurhadaya Pramitha

KONTRIBUTOR:

Inspektur

Kepala Biro Hukum

Kepala Biro Komunikasi

Kepala Biro Umum

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber
Daya Maritim

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
dan Transportasi

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan
Lingkungan dan Kehutanan

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan
Pertambangan

Kabag Program lingkup Deputi pada Kemenko
Marves

Kabag Adum pada Inspektorat

Kasubbag TU lingkup Setmenko Marves

Kasubbag Subbagian Pemantauan dan Evaluasi
lingkup Deputi pada Kemenko Marves

Kasubbag Pelaporan Inspektorat

Foto Dokumentasi

Tim Humas Biro Komunikasi

Produksi

Biro Perencanaan, Gd. Kemenko Marves Lt.5
Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, DKI Jakarta
10340

